



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2022**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021



Hj. Sri Mulyani, S.M
Bupati Klaten

H. Yoga Hardaya, S.H.,M.H
Wakil Bupati Klaten



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Mayor Kusmanto No. 23 Semangak Klaten Kode Pos 57415
Telepon 0272.321040 Faksimile 0272.321040

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjaditanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ini .

Klaten, 29 Maret 2022

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KLATEN



Jadang Prihono
JADANG PRIHONO, S.STP

Pembina Tingkat I

NIP. 19810216 199912 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta ridho-Nya, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021** yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan. Penyusunan LPPD Tahun 2021 ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolak ukur dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian laporan ini berisi gambaran kinerja pelaksanaan pemerintahan yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2021.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2021, belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala upaya yang telah kami laksanakan dapat mewujudkan Kabupaten Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Sejahtera***.

Klaten, Maret 2022

BUPATI KLATEN

[Signature]
Dr. Sri Mulyani, S.M.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	1
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	12
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	46
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAH DAERAH	67
2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	67
2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
URUSAN PEMERINTAHAN.....	73
2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	73
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	302
3.1 TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DISELENGGARAKAN	
OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA	305
3.2 TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DISELENGGARAKAN	
OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA	305
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN	
STANDAR PELAYANAN MINIMAL	316
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	316
4.2 URUSAN KESEHATAN	324
4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	336
4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	342
4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM	
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	347
4.6 URUSAN SOSIAL	362
BAB V PENUTUP.....	384

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Hal

Gambar 2.1 Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021	69
Gambar 2.2 Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021.....	69
Gambar 2.3 Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%) Tahun 2016 – 2021.....	71
Gambar 2.4 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Klaten Tahun 2017 – 2021.....	100
Gambar 2.5 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2017-2021	101
Gambar 2.6 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2017-2021.....	103
Gambar 2.7 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	104
Gambar 2.8 Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2017-2021.	106
Gambar 2.9 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.	110
Gambar 2.10 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.	111
Gambar 2.11 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.	112
Gambar 2.12 Perkembangan Persentase Prevelensi Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.	112
Gambar 2.13 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.	117
Gambar 2.14 Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).	118

Gambar 2.15	
Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).	118
Gambar 2.16	
Jumlah Pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Bagas Waras.....	119
Gambar 2.17	
PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2017-2021	121
Gambar 2.18	
Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	158
Tabel 1.1	
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan tahun 2021	4
Tabel 1.2	
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2021	5
Tabel 1.3	
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2021	5
Tabel 1.4	
Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten menurut Unit Kerja Tahun 2021	8
Tabel 1.5	
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021	10
Tabel 1.6	
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021.....	10
Tabel 1.7	
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021	11
Tabel 1.8	
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Klaten.....	15
Tabel 1.9	
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	27
Tabel 1.10	
Perjanjian Kinerja Kepala Daerah tahun 2021	38
Tabel 1.11	
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	42
Tabel 1.12	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021	51
Tabel 1.13	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan kesehatan Tahun 2021	53

Tabel 1.14	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021	54
Tabel 1.15	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	55
Tabel 1.16	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum	
dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021	55
Tabel 1.17	
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	
Bidang Urusan Sosial Tahun 2021	57
Tabel 1.18	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Pendidikan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan	
Kabupaten Klaten Tahun 2021	58
Tabel 1.19	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Kesehatan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan	
Kabupaten Klaten Tahun 2021	59
Tabel 1.20	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang	
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ke Dalam	
Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Kabupaten Klaten Tahun 2021	61
Tabel 1.21	
Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam	
Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
Kabupaten Klaten Tahun 2021	62
Tabel 1.22	
Integrasi SPM Bidang Urusan Ketentraman,	
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ke Dalam	
Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD	
Kabupaten Klaten Tahun 2021	63
Tabel 1.23	
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	
Bidang Urusan Sosial Ke Dalam Arah Kebijakan	
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan	
Anak dan Keluarga Berencana	
Kabupaten Klaten Tahun 2021	65
Tabel 2.1	
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten	
Tahun 2021 dan 2020 berserta Perubahannya	67

Tabel 2.2	
Indeks Pembangunan Manusia	
di Kabupaten Klaten tahun 2016-2021	68
Tabel 2.3	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	
dan Tingkat Pengangguran	
Terbuka (TPT) % di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2021	70
Tabel 2.4.a	
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten	
tahun 2016 – 2021	71
Tabel 2.4.b	
Distribusi Pendapatan penduduk Klaten	
Tahun 2019 – 2021.....	72
Tabel 2.5	
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021	74
Tabel 2.6	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif	79
Tabel 2.7	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif	79
Tabel 2.8	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten	
dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	79
Tabel 2.9	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten	
Tahun 2019,2020 dan Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Organisasi	
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dibandingkan	
dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten.....	89
Tabel 2.10	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya	
Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini,	
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	99
Tabel 2.11	
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)	
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan	
Tahun 2017-2021	101
Tabel 2.12	
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)	
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan	
Tahun 2017-2021	102
Tabel 2.13	
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut	
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	103

Tabel 2.14	
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV	
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	105
Tabel 2.15	
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2	
dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021.....	105
Tabel 2.16	
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs	
Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	106
Tabel 2.17	
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2021	107
Tabel 2.18	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Kualitas Kesehatan Masyarakat dan	
Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan	109
Tabel 2.19	
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan	
dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	110
Tabel 2.20	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	114
Tabel 2.21	
Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	115
Tabel 2.22	
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya	
di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021	115
Tabel 2.23	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitatan oleh Masyarakat	
dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit	117
Tabel 2.24	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial	
dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi	
yang Berperspektif HAM.....	121
Tabel 2.25	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Hasil Pengembangan dan Pembinaan	
Pemuda dan Olahraga	124
Tabel 2.26	
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga	
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	125

Tabel 2.27 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	126
Tabel 2.28 Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	126
Tabel 2.29 Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	127
Tabel 2.30 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan	129
Tabel 2.31 Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	129
Tabel 2.32 Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2017 – 2021	130
Tabel 2.33 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.....	131
Tabel 2.34 Capaian Indeks Profesionalitas ASN	131
Tabel 2.35 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	134
Tabel 2.36 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020	134
Tabel 2.37 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	136
Tabel 2.38 Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2017-2021	136
Tabel 2.39 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	138

Tabel 2.40	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD.....	140
Tabel 2.41	
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	140
Tabel 2.42	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	141
Tabel 2.43	
Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021	142
Tabel 2.44	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	144
Tabel 2.45	
Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	146
Tabel 2.46	
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten	147
Tabel 2.47	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	150
Tabel 2.48	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM.....	152
Tabel 2.49	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	153
Tabel 2.50	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel	155
Tabel 2.51	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan.....	156
Tabel 2.52	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian.....	157
Tabel 2.53	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.....	159

Tabel 2.54.a	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	160
Tabel 2.54.b	
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020	161
Tabel 2.55	
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	162
Tabel 2.56	
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021	162
Tabel 2.57	
Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021	163
Tabel 2.58	
Populasi Ternak Tahun 2017-2021	163
Tabel 2.59	
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2017-2021.....	164
Tabel 2.60	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan	166
Tabel 2.61	
Lembaga Ekonomi Perdesaan	167
Tabel 2.62	
Pelatihan Teknologi Guna Tahun Tepat 2017-2021.....	167
Tabel 2.63	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata.....	169
Tabel 2.64	
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2017-2021	170
Tabel 2.65	
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	171
Tabel 2.66	
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2021	171

Tabel 2.67 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM	174
Tabel 2.68 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.....	176
Tabel 2.69 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal	177
Tabel 2.70 Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2017-2021	178
Tabel 2.71 Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2017-2021.....	179
Tabel 2.72 Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2017-2021	179
Tabel 2.73 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan	180
Tabel 2.74 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan.....	183
Tabel 2.75 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian.....	184
Tabel 2.76 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat	186
Tabel 2.77 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan	188
Tabel 2.78 Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2017-2021	188
Tabel 2.79 Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	189

Tabel 2.80 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman	190
Tabel 2.81 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang	192
Tabel 2.82 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	194
Tabel 2.83 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana	196
Tabel 2.84 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi	198
Tabel 2.85 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.....	200
Tabel 2.86 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	201
Tabel 2.87 Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2017-2021	202
Tabel 2.88 Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2017-2021	203
Tabel 2.89 Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum Tahun 2017-2021.....	204
Tabel 2.90 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	206
Tabel 2.91 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	206

Tabel 2.92	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten	
Periode 2017-2021	207
Tabel 2.93	
Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif	
dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021.....	208
Tabel 2.94	
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	
Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2017-2021	208
Tabel 2.95	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Kualitas Layanan Perhubungan	209
Tabel 2.96	
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten	
Tahun 2017-2021	210
Tabel 2.97	
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum	
di Kabupaten Klaten Tahun 2021	210
Tabel 2.98	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu,	
Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	212
Tabel 2.99	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	213
Tabel 2.100	
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021	214
Tabel 2.101	
Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir	
dan KTP Elektronik Tahun 2017-2021	214
Tabel 2.102	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Pengembangan Ketransmigrasian	215
Tabel 2.103	
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah	
Penempatan Tahun 2017-2021	216
Tabel 2.104	
Tingkat Efisiensi Sumber Daya.....	218
Tabel 2.105	
Efektifitas Sumber Daya.....	245
Tabel 2.106	
Efektifitas Sumber Daya.....	246

Tabel 2.107	
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja.....	253
Tabel 3.1	
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.....	306
Tabel 4.1	
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	317
Tabel 4.2	
Penghitungan pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	318
Tabel 4.3	
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	320
Tabel 4.4	
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	322
Tabel 4.5	
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	323
Tabel 4.6	
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021 di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten	323
Tabel 4.7	
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021.....	324
Tabel 4.8	
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	325
Tabel 4.9	
Penghitungan pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021	327
Tabel 4.10	
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	329
Tabel 4.11	
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	331
Tabel 4.12	
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	334
Tabel 4.13	
Jumlah Personil Berdasarkan Jenis Profesi di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021	335

Tabel 4.14	
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021	337
Tabel 4.15	
Penghitungan pembiayaan Mutu Target Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	337
Tabel 4.16	
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	338
Tabel 4.17	
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021	339
Tabel 4.18	
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021	340
Tabel 4.19	
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021	341
Tabel 4.20	
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021	341
Tabel 4.21	
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	342
Tabel 4.22	
Penghitungan pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	343
Tabel 4.23	
Realisasi SPM Bidang Perumahan rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	344
Tabel 4.24	
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	345
Tabel 4.25	
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	346
Tabel 4.26	
Dukungan Personil SPM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2021	347

Tabel 4.27	
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang	
Perumahan Rakyat	347
Tabel 4.28	
Rencana Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	349
Tabel 4.29	
Penghitungan pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar	
Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	349
Tabel 4.30	
Rencana Target Pencapaian SPM Badan Penanggulangan Bencana	
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021	350
Tabel 4.31	
Penghitungan pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	351
Tabel 4.32	
Realisasi Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	353
Tabel 4.33	
Realisasi Capaian Mutu pelayanan Dasar SPM	
Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	354
Tabel 4.34	
Realisasi Capaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	355
Tabel 4.35	
Realisasi Capaian Mutu pelayanan Dasar SPM	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	356
Tabel 4.36	
Alokasi Anggaran SPM Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	358
Tabel 4.37	
Alokasi Anggaran SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	358
Tabel 4.38	
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan	
pada Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	359
Tabel 4.39	
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan Kepegawaian	
pada Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Klaten Tahun 2021.....	359

Tabel 4.40	
Dukungan Personil SPM Lintas Perangkat Daerah.....	360
Tabel 4.41	
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Golongan dan Jenis Kelamin.....	360
Tabel 4.42	
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	360
Tabel 4.43	
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021	363
Tabel 4.44	
Penghitungan pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Klaten Tahun 2021	364
Tabel 4.45	
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021	370
Tabel 4.46	
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021	371
Tabel 4.47	
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021	380
Tabel 4.48	
Jumlah Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Berdasar Status Kepegawaian di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021	381
Tabel 4.49	
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2021 di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten.....	381
Tabel 4.50	
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021	382

**LAMPIRAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH (LPPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021**

- 1. LAMPIRAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021**
- 2. LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME DAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT LPPD TAHUN 2021**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pedjabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala *Corps* Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintahan Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan *medebewind*, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam *corps* Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris

pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" Lintang Selatan sampai 7°48'33" Lintang Selatan dan antara 110°26'14" Bujur Timur sampai 110°47'51" Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

2. Luas Wilayah

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15 % dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha).

3. Topografi Kabupaten Klaten

Secara umum, wilayah Kabupaten Klaten berada pada ketinggian 100 hingga >2000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 3,72% wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara ketinggian 0-100 mdpl, sebanyak 83,52% wilayahnya terletak di antara ketinggian 100-500 mdpl, dan sisanya sebanyak 12,76% terletak di antara ketinggian 500-2.500 mdpl. Ketinggian Kabupaten Klaten secara terperinci yaitu:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.

4. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Klaten tersusun oleh beberapa satuan batuan, yaitu : aluvium tua, aluvial, batuan malihan, diorite pendul, endapan Gunung Merapi tua, batuan formasi kebobutak, batuan formasi mandalika, batuan formasi semilir, batuan formasi wonosari, dan batuan formasi gamping wungkal.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2021 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 1.276.535 jiwa. Dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 635.508 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 641.027 jiwa. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Klaten bisa dilihat dalam Tabel 1.1

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan
Tahun 2021

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PRAMBANAN	25.581	25.918	51.499
2	GANTIWARNO	19.259	19.361	38.620
3	WEDI	25.886	26.182	52.068
4	BAYAT	31.821	31.720	63.541
5	CAWAS	28.473	29.096	57.569
6	TRUCUK	39.818	39.246	79.064
7	KEBONARUM	9.770	10.065	19.835
8	JOGONALAN	29.438	29.431	58.869
9	MANISRENGGO	21.305	21.713	43.018
10	KARANGNONGKO	18.249	18.624	36.873
11	CEPER	32.437	32.611	65.048
12	PEDAN	23.467	23.440	46.907
13	KARANGDOWO	21.531	21.955	43.486
14	JUWIRING	29.100	29.254	58.354
15	WONOSARI	31.274	31.542	62.816
16	DELANGGU	20.910	21.219	42.129
17	POLANHARJO	20.248	20.761	41.009
18	KARANGANOM	22.918	23.386	46.304
19	TULUNG	26.837	26.997	53.834
20	JATINOM	30.227	30.069	60.296
21	KEMALANG	19.664	19.815	39.479
22	NGAWEN	23.020	22.833	45.853
23	KALIKOTES	18.564	18.505	37.069
24	KLATEN UTARA	23.770	24.158	47.928
25	KLATEN TENGAH	20.222	20.924	41.146
26	KLATEN SELATAN	21.719	22.202	43.921
TOTAL		635.508	641.027	1.276.535

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2021

Berdasarkan kelompok umur penduduk di Kabupaten Klaten 68,84% didominasi oleh penduduk usia produktif yaitu antara umur 15 – 64 tahun yang mencapai 878.814 jiwa. Sedangkan 21,27% lainnya yaitu 271.615 jiwa merupakan penduduk usia non produktif dari usia 0-14 tahun dan 9,871% atau 126.106 jiwa adalah penduduk usia 65 tahun ke atas. Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten
Menurut Kelompok Umur Tahun 2021

Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah	%
0-4	40.941	38.312	79.253	6,21%
5-9	48.307	44.758	93.065	7,29%
10-14	50.833	48.464	99.297	7,78%
15-19	47.710	44.812	92.522	7,25%
20-24	47.434	44.977	92.411	7,24%
25-29	46.572	44.533	91.105	7,14%
30-34	42.929	41.815	84.744	6,64%
35-39	49.282	48.239	97.521	7,64%
40-44	48.783	47.589	96.372	7,55%
45-49	45.172	45.964	91.136	7,14%
50-54	41.732	44.381	86.113	6,75%
55-59	37.793	43.207	81.000	6,35%
60-64	31.201	34.689	65.890	5,16%
65-69	23.564	25.594	49.158	3,85%
70-74	14.482	17.431	31.913	2,5%
>= 75	18.773	26.262	45.035	3,53%
	635.508	641.027	1.276.535	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Klaten Tahun 2021

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Adapun Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan pada tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 1.3

Tabel 1.3
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten tahun 2021

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	Prambanan	16	-
2	Gantiwarno	16	-
3	Wedi	19	-
4	Bayat	18	-
5	Cawas	20	-
6	Trucuk	18	-
7	Kalikotes	7	-
8	Kebonarum	7	-
9	Jogonalan	18	-
10	Manisrenggo	16	-
11	Karangnongko	14	-
12	Ngawen	13	-
13	Ceper	18	-
14	Pedan	14	-
15	Karangdowo	19	-
16	Juwiring	19	-
17	Wonosari	18	-
18	Delanggu	16	-

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
19	Polanharjo	18	-
20	Karanganom	19	-
21	Tulung	18	-
22	Jatinom	17	1
23	Kemalang	13	-
24	Klaten Selatan	11	1
25	Klaten Tengah	3	6
26	Klaten Utara	6	2
	Jumlah	391	10

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten, Tahun 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 menggunakan dasar Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten mengamanatkan terbentuknya 23 (dua puluh tiga) perangkat daerah yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Komunikasi Informatika;
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
19. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sedangkan untuk 2 (dua) perangkat daerah lainnya diatur dengan Perda tersendiri yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas juga dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah sejumlah 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Prambanan;
2. Kecamatan Gantiwarno;
3. Kecamatan Wedi;
4. Kecamatan Bayat;
5. Kecamatan Cawas;
6. Kecamatan Trucuk;
7. Kecamatan Kebonarum;
8. Kecamatan Jogonalan;
9. Kecamatan Manisrenggo;
10. Kecamatan Karangnongko;
11. Kecamatan Ceper;
12. Kecamatan Pedan;
13. Kecamatan Karangdowo;
14. Kecamatan Juwiring;
15. Kecamatan Wonosari;
16. Kecamatan Delanggu;
17. Kecamatan Polanharjo;
18. Kecamatan Karanganom;
19. Kecamatan Tulung;
20. Kecamatan Jatinom;
21. Kecamatan Kemalang;
22. Kecamatan Ngawen;
23. Kecamatan Kalikotes;
24. Kecamatan Klaten Utara;
25. Kecamatan Klaten Tengah;
26. Kecamatan Klaten Selatan.

Dalam wilayah kecamatan dibentuk 10 (sepuluh) Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang meliputi :

1. Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom.
2. Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara;
3. Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara;
4. Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah;
5. Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah;

6. Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah;
7. Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah;
8. Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah;
9. Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
10. Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan;

Secara keseluruhan Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten sebanyak 8.863 PNS. Dengan rincian jumlah PNS laki-laki sebanyak 3.372 PNS dan jumlah PNS perempuan sebanyak 5.491 PNS. Rincian data PNS di Pemerintah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
Data PNS Pemerintah Kabupaten Klaten
menurut Unit Kerja Tahun 2021

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Sekretariat Daerah	147	88	59
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36	29	7
3	Satuan Polisi Pamong Praja	49	45	4
4	Inspektorat	54	30	24
5	Dinas Arsip dan Perpustakaan	31	13	18
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	33	14	19
7	Dinas Kesehatan	1512	301	1211
8	Dinas Komunikasi Informatika	24	17	7
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19	9	10
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	41	23	18
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	312	271	41
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	17	10
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18	12	6
14	Dinas Pendidikan	5387	1760	3627
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	132	102	30
16	Dinas Perhubungan	49	37	12
17	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	29	18	11
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	208	123	85
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	45	33	12
20	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	38	19	19
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	38	27	11
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18	13	5
23	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28	20	8

No	Unit Kerja	Jumlah	Jenis Kelamin	
			L	P
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	87	54	33
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	33	19	14
26	Kecamatan Bayat	14	8	6
27	Kecamatan Cawas	17	7	10
28	Kecamatan Ceper	17	11	6
29	Kecamatan Delanggu	14	9	5
30	Kecamatan Gantiwarno	15	9	6
31	Kecamatan Jatinom	16	10	6
32	Kecamatan Jogonalan	13	5	8
33	Kecamatan Juwiring	18	11	7
34	Kecamatan Kalikotes	18	11	7
35	Kecamatan Karangnom	13	7	6
36	Kecamatan Karangdowo	21	14	7
37	Kecamatan Karangnongko	19	13	6
38	Kecamatan Kebonarum	17	9	8
39	Kecamatan Kemalang	18	15	3
40	Kecamatan Klaten Selatan	17	7	10
41	Kecamatan Klaten Tengah	40	20	20
42	Kecamatan Klaten Utara	27	14	13
43	Kecamatan Manisrenggo	19	14	5
44	Kecamatan Ngawen	15	6	9
45	Kecamatan Pedan	13	9	4
46	Kecamatan Polanharjo	16	13	3
47	Kecamatan Prambanan	21	11	10
48	Kecamatan Trucuk	13	9	4
49	Kecamatan Tulung	19	13	6
50	Kecamatan Wedi	17	8	9
51	Kecamatan Wonosari	21	15	6
	TOTAL	8.863	3.372	5.491

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten tahun 2022

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021

Pada tahun 2021 Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten ditargetkan sebesar Rp2.532.484.633.385 dan realisasi pendapatan sebesar Rp2.570.037.777.373 Sehingga dari pendapatan tersebut terealisasi sebesar 101,48% dari target yang telah ditentukan. Adapun rincian target dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.5.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373	101,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	277.915.340.915	315.304.009.782	113,45
Pajak Daerah	115.200.000.000	126.672.231.091	109,96
Retribusi Daerah	12.352.582.000	14.405.348.660	116,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.974.459.182	16.409.075.267	126,47
Lain-lain PAD yang Sah	137.388.299.733	157.817.354.764	114,87
PENDAPATAN TRANSFER	2.130.432.992.470	2.131.117.520.091	100,03
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.919.548.317.470	1.923.414.170.983	100,20
Dana Perimbangan	1.527.971.822.470	1.531.837.675.983	100,25
Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000	10.729.894.000	100,00
Dana Desa	380.846.601.000	380.846.601.000	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	210.884.675.000	207.703.349.108	98,49
Pendapatan Bagi Hasil	193.321.675.000	206.950.349.108	107,05
Bantuan Keuangan	17.563.000.000	753.000.000	4,29
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	124.136.300.000	123.616.247.500	99,58
Pendapatan Hibah	14.540.000.000	15.627.000.000	107,48
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	109.596.300.000	107.989.247.500	98,53

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

2) Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.949.643.677.710,28 dan dapat direalisasikan Rp2.493.406.881.542 atau mencapai 84,53%, yang perinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.6
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542	84,53
BELANJA OPERASI	1.962.849.239.087,28	1.612.412.988.846	82,15
Belanja Pegawai	1.197.490.511.452	1.006.278.863.371	84,03
Belanja Barang dan Jasa	721.795.055.287,28	570.241.936.649	79,00
Belanja Subsidi	3.000.000.000	1.940.554.067	64,69
Belanja Hibah	32.611.021.500	28.410.769.759	87,12
Belanja Bantuan Sosial	7.952.650.848	5.540.865.000	69,67

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
BELANJA MODAL	238.674.307.650	189.606.772.936	79,44
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.843.880.861	68.901.715.247	78,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.655.759.427	66.197.965.314	89,87
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.877.758.078	48.969.127.000	69,09
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.296.909.284	5.537.965.375	87,95
BELANJA TIDAK TERDUGA	72.557.615.273	18.618.661.003	25,66
Belanja Tidak Terduga	72.557.615.273	18.618.661.003	25,66
BELANJA TRANSFER	675.562.515.700	672.768.458.757	99,59
Belanja Bagi Hasil	19.055.869.600	16.428.812.657	86,21
Belanja Bantuan Keuangan	656.506.646.100	656.339.646.100	99,97

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

3) Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021

Total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA tahun 2021 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.7
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.532.484.633.385	2.570.037.777.373	101,48
BELANJA DAERAH	2.949.643.677.710,28	2.493.406.881.542	84,53
SURPLUS / (DEFISIT)	- 417.159.044.325,28	76.630.895.831	(18,37)
PEMBIAYAAN DAERAH			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	440.659.044.325,28	440.589.680.010,28	99,98
Pencairan Dana Cadangan	-	-	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	23.500.000.000	23.500.000.000	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	100,00
Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000	8.500.000.000	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	417.159.044.325,28	417.089.680.010,28	99,98
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	493.720.575.841,28	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten Tahun 2022 (data per tanggal 1 Maret 2022)

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten, Seiring dengan penambahan penduduk dan dinamika perkembangan jaman yang cepat maka secara umum Kabupaten Klaten menghadapi permasalahan daerah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata dan penanganannya direncanakan harus dengan baik, sistematis, terukur dan berlanjut;
2. Peningkatan jumlah penduduk dengan dinamika di dalamnya mempengaruhi struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sehingga pengendalian ruang tidak semudah yang direncanakan dalam tata ruang;
3. Perubahan peruntukan pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian untuk keberlangsungan budidaya manusia khususnya perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari padahal luas lahan tetap;
4. Luasan lahan pertanian abadi tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga salah satu dampaknya kontribusi sektor Pertanian dalam struktur PDRB sudah tidak lagi menjadi penyumbang yang terbesar padahal Kabupaten Klaten dikenal dengan kesuburan tanah dan perannya sebagai salah satu penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C (pasir , kerikil dan batu) di sepanjang aliran Sungai Woro apalagi yang tidak berijin dan lokasinya di luar zona yang ditentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 yang masuk wilayah kawasan Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko menjadi tumpuan penghidupan ribuan masyarakat sejak puluhan tahun lalu semakin kompleks dinamikanya dan hasil penambangan tersebut berdampak rusaknya infrastruktur jalan jembatan yang dilalui padahal secara umum seharusnya Wilayah Kecamatan Kemalang menjadi kawasan tangkapan/serapan air bagi wilayah Kabupaten Klaten;
6. Kontribusi/proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur APBD masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
7. Mengingat letak wilayah Kabupaten Klaten relatif di tengah Pulau Jawa maka potensi kerawanan terjadinya bencana alam gempa bumi tektonik dan letusan Gunung Merapi cukup besar selain

bencana tanah longsor, angin topan, banjir dan kekeringan yang terjadi hampir selalu terjadi setiap tahun sehingga Wilayah Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai “laboratorium bencana alam”;

8. Terjadinya kesenjangan (disparitas) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat Perda Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/stagnan. Hal ini untuk wilayah utara (Wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung) boleh jadi salah satunya disebabkan letaknya berdekatan dengan Gunung Merapi dan untuk wilayah selatan (Kecamatan Cawas, Bayat, Gantiwarno dan Prambanan) boleh jadi disebabkan potensi kegempaan yang berada pada tingkat menengah sehingga tanahnya labil yang berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan;
9. Pertumbuhan investasi/penanaman modal di Wilayah Kabupaten Klaten tidak sebesar yang masuk ke kabupaten tetangga kawasan “SUBOSUKAWONOSRATEN“ (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar, Wonogiri dan Sragen).

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
- 3. Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Untuk pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan Kepala Daerah, diuraikan di dalam tujuan, sasaran dan strategi kebijakan pelaksanaannya. Masing-masing misi ketercapaiannya diterjemahkan kedalam berbagai tujuan yang dirinci kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bisa tercapai ditetapkan strategi pencapaiannya. Secara keseluruhan tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian misi tertuang didalam tabel 1.8

TABEL 1.8
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KABUPATEN KLATEN

VISI : Maju Mandiri dan Berdaya Saing

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
I.	Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya		
	1 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat wajib belajar sembilan tahun dengan memperhatikan pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mencapai kualitas pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama) sesuai Standar Nasional Pendidikan
	2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	a. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan b. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Memberikan pelayanan kesehatan sesuai syarat Standar Pelayanan Minimal untuk menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka kematian balita yang akan meningkatkan usia harapan hidup masyarakat
	3. Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	a. Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anak terlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial
	4. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk	a. Menurunnya angka kelahiran (Total Fertility Rate)	Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan melalui KIE sehingga memperkecil angka kelahiran dan peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB)
	5 Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya	a. Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	Memberikan pembinaan dan pemenuhan sarana prasarana olahraga bagi pemuda untuk peningkatan prestasi pemuda

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	Melibatkan masyarakat didalam penyelenggaraan event-event seni dan budaya di daerah serta pelestarian benda, situs dan cagar budaya
	6. Meningkatkan minat baca masyarakat	a. Meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Mengembangkan budaya baca bagi masyarakat melalui pembinaan pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung perpustakaan
II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		
	1. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah daerah	a. Meningkatkan profesionalisme aparaturnya pemerintah daerah	Melakukan pembinaan kompetensi ASN, menegakan kedisiplinan, dan pemberian kompensasi
		b. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah	Melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel serta mengoptimalkan inventarisasi aset daerah.
		c. Meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Menjamin fasilitasi lembaga legislasi daerah agar bisa menjalankan fungsinya secara optimal
		d. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyediaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan dan potensi yang ada.
	2. Meningkatkan pengelolaan dan penataan arsip daerah	a. Meningkatkan tata kelola arsip Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan penataan dan pengelolaan arsip sesuai standar kearsipan.
	3. Meningkatkan tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Melakukan pembinaan sumberdaya aparaturnya pemerintahan desa dan mendorong pelaksanaan tata kelola administrasi desa yang sesuai ketentuan
	4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengoptimalkan fungsi lembaga pengawasan untuk menjamin terlaksananya reformasi birokrasi di pemerintahan kabupaten Klaten

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah	Penyelenggaraan pemerintahan secara transparan dan akuntabel, memperluas kerjasama, memastikan batas wilayah, pelaksanaan pemerintah kecamatan yang berkualitas, dan memperluas cakupan layanan telekomunikasi, serta penyediaan data statistik daerah
		c. Meningkatkan koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Melakukan penataan pengelolaan pembentukan peraturan-peraturan daerah sesuai dengan yang direncanakan
		d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan	Melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi atau kesenjangan antara target dan relaisasi pembangunan
		e. Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Melakukan pelaksanaan penyediaan barang dan jasa secara elektronik
		f. Meningkatkan fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Memberikan pesan dan informasi kepala daerah yang akurat ke masyarakat melalui media dan fasilitasi keprotokolan kepala daerah
		g. Meningkatkan fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	Melakukan koordinasi pelaksanaan bidang sumberdaya alam, pengembangan ekonomi dan usaha daerah
		h. Meningkatkan koordinasi kesejahteraan rakyat	Meningkatkan kerukunan intern dan antar umat beragama
III.	Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal		
	1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatkan ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Menjamin ketersediaan bahan pangan dan perbaikan mutu konsumsi pangan
			Melakukan pembinaan dan fasilitasi didalam proses produksi komoditas unggulan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan
			Meningkatkan pemantauan bidang pertanian

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat pedesaan didalam menerapkan teknologi tepat guna dan fasilitasi terbentuknya BUMDes
	3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Melakukan pengembangan kemitraan dan peningkatan kualitas dan kuantitas pemasaran destinasi wisata serta meningkatkan daya tarik obyek wisata
		b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Pengembangan keunggulan kompetitif dan satuan pendukung sektor usaha kecil menengah (UKM), pembinaan kelembagaan UKM dan pedagang kaki lima, serta memberikan perlindungan konsumen
		c. Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Mendorong tumbuhnya inovator-inovator di masyarakat dan penerapan hasil litbang/inovasi yang mendukung pengembangan ekonomi daerah
		d. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Peningkatan promosi potensi usaha di kabupaten Klaten untuk meningkatkan jumlah investor dan nilai investasi
	4. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	Fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja serta fasilitasi dan informasi kebutuhan tenaga kerja
		b. Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Penyelesaian terhadap sengketa dan permasalahan antara tenaga kerja dan pengusaha
	5. Meningkatkan daya saing produk industri daerah	a. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Mengembangkan kemampuan teknologi industri bagi industri kecil menengah untuk mendapatkan ISO dan SNI serta standar produk manufaktur dan SVLK untuk IKM meubel
IV.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat		

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum jalan, jembatan, irigasi dan bangunan gedung pemerintah serta peningkatan pengelolaan persampahan
		b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan yang memadai dan kelengkapan keselamatan jalan di ruas jalan kabupaten Klaten
		c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Penyediaan layanan kebutuhan air bersih, sanitasi, penerangan jalan bagi perumahan dan permukiman serta meningkatkan pembangunan rumah tidak layak huni
V.	Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah		
	1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Melakukan perencanaan dan pengendalian penggunaan lahan sesuai konsep tata ruang serta memperbaiki pengelolaan ruang terbuka hijau
		b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Memperluas cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL oleh investor dengan melibatkan masyarakat terdampak dan memperluas cakupan pemantauan kualitas udara dan air
	2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Melakukan fasilitasi dan pembinaan untuk menjadi desa tangguh bencana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas relawan yang terlatih tanggap bencana
VI.	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian		
	1. Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	a. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Memberikan wawasan kebangsaan untuk mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berpolitik dan sosial

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	a. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Memberikan fasilitasi kedesa-desa dibidang sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan agar lebih aktif menjaga pelestarian adat dan budaya
	3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Memberikan rasa ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperluas cakupan perlindungan, pelayanan bencana kebakaran, dan mempersingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran, serta penegakan perda dan perkara konsistn
VII.	Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak		
	1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	a. Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Memberikan pembinaan Kelembagaan Pengarusatamaan Gender (PUG) dan Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) agar lebih kuat, mendorong peran serta perempuan didalam pembangunan dan memberikan perlindungan dan hak terhadap perempuan dan anak
VIII.	Meningkatkan kapasitas pelayanan publik		
	1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat	a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Memberikan pelayanan yang selalu ditingkatkan kualitasnya untuk memenuhi standar pelayanan minimal di bidang layanan perhubungan, perijinan investasi, dan administrasi kependudukan
		b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	
		c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	
	2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	a. Pengembangan ketransmigrasian	Memberikan pemahaman dan pengertian tentang ketransmigrasian serta melakukan pengembangan lokasi atau wilayah penempatan transmigrasi

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021. Pada tahun 2021 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, maka ditetapkan pula Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu: “**Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**”. Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021.

Makna yang terkandung dalam visi Pembangunan Daerah sebagai berikut: **Kabupaten Klaten**, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. **Maju**, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan

pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupun non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab, dan Anti Korupsi;
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
3. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
4. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
5. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

Strategi Pembangunan Daerah untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi. Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkeadilan dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas). Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat;
- b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas;
- c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi. Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

(Good and Clean Governance), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru;
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko;
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah;
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang Smart City;
- h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi;
- i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten;
- j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian;
- k. Meningkatkan ASN yang berkualitas;
- l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan;
- p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah;
- q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan.

Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan

2) Meningkatnya investasi daerah.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan;
- c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing;
- d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City;
- e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian;
- f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan;
- g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah. Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pembangunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
- 2) Meningkatnya capaian universal access (100-0- 100)
- 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah;
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian;
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat;
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih;
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis;
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh;

- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender. Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing;
- 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan;
- c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat;
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga;
- e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat;
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana;
- h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes;
- j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja;
- k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah;
- l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan.

6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan,

- 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
- 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

c. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja berdasarkan RPJMD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja yang tersaji dalam Tabel 1.9 dibawah ini.

Tabel 1.9

TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya												
1.	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah		tahun	12,84	12,85	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	
		Angka rata-rata lama sekolah		tahun	8,16	8,22	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	
a.	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00	
		2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	
2.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup		Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	
a.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	1	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14	
		2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69	10,15	10,13	10,11	10,09	10,07	
		3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61	
		4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7	
b.	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahira (Total Fertility Rate) / TFR			2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
c.	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit		Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62
3.	Menurunkan tingkat kemiskinan		Prosentase penduduk miskin	%	14,89	14,46	14,15	14,12	14,10	14,05	14,00	14,00
a.	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89	89
		2	persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92	94	96	97	99	100	100
		3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	13	12,9	12,9
4.	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,1	1,07	1,05	1,03	1,01	0,98	0,96	0,96
a.	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)		Angka Kelahira (Total Fertility Rate) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
5.	Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya		Rasio aset budaya tersertifikasi	%	7/92	8/92	9/92	10/92	11/92	12/92	13/92	13/92
			Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	36	38	41	44	46	47	48	48
a.	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10	10	10	10	10	10	60
		2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	5	5	5	5	5	30

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
b.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	6	6	6	6	6	36
		2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10	10	10	10	10	10	10
6.	Meningkatkan minat baca masyarakat	Index Kepuasan Masyarakat		Index	65	65	65	65	70	70	70	70
a.	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan		Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4	5	5	5	5	5	5
II. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih												
1.	Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN			0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
		Indeks kapasitas fiskal daerah		Indeks	0,08	0,18	1,28	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
		Prosentase SDM yang memiliki kualifikasi perencanaan		%	50,98	50,98	54,90	58,82	62,75	66,67	70,59	70,59
a.	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah		Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36
b.	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
c.	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD		Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70	70	85	85	90	90	85

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
d.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah		Index Kepuasan Masyarakat	index	65	65	65	65	70	70	70	70
a.	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD		Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	5	5	5	5	5	5	25
3.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa		Prosentase pemerintah desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan	%	20%	27%	33%	40%	47%	53%	60%	60%
a.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel		Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%	100%
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel		Opini BPK									
a.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1	Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3	3
2		Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2	2	3	3	3	3	3
3		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)	70 (BB)	70 (BB)
b.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,1

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
c.	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	80	80	100	85	90	90	90	90
		2	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	70	75	80	80	80	80
d.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan		Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	80	85	88	90	90	90	90	90
e.	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel		Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0		100	100	100	100	100	100
f.	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90	92	94	96	98	100	100
		2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90	92	94	96	98	100	100
		3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	125	100	92	94	96	98	100	100
g.	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian		Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)
h.	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	90	90	95	95	95	95

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Meningkatkan & mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif & berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal										
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43
a. Meningkatkan ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6	12,6
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	13%	19%	23%	26%	33%	41%	45%	45%
a. Meningkatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%	27%	35%	42%	50%	58%	58%
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410	21.410	22.460	23.560	24.720	24.720	24.720		
a.	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25	130		
b.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38	19,38
		2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	5	5	7	9	11	13	15	15
c.	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	%	31,82	45,45	63,64	72,73	81,82	86,36	100,00	100,00		
d.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	1	Rasio daya serap tenaga kerja									
		2	PMDN		189	238	397	417	438	460	483	2.433
		3	PMA		46	294	294	294	294	294	294	1.764
		4	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)									
		a	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50	12,74
		b	PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55	14,70
4.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		Tingkat pengangguran terbuka	%	2,51	3,94	4,35	4,30	4,25	4,20	4,15	4,15
a.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	1	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08	1,08
		2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69	69

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
b.	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00	87,30	87,60	87,90	88,20	88,20	88,20
5.	Meningkatnya daya saing produk industri daerah		Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,63
a.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2	35,2
		2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	7,50	7,50
IV. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat												
1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat												
a.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat		indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81	40,81
b.	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan		Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92	40,76	45,87	47,41	57,52	57,52	57,52
c.	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman		Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman	indek	57,71	61,61	65,50	70,01	73,75	74,05	74,40	94,40

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
V. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah											
1.	Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indek	36,46	41,35	46,24	51,13	56,03	58,47	60,92	60,92
a.	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	78,94	78,98	79,20	79,60	80,00	80,00
b.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46	40,46
		Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46	84,46
		Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03	43,93	48,82	53,71	56,16	58,60	58,60
2.	Mewujudkan pengurangan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Indeks		123	122	121	120	119	119	119
a.	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang
VI. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian											
1.	Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
a.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5%	5%	13%	23%	40%	70%	100%	100%
a. Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%	33%	49%	66%	83%	100%	100%
3. Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
a. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
VII. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak										
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	indeks	96,42	96,47	96,52	96,57	96,62	96,67	96,72	96,72
a. Meningkatkan kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1 Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	60,37
	2 Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya	madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik												
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat												
a.	Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan		Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078	81,078
b.	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat		Nilai survey kepuasan masyarakat	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00	80,00
c.	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas		Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh
2.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi		Persentase partisipasi masyarakat mengikuti program transmigrasi	%	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,20
a.	Pengembangan ketransmigrasian		Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00

d. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Daerah Tahun 2021

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada tahun berkenaan, serta RKPD 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagaimana Tabel 1.10

Tabel 1.10
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	98,5
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	12
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,01
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,59
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakititan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,71
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	13
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	10
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	10
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	53
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70(BB)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	58
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	483
			PMA	%	294
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	2,5
PMA	%	2,55			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	85
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	42,2
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	74,4
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	40,46
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	88,46
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	83,3
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	80
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	83
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	100
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,37
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	81,00
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survy Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh puas (92,7)
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	7

e. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelaksana Urusan Pendidikan
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
3	Pendidikan Non Formal	
4	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
5	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
6	Manajemen Pelayanan Pendidikan	
7	Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelaksana Urusan Kesehatan
8	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
9	Obat dan Perbekalan Kesehatan	
10	Pengawasan Obat dan Makanan	
11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
12	Perbaikan Gizi Masyarakat	
13	Pengembangan Lingkungan Sehat	
14	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
15	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
16	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
17	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	
18	Program Pelayanan Kesehatan	

NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
19	Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pelaksana Urusan Sosial
20	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
21	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
22	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
23	Keluarga berencana	Pelaksana Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
24	Kesehatan Reproduksi Remaja	
25	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang Mandiri	
26	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Pelaksana Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
28	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pelaksana Urusan Kebudayaan
29	Pengembangan Nilai Budaya	
30	Pengelolaan Keragaman Budaya	
31	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pelaksana Urusan Perpustakaan
32	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Pelaksana Urusan Kepegawaian
33	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
34	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksana Urusan Keuangan
		Pelaksana Urusan Perdagangan
35	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Pelaksana Urusan Penunjang Kesekretariatan Dewan
36	Perencanaan pembangunan daerah	Pelaksana Urusan Perencanaan
37	Perencanaan pembangunan ekonomi	
38	Perencanaan sosial dan budaya	
39	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
40	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
41	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pelaksana Urusan Bidang Kearsipan
42	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	
43	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
44	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	
45	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Pelaksana Urusan Pengawasan
46	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	
47	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	
48	Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	
49	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Sekretariat Daerah
50	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	

NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
51	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
52	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Pelaksana Urusan Statistik
53	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	Kecamatan
54	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	
55	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	
56	Penataan peraturan perundang undangan	Sekretariat Daerah
57	Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM	
58	Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	
59	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	
60	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Sekretariat Daerah
61	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sekretariat Daerah
62	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pelaksana Urusan Pangan
63	Peningkatan Ketahanan Pangan	Pelaksana Urusan Pertanian
64	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	
65	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
66	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	
67	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
68	Pengembangan Kemitraan	Pelaksana Urusan Pariwisata
69	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	
70	Pengembangan Destinasi Pariwisata	
71	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pelaksana Urusan Koperasi Dan Unit Usaha Menengah
72	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	
73	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
74	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pelaksana Urusan Perdagangan
75	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	
76	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	
77	Penelitian dan pengembangan	Pelaksana Urusan Penelitian Dan Pengembangan
78	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Pelaksana Urusan Penanaman Modal
79	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksana Urusan Ketenaga Kerjaan
80	Peningkatan Kesempatan Kerja	
81	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	

NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
82	Pengembangan industri kecil dan menengah	Pelaksana Urusan Perindustrian
83	Peningkatan kemampuan teknologi industri	
84	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
85	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	
86	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Pelaksana Urusan Perhubungan
87	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
88	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
89	Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Pelaksana Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
90	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	
91	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
92	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	
93	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Pelaksana Urusan Lingkungan Hidup
94	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	
95	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
96	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pelaksana Penanggulangan Dan Penanganan Kebencanaan
97	Penanganan Darurat Bencana	
98	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
99	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Pelaksana Urusan Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
100	Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	
101	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksana Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
102	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	
103	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	
104	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
105	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
106	Penanganan Darurat Bencana	
107	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pelaksana Bidang Pangarasutamaan Gender Dan Perlindungan Anak
108	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
109	Peningkatan pelayanan angkutan	Pelaksana Urusan Perhubungan
110	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	Pelaksana Urusan Penanaman Modal
111	Penataan administrasi kependudukan	Pelaksana Urusan Administarsi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
112	Pengembangan wilayah transmigrasi	Pelaksana Urusan Transmigrasi
113	Transmigrasi lokal	

Nama Program yang dilaksanakan Perangkat pada tahun 2021 berbeda dengan nama program dalam dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dikarenakan nama Program pada tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 adalah sebagai ***terlampir di Lampiran LPPD Tahun 2021.***

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

a. Latar Belakang

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara sekaligus wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yaitu bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan bidang sosial namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dasar pada urusan wajib yang berpedoman pada SPM dengan memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar. Prioritas diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan pelayanan dasar pada urusan wajib, Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen dengan menerbitkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten. Dengan adanya Pedoman Penerapan SPM di Kabupaten Klaten diharapkan adanya kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam Penerapan SPM oleh Perangkat Daerah serta terwujudnya efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Bupati Klaten mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di Kabupaten Klaten dengan membentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 102.1.1/293 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan SPM di Kabupaten Klaten. SPM merupakan kolaborasi dari berbagai sisi sehingga keanggotaan Tim Penerapan SPM terdiri dari berbagai unsur yang diharapkan dapat bersinergi untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten.

Pandemi *Corona Virus Disease - 19 (Covid-19)* yang dialami sejak tahun 2020 masih berlanjut di tahun 2021. Wabah Covid-19 diumumkan oleh WHO secara resmi sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai target SPM masih tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembatasan tatap muka, sasaran layanan yang cenderung turun mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan karena kekhawatiran tertular, selain dukungan dana yang juga turun karena adanya *refocussing*. Penerapannya membutuhkan motivasi, tenaga dan sumber biaya yang cukup, sementara itu realokasi dan *refocussing* program atau kegiatan masih difokuskan dalam pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease- 19 (Covid-19)*.

Upaya Pemerintah dalam menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan penanganan pandemi dan pemenuhan pelayanan kesehatan dasar/esensial sekaligus menyelesaikan permasalahan kesehatan, masih terus dilakukan. Pemerintah berusaha mengendalikan penularan penyakit Covid-19, di sisi lain juga mengejar pencapaian target vaksinasi Covid-19 bagi

masyarakat mulai usia 12 tahun sampai lansia. Sementara itu pelayanan kesehatan esensial terus diupayakan agar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Program dan kegiatan terkait koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi penerapan SPM pun harus tetap dilaksanakan, metode yang digunakan menyesuaikan pada masa adaptasi kebiasaan baru, yaitu dengan model pembelajaran yang menggunakan system online/daring menggunakan aplikasi, diantaranya *google classroom*, *zoom meeting*, dirasakan amat membantu pada masa adaptasi kebiasaan baru saat ini. Dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi apapun pelayanan dasar wajib di Kabupaten Klaten yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus tetap dilaksanakan.

Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.

b. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Bupati Klaten Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten;
21. Keputusan Bupati Klaten Nomor 102.1.1/293 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Klaten.

c. Kebijakan Umum

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, menyebutkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Klaten yaitu **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. **Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.

3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Muatan Standar Pelayanan Minimal telah terintegrasi ke dalam Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Klaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan 6 (enam) bidang urusan, baik dalam rencana penerapan maupun capaian SPM. Berikut ini tabel program/kegiatan untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah terintegrasi di dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021.

Tabel 1.12
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2021

MISI KE- 1	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Pengelolaan Pendidikan	Jumlah anak usia 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	44.244 anak
				APK Paud	93,19

				APK SD/MI	98,25
				APK SMP/MTS /paket B	91,73
				APM SD/MI/paket A	87,64
				APM SMP/MTS/ paket B	69,02
				Angka melanjutkan dari SMP/MTS ke SMA/SMK /MA	89,08
				Angka putus sekolah SD/MI	0,01
				Angka putus sekolah SMP/MTS	0,03
				Angka kelulusan SD/MI	99,07
				Angka kelulusan SMP/MTS	98,19
				Penduduk yang berusia lebih dari 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,75
			Pengelolaan pendidik dan Tenaga kependidikan	Prosentase guru yang memenuhi S1/D4	89
				Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	99,07
				Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTS berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	94,35

				Rasio guru terhadap murid jenjang SD/MI	1:15
				Rasio guru terhadap murid jenjang SMP/MTS	1:15

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Tabel 1.13
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan
SPM Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021

MISI KE- 1	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil	100
				Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN3)	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	99
				Cakupan Skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	100
				Cakupan Skrining Kesehatan Sesuai Standar pada usia produktif (15-59 tahun)	100

				Cakupan Skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>=60 tahun)	100
				Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC	100
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100
				Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	100
				Cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	100
				Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Tabel 1.14

Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

MISI ke-4	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat	Meningkatkan pemenuhan infratsruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan air minum	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	97,13

			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah	Prosentase layanan air limbah	98,12
--	--	--	--	-------------------------------	-------

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Tabel 1.15
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

MISI ke-4	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar sosial masyarakat	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Meningkatnya kualitas perumahan dan Kawasan permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase rumah layak huni	100
			Program Kawasan Permukiman	Prosentase rumah layak huni	100

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Tabel 1.16
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

MISI KE-6	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)
Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian	Menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	100
				Presentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	92,25

			Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100
MISI KE-5	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (%)
Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah	Mewujudkan pengurangan resiko bencana	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Penanggulangan bencana	Jumlah desa tangguh bencana	2 desa
				Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	225 orang
				Sekolah siaga bencana	15 sekolah
				Sekolah sungai	3 komunitas
				Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
				Persentase korban bencana skala kabupaten/ kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100

				Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100
--	--	--	--	--	-----

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Tabel 1.17
Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Sosial Tahun 2021

MISI KE- 1	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROG. (%)
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya	Meningkatkan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi PMKS	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Anak Terlantar, dan Lanjut Usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	32
			Program Penanganan Bencana	Prosentase difabel, trauma dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	30

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

d. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021 diarahkan untuk “Mempercepat Pemulihan Ekonomi untuk Mewujudkan Daya Saing Daerah Berbasis Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Penekanan “Pemulihan Ekonomi” mengandung makna bahwa kemampuan daerah dalam mengembalikan perekonomian daerah yang terkontraksi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi di Tahun 2020. “Daya Saing Daerah” yang diharapkan fokus pada peningkatan kemampuan daerah dibanding daerah lain dalam menentukan strategi dengan mempertimbangkan faktor input (sumber daya) dan output (kinerja) yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan “berbasis” mengandung makna “berdasarkan pada” dengan melihat aspek sumber daya yang ada menjadi dukungan utama. Kemudian penekanan pada “Sumber Daya Manusia Berkualitas” berorientasi pada kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang mampu

menciptakan kreasi/ide baru dalam konteks pembangunan daerah di semua sektor.

Arah kebijakan tahun 2021 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal meliputi :

1. Bidang Urusan Pendidikan :

Arah kebijakan tahun 2021 yang menjadi prioritas Kabupaten Klaten diarahkan pada Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Sedangkan program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang pendidikan meliputi :

- a. Program Pengelolaan Pendidikan, yang diarahkan pada pengelolaan pendidikan sekolah dasar, pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan.
- b. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal

Tabel 1.18
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Pemerataan kualitas pendidikan Pemerataan kualitas pendidikan	Prosentase SD yang memenuhi standar nasional pendidikan	Menjamin pemenuhan SPM pendidikan dasar	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan usia dini, dasar dan menengah menuju wajar dikdas 12 tahun
	Prosentase SMP yang memenuhi standar nasional pendidikan		Meningkatkan kapasitas dan pemerataan pendidik PAUD

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan Tabel 1.18 di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Pendidikan untuk menerapkan dan mencapai target SPM Bidang Pendidikan yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2021

dan telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA 2021 untuk Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp157.394.126.000 dan Program Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp33.526.430.000

2. Bidang Urusan Kesehatan :

Arah kebijakan bidang kesehatan tahun 2021 yang menjadi prioritas Kabupaten Klaten diarahkan pada peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa; monitoring dan evaluasi penerapan Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu dan Anak; Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar; optimalisasi skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur; Optimasilasasi Pelaksanaan Posbindu; Fasilitasi pembentukan Posyandu Lansia; Peningkatan skrining, promotif, preventif dan pelayanan kuratif penderita hipertensi dan diabetes melitus; Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita gangguan jiwa berat; Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader TB serta penerapan Perda HIV. Program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah berkewajiban menjamin kesehatan masyarakat dalam bentuk penyediaan layanan kesehatan dan menjamin pembiayaan asuransi kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Rincian program prioritas pelayanan kesehatan dalam pemenuhan SPM meliputi:

- a. Upaya kesehatan masyarakat
- b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Integrasi antara SPM bidang kesehatan dengan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 1.19 berikut.

Tabel 1.19
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Pelayanan Kesehatan	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa
			Monitoring dan evaluasi Penerapan Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu dan Anak

	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan pada balita	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa
			Monitoring dan evaluasi Penerapan Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu dan Anak
	Kasus Kematian Ibu	Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa
			Monitoring dan evaluasi Penerapan Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu dan Anak
		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada Ibu Bersalin	Peningkatan kapasitas bidan dan bidan desa
			Monitoring dan evaluasi Penerapan Peraturan Bupati tentang Kesehatan Ibu dan Anak
	Indeks Keluarga Sehat	Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Penjaringan Kesehatan/skrining anak usia pendidikan dasar
		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Optimalisasi Skrining kesehatan pada usia 15-59 tahun terutama Wanita Usia Subur
			Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu
		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Fasilitasi pembentukan Posyandu lansia
		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi	Peningkatan skrining, promotif, preventif dan pelayanan kuratif penderita hipertensi
			Optimalisasi Pelaksanaan Posbindu

		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada penderita diabetes melitus	Peningkatan skrining, promotif, preventif dan pelayanan kuratif penderita DM
			Optimasilasi Pelaksanaan Posbindu
		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	Peningkatan skrining dan pelayanan optimal penderita gangguan jiwa berat
		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada orang terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Penderita dengan DOTS dan pemberdayaan kader TB
		Menjamin pemenuhan pelayanan Kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV	Penerapan Perda HIV

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Tabel 1.20
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Penanganan infrastruktur	Persentase layanan air minum atau air bersih	Menjamin terpenuhinya pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat
	Persentase layanan air limbah	Menjamin terpenuhinya penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Meningkatkan sarana prasarana air bersih dan air limbah berbasis masyarakat

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2021, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp4.461.094.254,- sedangkan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar Rp2.862.146.000,-

4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat :

Tabel 1.21
Integrasi SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2021

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase Rumah Layak Huni	Menjamin terpenuhinya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum bagi masyarakat

Sumber : Dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2021, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program pengembangan perumahan dengan pagu indikatif Tahun 2021 sebesar Rp2.098.250.000,- .

5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat:

Tabel 1.22

Integrasi SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Ke Dalam Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Klaten Tahun 2021

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Kelestarian lingkungan hidup dan konsistensi tata ruang	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Menjamin pemenuhan ketentraman dan ketertiban umum	1. Sosialisasi mengenai pentingnya hidup tertib dan tentram di wilayah yang rawan konflik
	Persentase penegakan Perda		2. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum kepada masyarakat
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten Klaten	Menjamin pemenuhan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		
Kelestarian lingkungan hidup dan konsistensi tata ruang	Jumlah desa tangguh bencana	Menjamin pemenuhan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan kapasitas dan menekan kerentanan di kawasan rawan bencana
	Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana		Mengembangkan pengurangan resiko bencana berbasis masyarakat dan desa tangguh bencana
	Sekolah siaga bencana	Menjamin pemenuhan Informasi rawan bencana	Meningkatkan tata Kelola dan kelembagaan dalam pengurangan resiko bencana
	Sekolah sungai		
	Persentase korban bencana skala	Menjamin pemenuhan Penyelamatan	

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
	kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	dan evakuasi korban bencana	
	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Menjamin pemenuhan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	
	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana		

Sumber : Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menerapkan dan mencapai target SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, selain telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di Tahun 2021, juga telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum Rp2.816.256.000,-, Program Penanggulangan Kebakaran dengan pagu Rp840.917.000,-. Program Penaggulangan Bencana dengan pagu indikatif Tahun 2021 sebesar Rp2.622.139.400,-

6. Bidang Urusan Sosial:

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Klaten lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan.

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2021 untuk Bidang Urusan Sosial, prioritas daerah diarahkan :

1. Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2. Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

3. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).

Arah kebijakan tahun 2021 yang menjadi prioritas pembangunan untuk Urusan wajib Pelayanan dasar, khususnya yang terkait dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial yang menjadi Proritas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten adalah Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,

Sedangkan program prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar SPM Urusan Sosial meliputi :

- a. Program Rehabilitasi Sosial, yang diarahkan pada Prosentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di Luar Panti dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat Layanan Rehabilitasi Sosial;
- b. Program Penanganan Bencana, yang diarahkan pada Prosentase korban bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan penanganan.

Berikut ini tabel arah kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021 yang telah terintegrasi dengan Standar Pelayanan Minimal:

Tabel 1.23
Integrasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Urusan Sosial Ke Dalam Arah Kebijakan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja Utama	Strategi Penerapan SPM	Arah Kebijakan
Kemiskinan dan Pengangguran	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	Persentase penguatan kapasitas PSKS	Penyelenggaraan pemberdayaan sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) guna meningkatkan peran dalam melaksanakan Usaha	Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

		kesejahteraan sosial	
	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Penyelenggaraan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
	Persentase Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Sumber : Dokumen Renstra Dissosp3akb Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021

Berdasarkan Tabel 1.23 di atas menggambarkan bahwa orientasi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten untuk menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial yang telah ditentukan menjadi arah kebijakan yang ditetapkan di tahun 2021. Selain itu juga, penerapan dan pencapaian SPM Urusan Sosial telah dituangkan di dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Besaran anggaran yang tertuang di dalam KUA untuk Program Rehabilitasi Sosial dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp1.869.742.564,- sedangkan Program Penanganan Bencana dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp763.730.000,-

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klaten Tahun 2021 menggunakan indikator kinerja makro sebagaimana Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan 2021 beserta Persentase Perubahannya

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Th. 2020	Capaian Kinerja Th. 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,56	76,12	0,74
2	Angka Kemiskinan	12,89	13,49	4,65
3	Angka Pengangguran	5,46	5,48	0,36
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,18	3,82	423,72
5	Pendapatan Per Kapita*	Rp 11.921.000	Rp 12.017.000	0,8
<i>*menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita dikarenakan BPS tidak merilis data Pendapatan per Kapita</i>				
6	Ketimpangan Pendapatan (kriteria Bank Dunia)	20,13	19,59	2,68

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten mencapai 75,56 pada Tahun 2020, dan pada Tahun 2021 mencapai 76,12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang disusun dari 3 (tiga) komponen esensial untuk kehidupan manusia. yaitu: (i) Usia hidup panjang dan sehat diukur dengan Usia Harapan Hidup, (ii) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah, (iii) Standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per kapita. Adapun Hasil

penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2021

Indikator IPM	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup (UHH)	76,59	76,62	76,67	76,68	76,78	76,86
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,85	12,97	13,13	13,24	13,25	13,39
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,22	8,23	8,24	8,31	8,58	8,81
Pengeluaran Riil Per kapita (dlm Ribuan Rp)	11.227	11.369	11.738	12.074	11.921	12.017
IPM	73,97	74,25	74,79	75,29	75,56	76,12

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

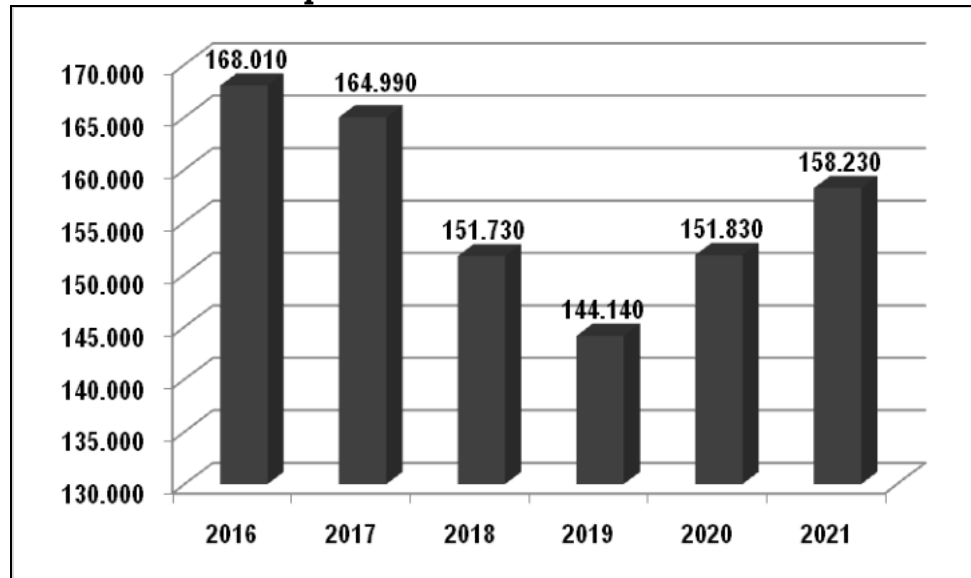
Selama periode 2020 - 2021, beberapa komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan. Usia Harapan Hidup mengalami peningkatan dari 76,78 tahun pada tahun 2020 menjadi 76,86 tahun pada tahun 2021. Angka Harapan Lama Sekolah meningkat dari 13,25 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,39 tahun pada tahun 2021. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,58 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,81 tahun pada tahun 2021. Pengeluaran Per Kapita masyarakat mengalami kenaikan dari Rp11.921.000,- pada tahun 2020 menjadi Rp12.017.000,- pada tahun 2021.

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan.

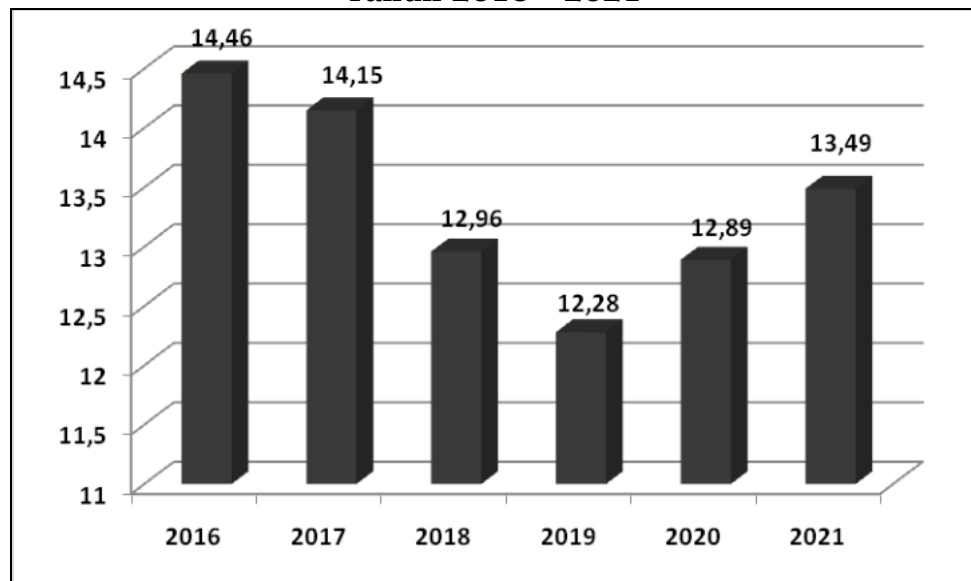
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Jawa Tengah, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar Rp436.896 per bulan, dengan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2021 sebanyak 158.230 jiwa dengan persentase 13,49%. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada rentang tahun 2016-2021 dapat dilihat pada gambar 2.1 dan 2.2

Gambar 2.1
Perkembangan antar waktu Jumlah Penduduk Miskin
di Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2021

Gambar 2.2
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten
Tahun 2016 – 2021



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Tahun 2021

Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten pada rentang waktu tahun 2016-2019 menunjukkan penurunan angka. Pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan dampak dari wabah Covid-19, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 144.140 jiwa naik menjadi 151.830 jiwa pada tahun 2020 dan menjadi 158.230 jiwa pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 12,28% naik menjadi 12,89% pada tahun 2020 dan menjadi sebesar 13,49% pada tahun 2021.

2.1.3 Angka Pengangguran

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 5,48% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2021 sebesar 66,89%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 – 2021 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %
dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
di Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2021

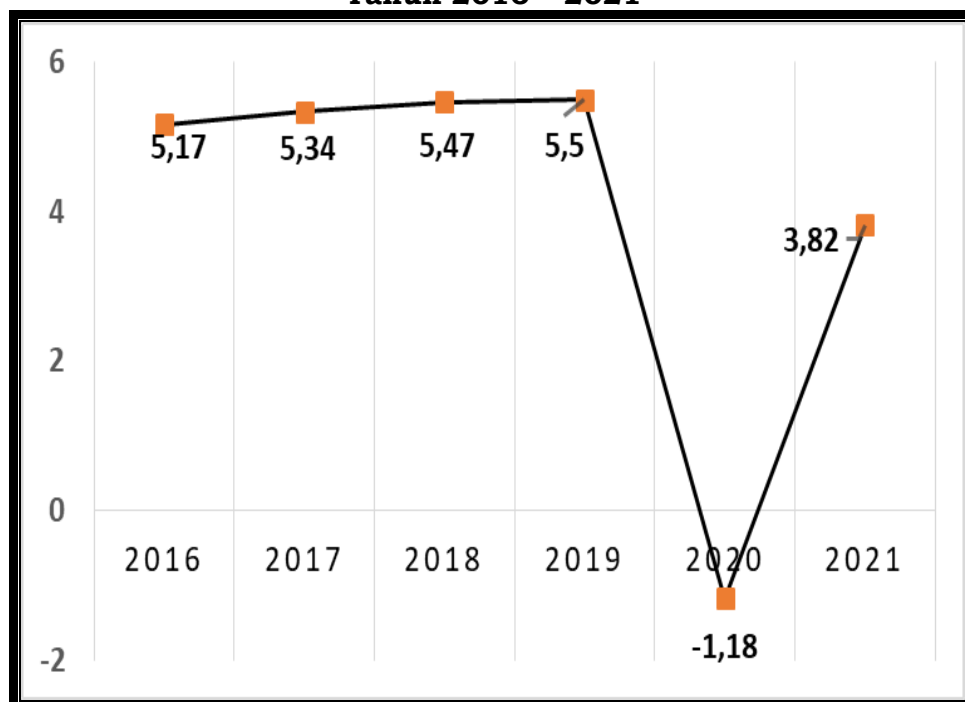
NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,93	66,81	68,79	68,33	66,89
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,35	3,11	3,55	5,46	5,48

Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2022

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Klaten, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2021 menunjukkan kinerja positif sebesar 3,82%. Capaian tersebut jauh meningkat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,18%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 yang sebesar 3,82% menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Klaten mampu tumbuh di tengah kondisi wabah pandemi Covid-19 yang masih ada sampai saat ini. Capaian Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar 3,82% di atas Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang sebesar 3,32% dan Pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 3,69%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam gambar 2.3

Gambar 2.3
Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten (%)
Tahun 2016 – 2021



Sumber : BPS Kabupaten Klaten tahun 2022

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Perhitungan pendapatan per kapita tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data pendapatan per kapita menggunakan pendekatan Pengeluaran Per Kapita. Pengeluaran per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar Rp11.921.000,- dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp12.017.000,- atau meningkat sebesar Rp96.000,- Adapun data pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4.a
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2021

Tahun	Pengeluaran Per Kapita (Dalam Rupiah)
2016	11.227.000
2017	11.369.000
2018	11.738.000
2019	12.074.000
2020	11.921.000
2021	12.017.000

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Menurut kriteria Bank Dunia, penduduk digolongkan menjadi tiga kelas, yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Penghitungan kriteria Bank Dunia tersebut menggunakan data pengeluaran dengan pertimbangan bahwa data pengeluaran lebih teliti daripada data pendapatan dan pengeluaran dapat digunakan sebagai pendekatan dari pendapatan. Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah dapat digunakan untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- a) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima kurang dari 12 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan tinggi,
- b) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima 12 sampai 17 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan sedang,
- c) Jika penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan maka dikategorikan ketimpangan rendah,

Data Distribusi pendapatan Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan kriteria Bank Dunia dari Tahun 2019 s/d 2021 bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4.b
Distribusi Pendapatan Penduduk Klaten
Tahun 2019 – 2021

Distribusi Pendapatan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
40% penduduk pendapatan rendah (bawah)	19,15	20,13	19,59
40% penduduk pendapatan sedang (tengah)	37,44	37,47	36,78
20% penduduk pendapatan tinggi (atas)	43,41	42,40	43,63

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2021, distribusi pendapatan 40 persen penduduk berpendapatan rendah di Kabupaten Klaten sebesar

19,59%, 40 persen penduduk berpendapatan sedang sebesar 36,78% dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sebesar 43,63%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kategori ketimpangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 masuk kategori ketimpangan rendah dikarenakan penduduk pada golongan 40 persen berpendapatan/berpengeluaran rendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator Kunci Hasil dan Indikator Kunci untuk Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat dalam Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah

Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada tahun berkenaan, serta RKPD 2021. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55,00
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	14
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70(BB)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	58
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	483
			PMA	%	294
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	2,5
PMA	%	2,55			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	40,81
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	74,4
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	40,46
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	84,46
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	58,60
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang 119
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	75,7
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	100
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	100
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,37
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nindya 750

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	81,08
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	Sdh
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	42,00

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya sebagai upaya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak dari pelaksanaan pembangunan Daerah. Sehingga pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana instansi Pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan telah mampu mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terutama terkait dengan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat disajikan pada Tabel 2.6 dan juga Tabel 2.7.

Tabel 2.6
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,01 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,01 \leq 75$	Sedang	
4	$50,01 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten

Tabel 2.7
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\leq 99,9$	Tercapai (Tinggi)	
2	≥ 100	Tidak Tercapai (Sangat Rendah)	

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2021 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja sebagaimana tabel 2.8

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55,00	97,84	177,89
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95,00	88,70	93,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	14	45	321,43
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07	10,54	104,67
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61	1,56	96,89
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7	0,93	132,86
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10	1,6	76,19
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,86	100,31
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89	97,27	109,29
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	100	100
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9	13,19	102,24
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	17	170,00
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	28	560,00
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	16,67	277,83
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	0	0

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-83,34	-1667
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)	WTP (4)	100
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	81,82	90,91
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	1,68	33,60
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100	100	100
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70 (BB)	62,07 (B)	88,67
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1	3,2109	103,58
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	100	111,11
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90	95,7	106,33

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	96	106,67
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,58	73,71
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6	10,87	86,27
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	58	57,69	99,47

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	3,22	12,87	
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38	19,98	103,10	
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15	12	80	
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100	85,3	85,3	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					
			PMDN	%	483	8	1,66	
			PMA	%	294	231	78,57	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):					
			PMDN	%	2,5	97	3880,00	
PMA	%	2,55	319	12509,80				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08	0,76	70,37	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	86,94	126,00	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,20	59,91	67,93	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2	35,2	100,00	
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,50	7,9	105,33	
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	40,81	40,38	98,95	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52	87,01	151,27
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,40	74,40	100
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80,00	80,50	100,63
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	40,46	55,9	138,16
		36.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,46	84,95	100,58
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	58,60	42,54	72,59
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	Sedang 119	Sedang 99,24	83,39
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	Indeks	75,7	75,43	99,64
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	100	85,50	85,50
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	100	100
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,37	69,42	114,99
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nindya 750	Madya 650	86,67
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,08	80,65	99,47

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Indeks	80	81,2	101,50
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	Sdh	91,5	91,5
45	Pengembangan ketransmigrasi Sian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	%	42,00	0	0

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 67 (enam puluh tujuh) yang terdiri dari: 60 (enam puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

A. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a. Sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69% dengan Kriteria *Sangat Tinggi*;
- b. Sebanyak 9 (sembilan) atau sebanyak 13,43% dengan Kriteria *Tinggi*;
- c. Sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48% dengan kriteria *Sedang*;
- d. Sebanyak 0 (nol) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 0% dengan kriteria Rendah; dan
- e. Sebanyak 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 8,96% dengan Kriteria *Sangat Rendah*.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria *Sangat Tinggi* (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$) sebanyak sebanyak 42 (empat puluh dua) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69%, diantaranya:
 1. Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 3. Usia Harapan Hidup;
 4. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

5. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
6. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
7. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
8. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya;
9. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
10. Prosentase Raperda yang disahkan tepat waktu;
11. Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan;
12. Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel;
13. Level Maturitas SPIP;
14. Level Kapabilitas APIP;
15. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
16. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara;
17. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
18. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana);
19. Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi;
20. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah;
21. Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah;
22. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah;
23. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra;
24. Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek;
25. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
26. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN;
27. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA;
28. Angka partisipasi angkatan kerja;
29. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
30. Persentase IKM yang memiliki daya saing;
31. Indeks layanan infrastruktur;
32. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
33. Indeks kualitas perumahan dan kawasan pemukiman;
34. Ketaatan terhadap RTRW;
35. Indeks Kualitas Air;
36. Indeks Kualitas Udara;
37. Indeks Demokrasi;
38. Indeks Ketertiban Masyarakat;
39. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
40. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan;

41. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan;
 42. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat (Dukcapil).
- b. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Tinggi, atau interval nilai realisasi kinerja $75,1 \leq 90$ sebanyak 9 (sembilan) atau sebanyak 13,43%, diantaranya:
1. Indeks Profesionalitas ASN;
 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 3. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
 4. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
 5. Prosentase inovasi yang diterapkan;
 6. Rasio daya serap tenaga kerja PMA;
 7. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
 8. Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan); dan
 9. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA).
- c. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sedang, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75$ sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48%, yaitu:
1. Rasio penduduk yang bekerja; dan
 2. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta prgram BPJS Ketenagakerjaan; dan
 3. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan).
- d. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Rendah, atau interval nilai realisasi kinerja $50,01 \leq 65$ sebanyak 0 (nol) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 0%.
- e. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria Sangat Rendah, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 6 (enam) indikator, diantara:
1. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 2. Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat;
 3. Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku;
 4. Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata;
 5. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN; dan
 6. Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi.

B. Indikator Regresif, dengan hasil:

Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Tercapai (Berhasil Menekan)**, atau interval nilai realisasi kinerja skala $99,9 \leq$ sebanyak 3 (tiga) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 4,48%, diantaranya:

1. Angka Kematian Balita;
2. Tingkat Inflasi YoY; dan
3. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR.

Sedangkan yang ***Tidak Tercapai***, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≥ 100 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 5,97%, diantaranya:

1. Kasus kematian Ibu;
2. Angka Kematian Bayi; dan
3. Prevalensi gizi buruk (BB/U); dan
4. Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian dilakukan dengan mengukur capaian kinerja Tahun 2021 dibanding Tahun 2020. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020 dan Tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.9.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2021 terhadap target kinerja pada tahun terakhir RPJMD (2021). Dalam mengukur capaian kinerja tahun berkenaan dengan target dalam RPJMD juga dengan membandingkan dengan capaian saat awal RPJMD maupun capaian kinerja 2 (dua) tahun sebelumnya (Tahun 2019 dan 2020).

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9
 Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019,2020 dan Tahun 2021 dan
 Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021 dibandingkan
 dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	98,28	98,37	55	97,84	177,89	55	177,89
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	85,09	90,63	95	88,70	93,36	95	93,36
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	15	12	17	14	45	321,43	14	321,43
		2.2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,01	9,34	10,07	10,54	104,67	10,07	104,67
		2.3	Angka kematian Balita	2,99	1,59	1,61	1,61	1,56	96,89	1,61	96,89
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	0,75	0,71	0,90	0,7	0,93	132,86	0,70	132,86
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	2,2	2,1	2,1	2,1	1,6	76,19	2,1	76,19
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka	4.1	Usia Harapan Hidup	71,81	76,67	76,67	76,62	76,86	100,31	76,62	100,31

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	kematian di Rumah Sakit.										
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	77	62,26	98,4	89	97,27	109,29	89	109,29
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	100	100	100	100	100
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	13,09	12,35	12,9	13,19	102,24	12,9	102,09
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	-13,2	10	17	170	60	170
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	3,7	5	28	560	30	93,33
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	12	-300	6	16,67	277,83	36	46,30
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	5	0	10	0	0	60	0
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	4	22,19	-64	5	-83,34	-1667	5	-1667

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	-	77,55	78,06	87,36	78,06	89,35	87,36	89,35
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP (3)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (3)	WTP (4)	100	WTP (4)	100
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	91,31	100	90	81,82	90,91	85	96,26
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	Na	100	100	100	100	100	100	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	12,56	8,72	5	1,68	33,60	25	6,72
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	68	88	100	100	100	100	100
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	3	100	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3	100	3	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	47,89 (C)	60,33 (B)	61,32 (B)	70 (BB)	62,07 (B)	88,67	70 (BB)	88,57
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,2109	3,2109	3,1	3,2109	103,58	3,1	103,58
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	83	90	90	100	111,11	90	111,11
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	0	90	95,7	90	95,7 (A)	106,33	90	106,33
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	81	100	90	96	106,67	90	106,67
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	0	100	100	100	100	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	90/1200	98	99,42	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	keprotokolan	20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	90	98	98,16	100	100	100	100	100
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	100/125	98	99,86	100	100	100	100	100
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	2,57	2,64	1,38	3,5 (± 1)	2,58	73,71	3,5 (± 1)	73,71
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	90	90	95	95	95	100	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	10,98	12,6	10,87	86,27	12,6	86,27

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	39	42	58	57,69	99,47	58	99,47
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	31,96	-55,88	25	3,22	12,87	100	3,22
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	19,98	19,98	19,38	19,98	103,10	19,38	103,10
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	11,45	11,8	15	12	80	15	80
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	31,82	105	85	100	85,3	85,3	100	85,3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)	
					2019	2020	Target	Realisasi	%			
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):									
			PMDN	189	19	3	483	8	1,66	2.433	0,34	
			PMA	46	139	12	294	231	78,57	1.764	13,10	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):									
			PMDN	1,75	733	-79	2,50	97	3880,00	12,74	761,38	
			PMA	2,25	272	-59	2,55	319	12509,80	14,70	2170,07	
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	1	0,96	1,08	0,76	70,37	1,08	70,37	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	87,79	81	98,79	69	86,94	126,00	69	126,00	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	71,48	91,6	88,2	59,91	67,93	25,5	231,76	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas,	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	37,00	37,00	35,2	35,2	100	35,2	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
	dan daya saing sektor Perindustrian	31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	7,6	3,54	7,50	7,90	105,33	7,5	160
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	26,27	60,87	60,87	40,81	40,38	98,95	40,81	98,95
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	45,87	69,83	57,52	87,01	151,27	57,52	151,27
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	57,71	53,76	74,05	74,4	74,4	100	74	100
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	79,6	80	80,5	100,63	80,00	100,63
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	16,00	28,46	36,16	40,46	55,9	138,16	40,46	138,16
		36.2	Indeks Kualitas Udara	60,00	82,29	76,82	84,46	84,95	100,58	84,46	100,58
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	34,14	83,3	42,54	58,60	42,54	72,59	58,60	72,59

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (123,20)	Sedang (119)	Sedang (99,24)	83,39	Sedang	Sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	72,22	75,7	75,43	99,64	75,70	99,64
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	58	61	100	85,50	85,50	100	85,50
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	96	98	100	100	100	100	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2021 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2019	2020	Target	Realisasi	%		
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	72,35	60,37	69,42	114,99	60,37	114,99
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Madya (650)	Nindya 750	Madya 650	86,67	Nindya (750)	86,67
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	75,99	79,02	79,95	81,08	80,65	99,47	81,08	99,47
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	84,50	80,52	78,37	80	81,20	101,50	80,00	101,50
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan administrasi	Sdh	91,77	Sdh (81,6)	Sdh	91,50	91,50	sdh	Sdh
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase Besar Peningkatan Minat Transmigrasi	-64,62	5,2	0	42	0	0	42	

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 (data setelah reuiu Inspektorat Kabupaten Klaten)

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2021 didasarkan pada pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2).Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (Life-skill), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2021 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah Daerah. Adapun capaian sasaran: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal sebagaimana Tabel 2.10

Tabel 2.10
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJMD	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	98,28	98,37	55	97,84	177,89	55	177,89
2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	85,09	90,63	95	88,70	93,36	95	93,36

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

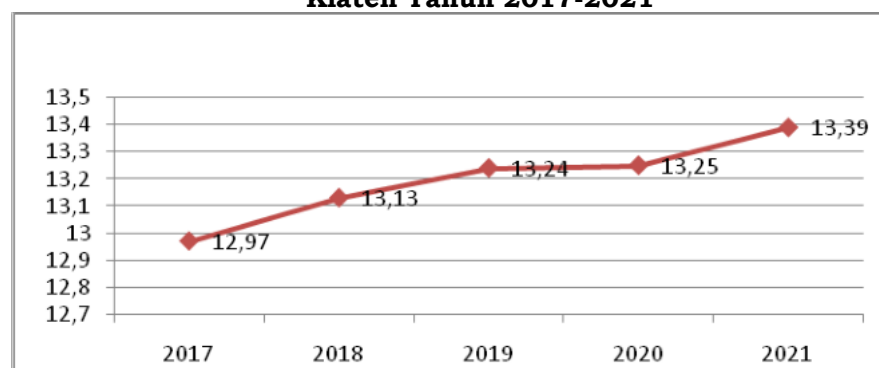
Capaian sasaran kinerja: **Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal**, pada tahun 2021 dengan indikator persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebesar 97,84% dengan jumlah sekolah dasar sebanyak 741 sekolah dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 725 sekolah. Sedangkan indikator persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebesar 88,70% dengan jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 115 sekolah dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 102 sekolah.

Capaian sasaran kinerja: **Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal** sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2017-2021, yaitu dari sebesar 12,97 pada tahun 2017 menjadi sebesar 13,39 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada gambar 2.4

Gambar 2.4
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah
Klaten Tahun 2017-2021

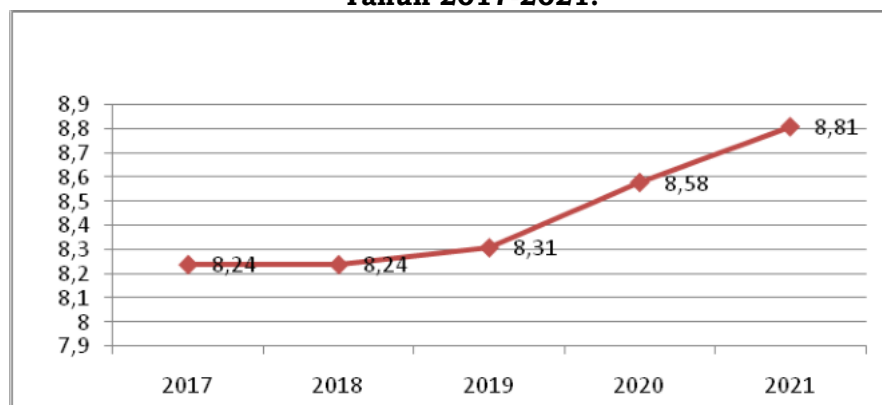


Sumber : BPS JATENG, Update Terakhir 15 Nov 2021.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2017-2021, yaitu dari sebesar 8,24 pada tahun 2017 menjadi sebesar 8,81 pada tahun 2021 pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada gambar 2.5

Gambar 2.5
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah
Tahun 2017-2021.



Sumber: BPS JATENG, Update Terakhir 15 November 2021.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,23% dari sebesar 8,58 pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,81 pada tahun 2021, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2017-2021 perkembangannya bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2020 mencapai 96,02%, namun pada tahun 2021 menjadi 91,65%. Begitu juga dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B turun dari 100,48% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 menjadi 98,62%. Faktor yang mempengaruhi penurunan APK disebabkan masih terdapat anak usia sekolah yang tidak sekolah, masih terdapat anak putus sekolah di jenjang SD/MI maupun SMP/MTs serta faktor pandemi covid. Selain itu anak-anak yang berada di pondok pesantren dan sejenisnya belum bisa dilakukan pendataan. Perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017-2021

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2017	97,45	90,93
2	2018	102,75	98,57
3	2019	98,54	98,31
4	2020	96,02	100,48
5	2021	91,65	98,62

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2020 sudah mencapai 88,54%, turun menjadi 83,91% pada tahun 2021. Hal tersebut terjadi sebagai dampak dari adanya peserta didik yang berusia kurang dari 7 tahun masuk ke jenjang SD/ sederajat dikarenakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membolehkan anak berusia dibawah 7 tahun untuk mendaftar ke jenjang SD/ sederajat, sehingga pada usia 12 tahun anak tersebut sudah lulus jenjang SD/ sederajat dan dapat mendaftar ke SMP/ sederajat. Begitu juga dengan Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2020 mencapai 71,14%, naik menjadi 72,11% pada tahun 2021. Dari capaian tersebut dapat diartikan bahwa perkiraan proporsi peserta didik usia 13 - 15 tahun di Kabupaten Klaten yang bersekolah tepat sesuai dengan ketentuan usia bersekolah dijenjang SMP/ sederajat adalah sebesar 72,11%, artinya terdapat sekitar 27,89% peserta didik pada jenjang SMP/ sederajat berusia kurang dari 13 tahun atau lebih dari 15 tahun. Perkembangan APM di Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 2.12

Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2017-2021

No	Tahun	SD /MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2017	86,84	68,22
2	2018	90,84	73,21
3	2019	88,30	73,05
4	2020	88,54	71,14
5	2021	83,91	72,11

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2017-2021 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.13

Tabel 2.13
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	%	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	%	0,23	0,06	0,05	0,08	0,05
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA	%	0,63	0,67	0,53	0,48	-

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.13 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah tingkat SD/MI dua tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 0,01% menjadi 0,02% di tahun 2021. Hal ini disebabkan karena kondisi Pendidikan yang kurang baik dan tidak merata. Sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS mengalami penurunan dari sebesar 0,08% pada tahun 2020 menjadi 0,05% pada tahun 2021, hal ini disebabkan kondisi kemajuan pembangunan di bidang Pendidikan dan keterjangkauan Pendidikan maupun pemerataan sudah semakin baik.

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.6

Gambar 2.6
Angka Kelulusan (AL) Tahun 2017-2021



Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan gambar 2.6 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTS pada tahun 2020 maupun tahun 2021 angka kelulusan mencapai 100% hal ini disebabkan

tatacara kelulusan di masa pandemi, disamping karena adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan.

7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 Tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.7

Gambar 2.7
Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021



Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Gambar 2.7 sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebesar 99,60 mengalami kenaikan sebesar 0,01 dari tahun 2020 sebesar 99,59.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang didukung dengan Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan akselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju.

Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. Sementara itu perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.14

Tabel 2.14
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/MI	%	84,16	87,67	90,32	91,01	92,45
Jenjang Pendidikan SMP/MTs	%	60,33	91,98	94,17	94,50	94,67

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama tahun 2017-2021 semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya standar kualifikasi yang disyaratkan, serta adanya tuntutan kewajiban bagi guru SD/MI dan SMP/MTs untuk selalu meningkatkan kapabilitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.15

Tabel 2.15
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2
dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/MI	%	98,27	99,00	99,19	99,60	98,97
Jenjang Pendidikan SMP/MTs	%	93,55	96,92	97,10	98,52	99,22

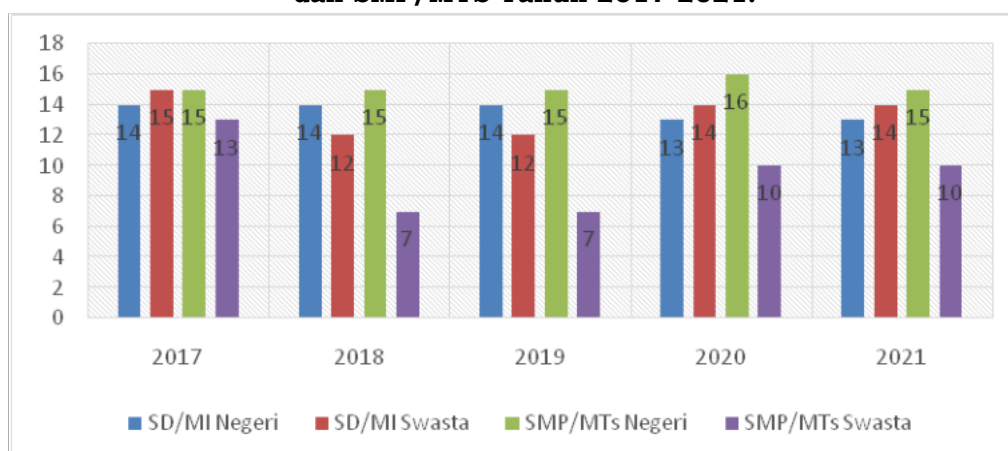
Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.15 sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 99,60% pada tahun 2020 menjadi 98,97% di tahun 2021, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dari 98,52% pada tahun 2020 menjadi 99,22% pada tahun 2021. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 sesuai standar sistem Pendidikan Nasional.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.8

Gambar 2.8
Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2017-2021.



Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan gambar 2.8 sebagaimana di atas Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri (*Rasionya 1:14*) dan SMP/MTs Negeri (*Rasionya 1:15*) Tahun 2017-2021 angkanya relatif stabil, sedangkan untuk jenjang Pendidikan SD/MI swasta dan SMP/MTs swasta bersifat flutuatif, hal ini sangat tergantung kondisi sekolah dan akibat kebijakan zonasi sekolah sangat berpengaruh terhadap situasi pilihan siswa dan sikap orang tua/wali murid untuk memilih dan menentukan sekolah yang diminati.

10) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.16

Tabel 2.16
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	99,26	99,30	96,70	99,90	100,11
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	88,28	95,48	98,58	92,60	91,98

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.16 sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTS pada tahun 2017-2021 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2017–2021 disajikan pada Tabel 2.17

Tabel 2.17
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik
Tahun 2017-2021

Uraian	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	64,73	69,48	68,25	68,88	71,36
Sekolah pendidikan SMP/MTS	%	77,68	87,37	88,89	74,35	88,01

Sumber: DINAS PENDIDIKAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.17 sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: *Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal* terdiri dari 5 (lima) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Pendidikan;
3. Pengembangan Kurikulum;
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Permasalahan

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Pelaksanaan belajar-mengajar tetap memperhatikan kondisi perkembangan pandemi Covid-19, hal ini menimbulkan ketidakpastian;
- b. Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak;
- c. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang pendidikan;
- d. Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, dan belum tuntasnya *regrouping* Sekolah Dasar; dan

- e. SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya:

- a. Pelaksanaan proses di sekolah maupun di luar sekolah secara ketat;
- b. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
- c. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas guru;
- d. Pengisian Kepala Sekolah dengan Diklat penguatan bagi calon Kepala Sekolah; dan
- e. Pengusulan pengangkatan tenaga harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan;

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar

kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, serta berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya: 1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 2.18

Tabel 2.18
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka
Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*10
1	Kasus kematian Ibu	15	12	17	14	45	321,43	14	321,43
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,01	9,34	10,07	10,54	104,67	10,07	104,67
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,59	1,52	1,61	1,56	96,89	1,61	96,89
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,71	0,90	0,7	0,93	132,86	0,70	132,86

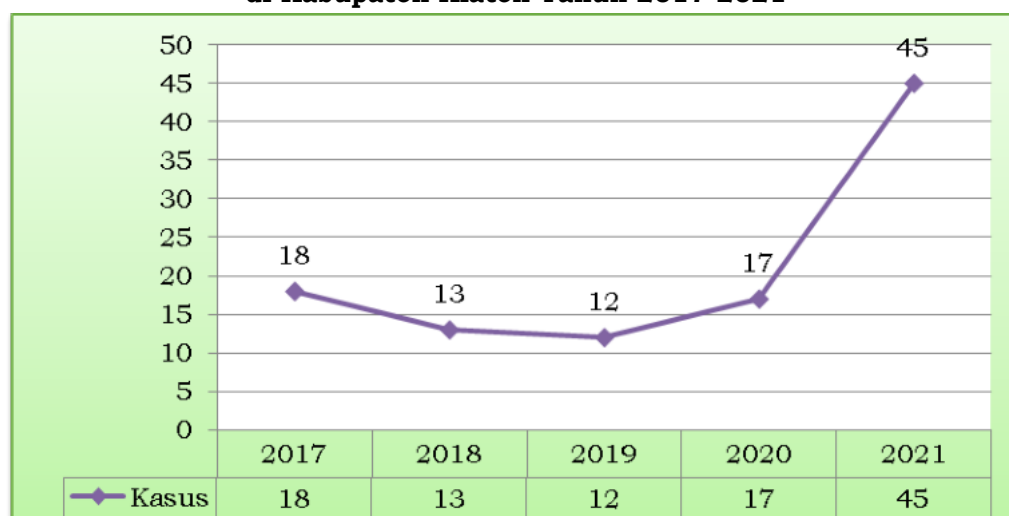
Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

Capaian sasaran kinerja: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan, sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan kesehatan, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 dapat disajikan pada gambar 2.9

Gambar 2.9
Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021



Sumber: DINAS KESEHATAN, Update Per Januari 2022.

Berdasarkan gambar 2.9 sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2017-2021 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 2.19

Tabel 2.19
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan
dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Prambanan	Prambanan	0	2	0	0	1
		Kebondalem Lor	0	0	1	0	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	1	0	0	1	1
3	Wedi	Wedi	0	1	0	0	1
4	Bayat	Bayat	1	1	0	0	4
5	Cawas	Cawas I	2	1	0	0	0
		Cawas II	1	1	0	0	1
6	Trucuk	Trucuk I	1	0	0	0	0
		Trucuk II	1	0	1	1	2
7	Kalikotes	Kalikotes	0	0	0	1	4
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	1
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	0	2	1	1
		Jogonalan II	0	0	0	0	1
10	Manisrenggo	Manisrenggo	0	1	0	0	2
11	Karangnongko	Karangnongko	1	0	0	1	2
12	Ngawen	Ngawen	0	0	1	0	4
13	Ceper	Ceper	2	0	1	1	1
		Jambukulon	0	0	0	0	0
14	Pedan	Pedan	0	1	1	1	1
15	Karangdowo	Karangdowo	1	1	0	2	1
16	Juwiring	Juwiring	0	0	0	1	0
17	Wonosari	Wonosari I	1	1	0	0	1
		Wonosari II	0	0	2	0	0
18	Delanggu	Delanggu	1	0	0	3	0
19	Polanharjo	Polanharjo	0	1	1	0	2

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2017	2018	2019	2020	2021
20	Karanganom	Karanganom	2	1	0	0	2
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	1
		Majegan	0	0	0	0	2
22	Jatinom	Jatinom	0	1	1	0	0
		Kayumas	0	0	0	1	3
23	Kemalang	Kemalang	2	0	0	1	2
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	2	1
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	0	0	0	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	0	0	1	0	3
Jumlah			18	13	12	17	45

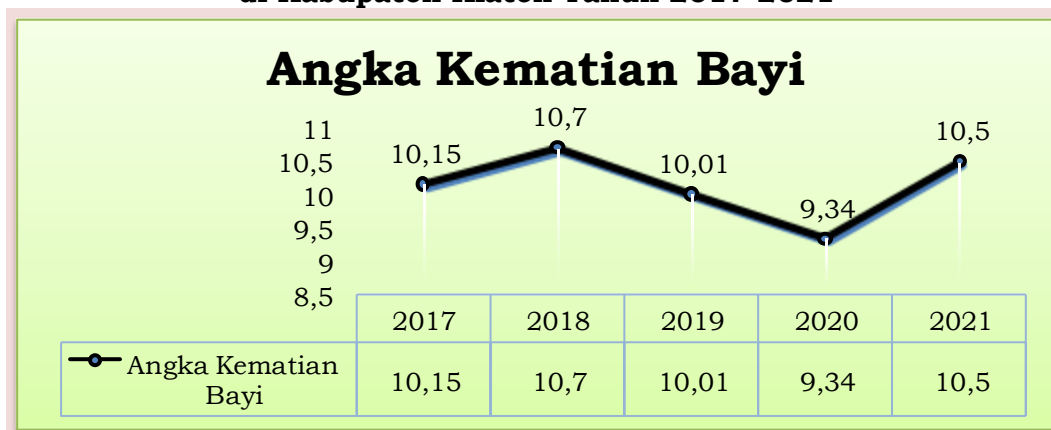
Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.19 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini disebabkan salah satunya karena hipertensi, faktor medis lainnya, dan non medis yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 disajikan pada gambar 2.10

Gambar 2.10
Perkembangan Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021



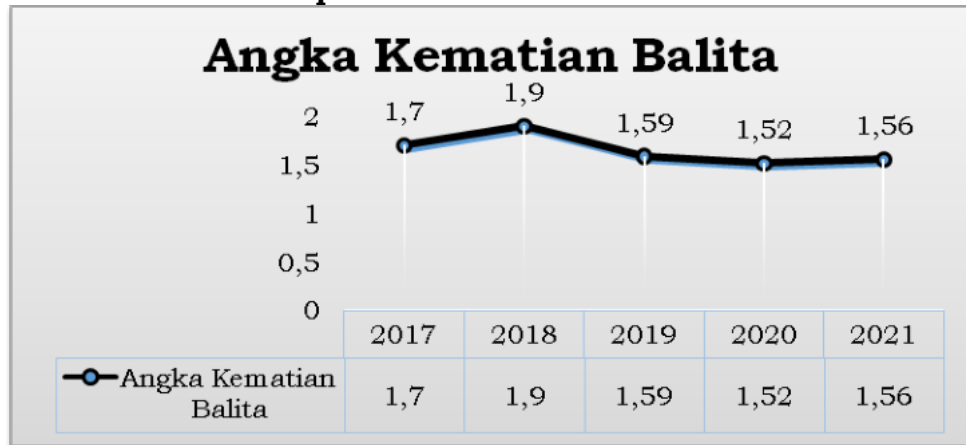
Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Gambar 2.10 sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian bayi yang tinggi.

3. Angka Kematian Balita

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 disajikan pada gambar 2.11

Gambar 2.11
Perkembangan Angka Kematian Balita
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021



Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

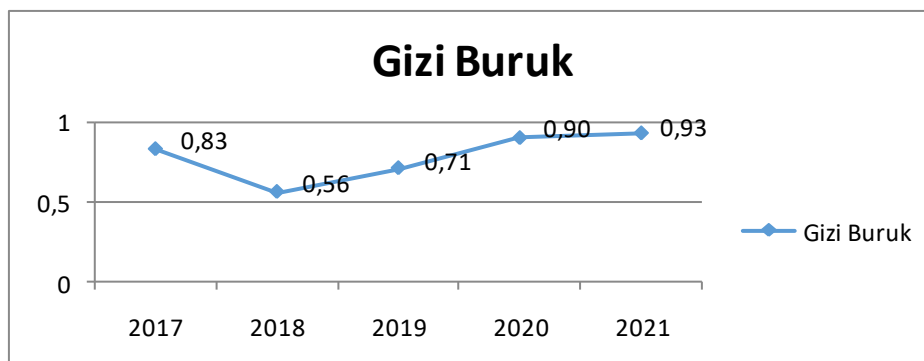
Berdasarkan gambar 2.11 sebagaimana tersebut di atas Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2017 sebanyak 1,7 per 1.000 KH (atau 27 kasus), tahun 2018 sebanyak 1,9 per 1.000 KH (atau 30 kasus), tahun 2019 menjadi sebanyak 1,59 per 1.000 KH (atau 25 kasus), tahun 2020 menjadi sebanyak 1,52 per 1.000 KH (atau 24. kasus), dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 1,56 per 1.000 KH (atau 23 kasus). Penyebab Kematian balita terbanyak diare, maka derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian balita yang tinggi.

4. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus underweight (balita gizi buruk) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada gambar 2.12

Gambar 2.12
Perkembangan Persentase Prevelensi Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021



Sumber: DINAS KESEHATAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan gambar 2.12 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2017-2021 kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta bersifat fluktuatif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** terdiri dari 5 (lima) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi;
- b. Masih ditemui adanya: Angka kesakitan demam berdarah, penemuan infeksi HIV dan AIDS yang setiap tahun cenderung meningkat, adanya ancaman pandemik flu burung, penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya: demam berdarah dengue, malaria, filiarisis, serta penanganan pandemi Covid-19;
- c. Beberapa jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) masih terjadi. Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru, kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI;
- d. Kondisi gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk;
- e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
- f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi; dan
- g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan Antenatal Care (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

3. Sasaran Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)

Berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah anak yang diinginkan. Pemahaman kesehatan reproduksi tersebut termasuk pula adanya hak-hak setiap orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, efektif dan terjangkau. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran: Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*) sebagaimana Tabel 2.20

Tabel 2.20.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) /TFR	2,2	2,1	2,1	2,1	1,6	76,19	2,1	76,19

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2020 sebanyak 37.376 KH, dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 13.062. KH (atau turun 65,05% dibanding tahun 2020). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 perkembangannya bersifat fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2020 sebanyak 12.348 peserta KB baru, dan pada tahun 2021 menjadi 13.550 peserta KB baru (naik 8,87%). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.21

Tabel 2.21
Peserta KB dan KB Aktif di
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
(1)	(2)	(4)	(5)
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109
2019	197.949	12.503	141.315
2020	195.133	12.348	138.344
2021	197.321	13.550	138.719

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.21 sebagaimana tersebut di atas, perkembangan persentase KB Baru terhadap terhadap pasangan usia subur pada tahun 2020 sebesar 6,33%, dan rasio peserta KB baru terhadap Peserta KB Aktif sebesar 8,93%, sedangkan rasio peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 70,90%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pasangan subur menjadi 197.321 PUS, jumlah peserta KB Baru sebanyak 13.550 orang dan jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 138.719 orang.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2017-2021 mengalami penurunan. Tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I (KS I), dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 372.744 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.22

Tabel 2.22
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Tahun	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
2017	80.935	114.736	192.994	388.665
2018	52.688	81.688	238.374	372.750
2019	52.686	81.747	237.828	372.261
2020	52.722	82.267	237.755	372.744
2021	Na	Na	Na	Na

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Catatan: Tahun 2021 perhitungan Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya dengan formulasi yang berbeda dan belum rilis.

Berdasarkan Tabel 2.22 sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.722 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 82.267 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 237.755 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: ***Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)*** diantaranya:

1. Pengendalian Penduduk;
2. Pembinaan Keluarga Berencana (KB); dan
3. Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

Permasalahan

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka *drop out* KB; dan
2. Banyak Pasangan Usia Subur.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

1. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; dan
2. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

4. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;

Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan Rumah Sakit Umum

Daerah (RSUD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit** sebagaimana Tabel 2.23

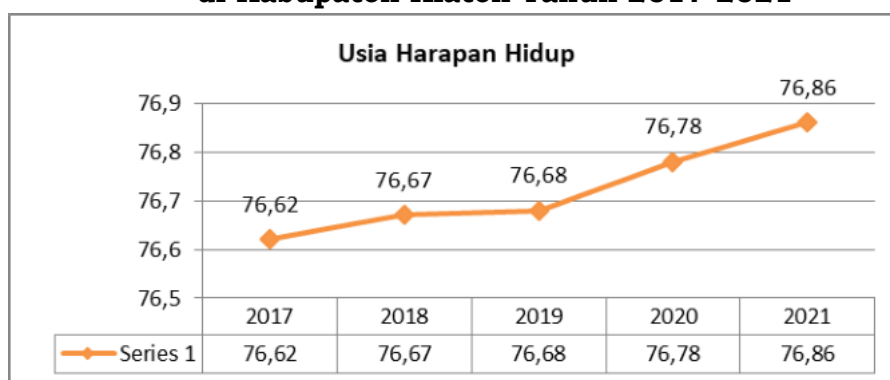
Tabel 2.23
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*10
1	Usia Harapan Hidup	71,81	76,67	76,78	76,62	76,86	100,31	76,62	100,31

Sumber: BPS, 2022 (diolah).

Usia Harapan Hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2017-2021 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada gambar 2.13

Gambar 2.13
Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

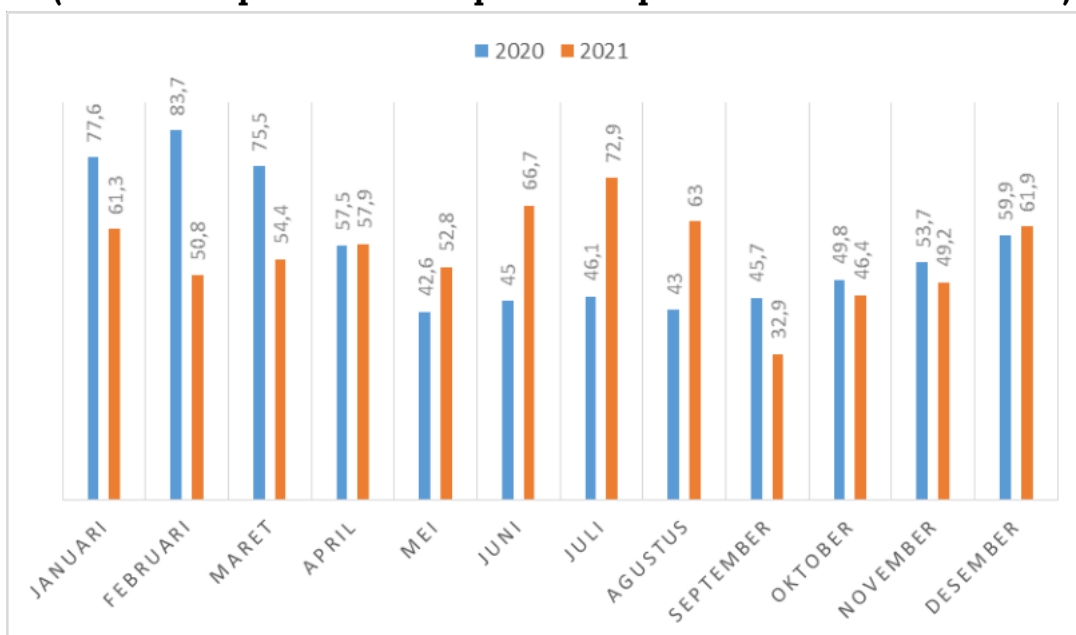


Sumber : BPS JATENG, Update 14 November 2021.

1) Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2020 adalah 56,9 %, dan pada tahun 2021 sebesar 55,98% dengan jumlah per bulan disajikan pada gambar 2.14

Gambar 2.14
Perkembangan Indikator BOR Bulanan
(Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

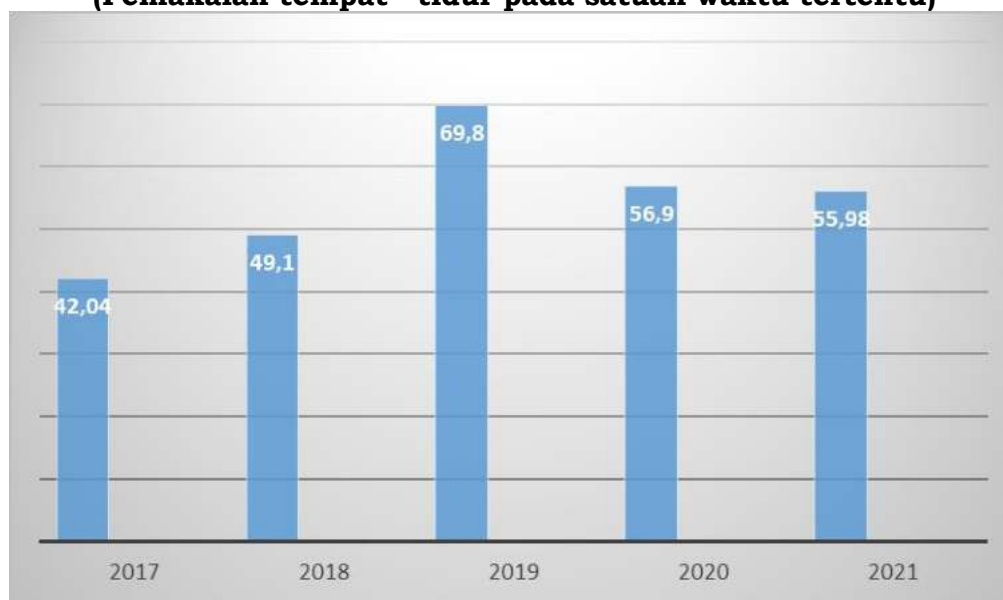


Sumber : RSUD Bagas Waras Kabupaten. Klaten, Update per Januari 2022.

Disamping perkembangan Indikator BOR sebagaimana tersebut di atas, jumlah kunjungan pasien pada tahun tercatat sebanyak 110.810 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 8305 orang/Tahun (atau rata-rata 23 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 90.627 orang/Tahun (atau rata-rata 248 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 11.878 orang/Tahun (atau rata-rata 33 orang/hari).

Adapun kinerja pelayanan RSUD Bagas Waras dapat dilihat pada Gambar 2.15

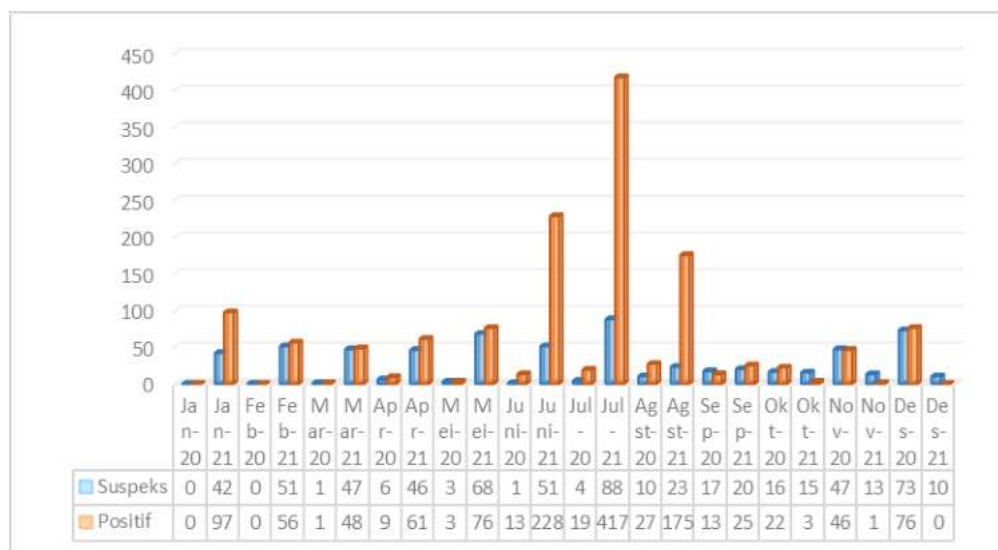
Gambar 2.15
Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%)
(Pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)



Sumber : RSUD Bagas Waras Kabupaten. Klaten, Update per Januari 2022.

Sementara itu jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Bagas Waras tahun 2020-2021 disajikan pada gambar 2.16

Gambar 2.16
Jumlah Pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Bagas Waras



Sumber: RSUD Bagas Waras Kabupaten. Klaten, Up date per Januari 2022.

Kasus covid-19 pertama kali yang mendapat penanganan di RSUD Bagas Waras pada bulan Maret tahun 2020 sebanyak 1 (satu) kasus, lalu pada bulan-bulan berikutnya angka naik, dan puncaknya di bulan Juli 2021 sebanyak 417 kasus dinyatakan positif. Segala sumber daya dikerahkan untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19, dan hasilnya menunjukkan kinerja positif.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitannya Oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit**, diantaranya program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
5. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Permasalahan

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya kasus pandemi Covid-19, beserta angka ikutannya
2. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
 - a. Demam berdarah dengue.
 - b. Malaria

- Filariasis

3. Untuk jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti *Diabetes Militus* (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
 - b. Kusta penderita PB
 - c. Diare
 - d. Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - e. HIV
 - f. Kejadian luar biasa KIPI
 - g. Pencegahan Stunting
 - h. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

5. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS** dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 2.24

Tabel 2.24
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam memperoleh
pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM

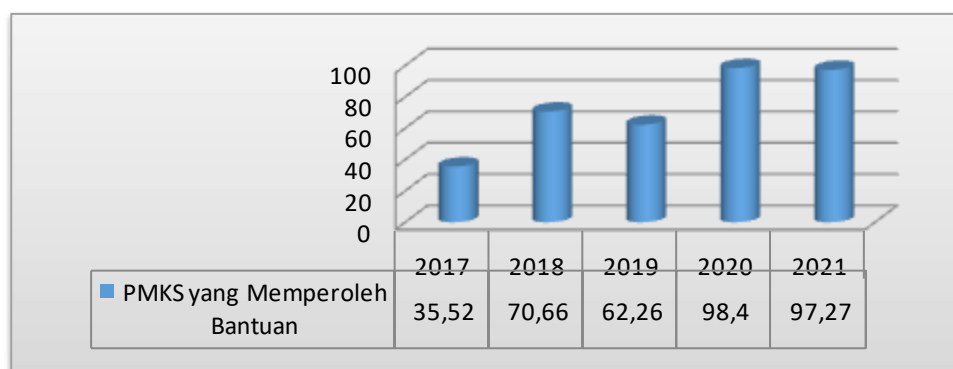
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	77	62,26	98,4	89	97,27	109,29	89	109,29
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	100	100	100	100	100
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	13,09	12,35	12,9	13,19	102,24	12,9	102,09

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2017–2021 disajikan pada gambar 2.17

Gambar 2.17
PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2017–2021



Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Berdasarkan gambar 2.17 sebagaimana tersebut di atas, Pada tahun 2020 jumlah PMKS sebanyak 172.857 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 156.127 orang. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 168.291 orang, dan mendapatkan bantuan sebanyak 163.705 orang. Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

2. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 25 (dua puluh lima) Jenis PMKS di Klaten. 11 (sebelas) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 11) Komda Lansia.

Dari sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 25 (dua puluh lima) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi pada tahun 2020 sebanyak 172.857 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 144.140 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 10.433 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang. Sedang pada tahun 2021 menjadi sebanyak 168.291 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 138.176 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 12.218 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 5.561 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis: **Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM**, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Pemberdayaan Sosial;
3. Rehabilitasi Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Penanganan Bencana; dan
6. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

Permasalahan

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
- b. Meningkatnya kasus pengguna Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- c. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain; dan
- d. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial;
- c. Penguatan Posyandu Remaja untuk mencegah penggunaan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan
- d. Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

6. Sasaran Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisatoris tercatat sebanyak 26 (dua puluh enam) lembaga, namun kualitas dan kapabilitasnya belum memadai, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara

simultan oleh pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan karya-karya kepeloporan di bidang kepemudaan.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga** sebagaimana Tabel 2.25

Tabel 2.25
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	-13,2	10	17	170	60	170
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	3,7	5	28	560	30	93,33

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.25 sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2020 menjadi sebanyak 0 prestasi, dan pada tahun 2021 prestasi pemuda dan prestasi olahraga ada penghargaan yang diperoleh sekalipun dalam kondisi pandemi. Diantara cabang *prestasi* gemilang dengan merebut medali emas cabang *olah raga* tenis meja di ajang Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) XVI 2021, dan Khoirudin Mustakim peraih medali emas Kelas B Putra cabang pencak silat, Alvianto Bagas Prastyadi meraih perak di cabang panahan, sedangkan Irawan Guntur Aria Putra meraih perak cabang eksebisi sambo.

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir (tahun 2017-2021) jumlahnya relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas masih sangat rendah. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga masih kurang. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo. Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.26

Tabel 2.26
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	31	31	31	31	39
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	29	29	29	25	26
4.	Jml Cabang Olahraga)	Cabang Olahraga	35	35	35	35	39

Sumber : DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga**, diantaranya:

1. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan
2. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Permasalahan

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Program kepemudaan Pemerintah kurang menyentuh kebutuhan Usia produktif;
- b. Jiwa kewirausahaan pemuda masih rendah; dan
- c. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.

7. Sasaran *Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.*

Semenjak digulirkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah membawa semangat baru dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional. Setelah puluhan tahun merdeka, akhirnya Republik Indonesia memiliki sebuah panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 untuk memajukan kebudayaan. Hal ini sejalan pula dengan amanat Presiden Republik Indonesia agar memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. Sesuai undang-undang, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip,

adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya** sebagaimana Tabel 2.27

Tabel 2.27
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	12	-300	6	16,67	277,83	36	46,30
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	5	0	10	0	0	60	0

Sumber : DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2017-2021 dapat disajikan pada Tabel 2.28

Tabel 2.28
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	kegiatan	52	52	28	7	5
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Tempat	6	6	6	6	6

Sumber : DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Klaten diantaranya: 1. RSPD, 2. Monumen Juang, 3. TIC, 4. Pendopo Pemda, 5. GOR, dan 6. Sidoguro. Sedangkan promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a) Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten belum efektif dilaksanakan.

2. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Selama tahun 2017-2021 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.29

Tabel 2.29
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	36
3	Pemandangan Alam	buah	2	2	2	2	18
4	Museum	buah	1	1	1	1	1

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.29 sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2017-2020 tidak mengalami perkembangan, pada tahun 2021 mengalami penambahan jumlah makam sebanyak 32 dan pemandangan alam sebanyak 16.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengembangan Kebudayaan;
2. Pengembangan Kesenian Tradisional;
3. Pembinaan Sejarah;
4. Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya; dan
5. Pengelolaan Permuseuman.

Permasalahan:

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara dengan baik akan mengakibatkan *culture lag* (kemandegan budaya), dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa;
- b. Terbatasnya pengetahuan tentang sejarah, seni budaya dan tradisi sehingga penerapan nilai luhur budaya Jawa semakin berkurang;
- c. Belum semua para pelaku/pekerja seni dapat fasilitas dalam berekspresi mementaskan hasil karyanya;
- d. Belum ditetapkannya icon seni budaya asli Kabupaten Klaten;
- e. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran cagar budaya; dan
- f. Banyak benda yang diduga sebagai cagar budaya yang belum teridentifikasi untuk dilestarikan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

8. Sasaran Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;

Perpustakaan Umum Kabupaten Klaten semula digagas sebagai tempat pusat pembelajaran bersama dan diskusi, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Departemen P dan K Nomor: 510/1.UM/1971 tanggal 27 Juli 1971 perihal Pembentukan Perpustakaan "Sarana Pustaka" Klaten. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 1973 Bupati Klaten Soetijoso mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 11/066/SK/kdh/1973 Tentang Perubahan Perpustakaan Sarana Pustaka

Kabupaten Klaten di jadikan perpustakaan induk Kabupaten Klaten. Seiring dengan perkembangan waktu Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten diubah dengan penetapan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event Daerah, dan menawarkan berbagai layanan kreatif. Layanan kreatif yang dilakukan diantaranya: Ikut kegiatan Car free day, menyertai kegiatan kunjungan bupati, menambah koleksi perpus, dan meningkatkan jam layanan. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan** disajikan pada Tabel 2.30

Tabel 2.30
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	22,19	-64	5	-83,34	-1667	5	-1667

Sumber: DISPERSIP, Update per Januari 2022.

Pada Tahun 2021 jumlah perpustakaan desa sebanyak 79 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk merolling buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan minat baca masyarakat. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.31

Tabel 2.31
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	44.687	45.362	49.786	49.786	50.156
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	41.225	68.346	83.511	70.878	11.811

Sumber : DISPERSIP Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.31 sebagaimana tersebut di atas, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2020 sebanyak 70.878 orang, dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak 11.811 orang (atau turun 83,34%). Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.32

Tabel 2.32
Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2017	45
2	2018	45
3	2019	45
4	2020	45
5	2021	79

Sumber : DISPERSIP, Up date per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.32 sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2017-2021) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir sejumlah 79 desa dari 391 desa (atau baru 20,2%) dari jumlah desa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan** dengan Program Pembinaan Perpustakaan.

Permasalahan :

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

- a. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung;
- b. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan; dan
- c. Jumlah kunjungan masyarakat berkurang dikarenakan pandemi Covid-19.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengunjung perpustakaan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku; dan
- c. Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif.

9. Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;

Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien tercermin ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan terlihat sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah** sebagaimana Tabel 2.33

Tabel 2.33
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Tar get	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	77,55	78,06	87,36	78,06	89,35	87,36	89,35

Sumber: BKPSDM, Update per Januari 2022.

*) Catatan:

sementera dengan asumsi kinerja tahun 2020, mengingat tahun 2021 belum rilis.

Tuntutan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat. Capaian Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan pada Tabel 2.34

Tabel 2.34
Capaian Indeks Profesionalitas ASN

IPP	Unsur				Jumlah Nilai IPP
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	12,1	36,05	25	4,91	78,06

Sumber: BKPSDM, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja sebagaimana Tabel 2.34 di atas merupakan hasil dari penilaian berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diperoleh hasil, bahwa pada tahun 2020 nilai IPP mencapai 78,06 dengan (kategori tinggi). Indeks Profesionalitas ASN ini ditunjang dari unsur :

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran. Pada tahun 2019 jumlah ASN sebanyak 9877 orang, dengan rincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 63 orang (atau 0,64%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 226 orang (atau 2,29%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.531 orang (atau 15,50%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.610 orang (atau 16,30%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.884 orang (atau 59,57%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 563 orang (atau 5,70%). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang dengan rincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 53 orang (atau 0,59%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 202 orang (atau 2,25%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.339 orang (atau 14,89%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.403 orang (atau 15,61%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.443 orang (atau 60,55%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 550 orang (atau 6,12%).

b. Kompetensi

Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ sejenisnya.

Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.877 ASN pada tahun 2019 yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 353 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 63 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 56 orang. Atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan BinteK hanya berkisar 4,78%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang, yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 20 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 550 orang (atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan BinteK hanya berkisar 56,4%). Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat.

c. Kinerja

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

d. Disiplin

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah ASN yang melanggar disiplin sebanyak 10 (sepuluh) ASN, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus pelanggaran disiplin.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2021 untuk sasaran strategis: Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Kepegawaian Daerah; dan
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Permasalahan:

- a. Belum semua Pejabat Struktural mengikuti Diklat Struktural sesuai jenjangnya untuk tahun 2020 tidak ada pengiriman Diklatpim (Diklat Struktural) karena adanya pandemic Covid-19;
- b. Belum terisinya seluruh kotak jabatan (13%);
- c. Masih dalam kategori sedang nilai IP ASN (78,06);
- d. Belum optimalnya update data Kepegawaian (20%); dan
- e. Belum optimalnya pengembangan aparatur (4%).

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah;

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD. Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana Tabel 2.35

Tabel 2.35
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Opini BPK terhadap LKPD	WTP (3)	WTP (4)	WTP (4)	WTP (3)	WTP (4)	100	WTP (4)	100

Sumber: BPKPAD, Update per Januari 2022.

Catatan: Tidak Wajar (TD) Skor 1, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Skor 2, Wajar dengan Pengecualian (WDP) Skor 3), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Skor 4.

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.36

Tabel 2.36
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2016–2020

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2016	WDP	Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	Paragraf penjelas berupa: belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya Perangkat Daerah dan pengelolaan dana BOS.
2018	WTP	Paragraf penjelas berupa: pengendalian rekening pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.
2019	WTP	Paragraf penjelas berupa: 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2020	WTP	Paragraf penjelas berupa: 1. Belanja dana BOS tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp5,11 Milyar, diantaranya terdapat realisasi Belanja Honor bagi ASN senilai Rp3,83 Milyar dan terdapat realisasi Belanja Jasa Pihak Ketiga Non Konsultasi kepada ASN dan pegawai di sekolah senilai Rp1,28 Milyar. 2. Pengendalian pengelolaan dan penatausahaan persediaan serta sistem informasi persediaan belum memadai, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum melaksanakan penatausahaan dan pencatatan persediaan secara tertib dan sistem informasi persediaan pada OPD Puskesmas, instalansi Farmasi Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras belum memadai. 3. Penataan usaha dan pengamanan aset tetap pemerintah Kabupaten Klaten belum optimal diantaranya terdapat tujuh bidang tanah milik desa masih tercatat pada KIB A. 12 tanah dan 24 ruas jalan lingkungan belum masuk SK Bupati, serta terdapat aset tetap milik sekolah swasta dan SMA/SMK yang masih tercatat di Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.

Sumber: BPKPAD, Up date per Januari 2022.

*) Catatan: Opini BPK tahun 2021 dalam proses

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 2.36 di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2021, dengan penguatan Program diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
4. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Permasalahan:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan masih ditemukan beberapa temuan penggunaan keuangan Daerah yang efektif dan efisien; dan
- b. Penyajian laporan keuangan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten belum lengkap atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan

- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD** tahun 2021 sebagaimana Tabel 2.37

Tabel 2.37
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan
dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	91,31	100	90	81,82	90,91	85	96,26

Sumber: SET DPRD, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.37 sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2020 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 7 Raperda, dari 7 Raperda yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2021 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 9 Raperda, dari 11 Raperda yang direncanakan.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dalam mendukung pencapaian jangka menengah Daerah diukur dari jumlah Keputusan DPRD selama tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel 2.38

Tabel 2.38
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perda	18	28	15	7	9
2	Keputusan DPRD	38	49	39	21	27
3	Keputusan Pimpinan DPRD	18	9	4	2	3

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Keputusan Badan Anggaran	6	6	7	7	7
5	Keputusan Badan Musyawarah	12	13	13	13	13
Jumlah		92	105	78	50	59

Sumber: SET DPRD, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.38 Sebagaimana di atas, hasil pengukuran kinerja terhadap indikator jenis dan jumlah keputusan DPRD Kabupaten Klaten tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif terutama jumlah Perda yang disahkan tepat waktu, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD, hal ini disebabkan kondusivitas daerah, terutama pandemi Covid-19.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2021, dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

Permasalahan:

- a. Belum semua ASN mengikuti Diklat struktural dan fungsional untuk meningkatkan kualitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kinerjanya.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

12. Sasaran Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai road map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan perencanaan selalu

mengedepankan azas-azas pendekatan perencanaan, Yakni: diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan **nasional**. Berdasarkan misi jangka menengah Daerah ditetapkan sasaran strategis: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** sebagaimana Tabel 2.39

Tabel 2.39
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Tar get	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	Na	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BAPPEDALITBANG, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** pada tahun 2021, yang didukung perlunya **perencanaan** pembangunan Daerah yang wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung **data dan informasi pelaksanaan pembangunan**.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** pada tahun 2021, dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencanaan;

- b. Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja;
- c. Penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi; dan
- d. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencana;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja; dan
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung base line data dan informasi pembangunan yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung: Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

13. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD;

Tata Kelola arsip melalui inovasi program Titip Bandaku. Program yang dimaksud yakni menduplikasi arsip berharga milik warga dalam bentuk digital. Program itu digulirkan untuk memudahkan warga ketika arsip berharga milik warga dalam bentuk fisik rusak atau hilang terutama di daerah rawan bencana. Dinas Arpus menjamin keamanan dan kerahasiaan arsip dalam bentuk digital. Inovasi itu dibikin berkaca pada pengalaman erupsi Gunung Merapi 2010. Saat itu, banyak arsip warga yang rusak akibat terdampak erupsi Merapi. Lantaran tak memiliki salinan, warga kesulitan untuk mendapatkan kembali arsip berharga mereka seperti sertifikat tanah, ijazah, buku nikah, dan lain-lain.

Upaya Pemerintah kabupaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD** disajikan pada Tabel 2.40

Tabel 2.40
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	12,56	8,72	5	1,68	33,60	25	6,72

Sumber: DISPERSIP, Update per Januari 2022.

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah Daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 sebanyak 120.417 arsip, dan pada tahun 2021 sudah mencapai sebanyak 122.445 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.41

Tabel 2.41
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Arsip	buah	78.434	87.625	98.635	120.417	122.445

Sumber: DISPERSIP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.41 sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD** dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta memfaatkan **data dan informasi pelaksanaan pembangunan** yang terdokumentasikan/tersampaikan. Adapun untuk mencapai indikator **Tata Kelola Arsip SKPD** pada tahun 2021 didukung dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Arsip; dan
3. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan arsip Daerah; dan

- b. Terbatasnya ruang untuk penyimpan arsip, dan sebagian besar arsip belum terdigitalisasi.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN pengelola arsip; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

14. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang profesional, transparan dan akuntabel.

Di Kabupaten Klaten ada sebanyak 391 desa dengan jumlah RT 9.604 dan jumlah RW sebanyak 3.686. Sedangkan jumlah kelurahan ada 10 kelurahan dengan jumlah RT 374 dan RW 113. Disamping itu pada tahun 2021 tercatat jumlah Perangkat Desa sebanyak 2.610 orang, dan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2.703 orang, serta lembaga-lembaga desa lainnya untuk mendukung pencapaian kinerja pemerintahan desa. Dengan catatan data jumlah RT/RW berdasarkan data aplikasi Jogo Tonggo.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** disajikan pada Tabel 2.42

Tabel 2.42
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional,
Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)* 100
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	68	88	100	100	100	100	100

Sumber: DISPERMADES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.42 sebagaimana tersebut di atas, persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel mencapai 100% dimana dari jumlah desa sebanyak 391 desa sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa).

Guna pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel langkah yang ditempuh adalah dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penetapan APBDes yang tepat waktu dan peningkatan pembinaan PKK. Adapun perkembangan persentase peningkatan kapasitas pemerintahan desa tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.43

Tabel 2.43
Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas
Pemerintahan Desa Tahun 2017-2021

Tahun	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan (%)	Jumlah desa binaan PKK dalam satu Periode RPJMD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	35	31	39
2018	88,43	58,36	96,8
2019	75	59	66
2020	0	88	78
2021	0	100	91

Sumber: DISPERMADES, Update per Januari 2022.

*) catatan: pada tahun 2020 dan tahun 2021 kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ditiadakan karena adanya refocusing untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan Tabel 2.43 sebagaimana tersebut di atas, kinerja penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan kinerja, dilihat dari cakupan Desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan pada tahun 2020 baru 88% dan pada tahun 2021 sudah mencapai 100 %.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat pelaksanaan pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pelestarian kegiatan. Capaian kinerja Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel didukung dengan program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Administrasi Pemerintahan Desa; dan
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Permasalahan:

- a. Masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa;

- c. Belum optimalnya pengelolaan aset desa;
- d. Masih rendahnya kualitas perangkat desa; dan
- e. Potensi PKK belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kawasan perdesaan.

Solusi:

- a. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi; dan
- c. Peningkatan peran PKK dalam pengembangan potensi kawasan perdesaan.

15. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai Road Map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benefite akan kelihatan progres capaiannya.

Untuk mendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** upayakan yang dilakukan adalah dengan mendorong transparansi penggunaan anggaran dengan penguatan pengawasan rencana pembangunan yang ketat, disamping perlunya laporan pada para pihak tepat waktu.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** sebagaimana Tabel 2.44

Tabel 2.44
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	3	100	3	100
2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3	100	3	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89 (C)	60,33 (B)	61,32 (B)	70 (BB)	62,07 (B)	88,67	70 (BB)	88,57

Sumber: ITDA dan SETDA, Update Januari 2022.

Catatan : SPIP dirilis terakhir pada tahun 2019, dan APIP tahun 2020.

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 26 November 2019 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 3.

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;

3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.
5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2019 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan Quality Assurance (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15. Akhirnya berdasarkan hasil Quality Assurance dari BPKP Pusat tertanggal 26 November 2019, Kabupaten Klaten dinyatakan telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP.

3. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan Quality Assurance (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (quality Assurance) dari BPKP Pusat baru mencapai Level 2+, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 2.45

Tabel 2.45
Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten

No	Elemen	Level
(1)	(2)	(3)
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan	3
6	Struktur Tata Kelola	3

Sumber: ITDA, Update Per Januari 2022.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Insititute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation yaitu Internal Audit Capability Model (IA-CM). Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; serta Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Tabel 3.39. sebagaimana tersebut di atas, penyebab belum tercapainya Level 3, diantaranya:

- a. Inspektorat belum mempunyai SDM yang berkualifikasi sebagai Perencana Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) disebabkan Inspektorat belum menginternalisasi peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kerangka kmpmetensi (KPA tersedianya Staf APIP yang berkualifikasi profesional pada elemen 2);
- b. Inspektorat belum menilai keakuratan hasil penilaian risiko (risk register) OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk penyusunan PPBR.

Selanjutnya berdasarkan nilai Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang masih pada level 2, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan penilaian mandiri ke BPKP DIY untuk mendapatkan QA, dan diajukan ke BPKP Pusat untuk direviu. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil reviu (LHR) dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019, tertanggal 26 Desember 2019 dinyatakan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah berada pada level 3, sebagaimana Tabel 2.46

Tabel 2.46
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten

No	Elemen	Hasil SA	Hasil QA	Hasil Reviu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peran dan Layanan	3	3	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	3	3
3	Praktik Profesional	3	3	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3
5	Budaya dan Hubungan	3	3	3
6	Struktur Tata Kelola	3	3	3

Sumber: ITDA, Update per Januari 2022.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan Mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan nilai 66, namun terealisasi 61,32 (dengan Kategori B). Perolehan skor 61,32 dengan kriteria sedang, dan pada tahun 2020 meningkat dengan nilai 62,07 (B).

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 62,07 atau dengan predikat B. Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:
 - Perencanaan kinerja nilai 20,79
 - Pengukuran kinerja nilai 15,16
 - Pelaporan kinerja nilai 10,34
 - Evaluasi internal nilai 5,29
 - Capaian kinerja nilai 10,49
2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas

- kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.
4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;
 - a) Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
 - b) Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.
- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a) Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b) Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian reward and punishment dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 4 (empat) program, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi; dan
4. Administrasi Umum.

Permasalahan :

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
- b. Proses perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;

- c. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan
- d. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi :

- a. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan;
- b. Mensinergikan/mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten; dan
- d. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mempertahankan opini WTP atas opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai road map untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga output, outcome dan benedite akan kelihatan progres capaiannya. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi Daerah yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten adalah menetapkan target sasaran: **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah** dengan capaian disajikan pada Tabel 2.47

Tabel 2.47
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,2109	3,2109	3,1	3,2109	103,58	3,1	103,58

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

Catatan: Rilis dari Kemendagri terakhir kondisi tahun 2019, penilaian tahun 2019 terhadap LPPD tahun 2018

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2017–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2019 dengan **skor 3,2109** tergolong **sangat tinggi** dan nilai tersebut merupakan nilai laporan tahun 2018, sedangkan tahun 2020 dan tahun 2021 nilainya belum dirilis dari Kementerian Dalam Negeri. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/desk dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.
- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**, dan program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah dengan dukungan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diinisiasi oleh Setda Bagian Pemerintahan, sedangkan dari unsur kewilayahan di kecamatan dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

4. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Permasalahan :

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

17. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;

Masalah HAM dan penegakan peraturan perundang-undangan seolah selalu memunculkan ketidak-pastian. Misalnya, munculnya pandemi covid-19 mendorong masalah hak asasi manusia (HAM), karena dianggap menghambat ruang gerak masyarakat. Ada sementara yang menganggap covid-19 telah banyak memberikan hambatan yang membatasi mobilitas masyarakat. Oleh karena itu perlu ada ruang gerak kegiatan yang konkrit, yakni forum untuk menyelesaikan hak masyarakat yang terdampak pandemi covid-19.

Peran masyarakat luas menjadi sangat penting dalam kaitannya menangani hak asasi manusia akibat pandemi covid-19. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penanganan pandemi covid-19, bukan sekedar membatasi mobilitas penduduk, akan tetapi agar masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya hidup dalam situasi new-normal. Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM** sebagaimana Tabel 2.48

Tabel 2.48
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya
Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta
Bantuan Hukum dan HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	83	90	90	100	111,11	90	111,11
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	90	95,7	90	95,7 (A)	106,33	90	106,33

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

1. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara

Pada tahun 2020 produk hukum yang terealisasi sebanyak 5 peraturan daerah dan 73 Peraturan Bupati, dan jumlah perkara yang ditangani sebanyak 10 perkara. Sedangkan pada tahun 2021 ditargetkan sebanyak 350 Dokumen terdiri dari: 11 Propem Perda, 60 Perbup dan SK sebanyak 279. Target perkara yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 6 perkara.

Sedangkan realisasi Produk Hukum Daerah pada tahun 2021 sebanyak 7 Peraturan Daerah, 78 Peraturan Bupati dan 250 Surat keputusan Bupati dan realisasi penanganan perkara sejumlah 15 perkara.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM. Namun pada tahun 2021 Indeks Kabupaten Peduli HAM ditiadakan karena masa pandemi Covid-19, sehingga Indeks Kabupaten Peduli HAM tahun 2021 menggunakan indeks tahun 2020 dengan nilai 95,7 atau dengan kategori A (Sangat Peduli).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara** di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran dengan program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Permasalahan:

- a. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.

- b. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.
- c. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: yuridis, sosial dan filosofinya.

Solusi:

- a. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.
- b. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
- c. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.

18. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Upaya pengendalian dilakukan secara rutin, bulan/triwulan/semesteran/tahunan untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan dilaksanakan sesuai tahapan yang telah ditentukan, dan mengurangi tingkatan deviasi dan menjamin efektivitas capaian kinerja.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan** sebagaimana Tabel 2.49

**Tabel 2.49
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	81	100	90	96	106,67	90	106,67

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi “Senenan” dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 program dengan 2.157 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana dengan rencana anggaran sebanyak Rp806.643.941.344,- dan terserap sebesar Rp667.040.959.363,- (atau 82,66%). Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 330 program (berdasarkan jumlah program yang ada OPD) dengan 700 kegiatan dan subkegiatan 1777. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana 90%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp2.949.643.677.710,- dan terserap sebesar Rp2.493.406.881.542,- (atau 84,53%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**, dengan Program Perekonomian dan Pembangunan.

19. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Beberapa perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain dalam Pasal 65 yang mengatur mengenai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perubahan juga dilakukan pada Pasal 66 yang mengatur mengenai Kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh persen).

Untuk mewujudkan sasaran Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel** sebagaimana Tabel 2.50

Tabel 2.50
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%) (10)=(7)/(9)*100
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: SETDA, Update Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan: Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 134 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dan yang selesai sebanyak 110, gagal lelang sebanyak 13 usulan, 11 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 139 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan yang selesai sebanyak 134 pengadaan barang dan jasa yang diusulkan, yang gagal tender sebanyak 4 dan 1 paket pekerjaan dikembalikan ke OPD.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel dilakukan secara transparan, dengan dukungan Program Perekonomian dan Pembangunan.

20. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan;

Untuk menciptakan pelayanan kehumasan dan keprotokolan sesuai Standar Norma Presedur, dan Kreteria (NPSK), maka perlu dipertegas tugas dan fungsinya dalam hal:

- melaksanakan tata **protokoler** dalam rangka penyambutan tamu pemerintah daerah;
- menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
- menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase

dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan** sebagaimana Tabel 2.51

Tabel 2.51
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90/1200	98	99,42	100	100	100	100	100
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	98	98,16	100	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100/125	98	99,86	100	100	100	100	100

Sumber: SETDA, Update Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam **Meningkatkan Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan**, pada tahun 2021, diantaranya:

1. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah

Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah pada tahun 2020 yang direncanakan sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1710 (atau 99,42%). Sedangkan pada tahun 2021 yang direncanakan sebanyak 1.720 dan terealisasi sebanyak 1.720 (atau 100%).

2. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah

Pada tahun 2020 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 355 (atau 98,61%). Sedangkan pada tahun 2021 dokumen kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 360 (100%).

3. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah

Pada tahun 2020 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 450 dan terealisasi sebanyak 445 (atau 98,89%). Sedangkan pada tahun 2021 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 450 dan terealisasi sebanyak 450 (atau 100%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan** untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dilakukan dengan Program Administrasi Umum.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen cerita historis Pemerintahan, baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.

21. Sasaran Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;

Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID merupakan tim yang bertugas memantau dan menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan inflasi khususnya di daerah. Tim pengendalian inflasi di tingkat pusat sendiri sudah ada sejak tahun 2005. “Inflasi atau gejolak kenaikan harga menjadi faktor penting dalam perekonomian, karena inflasi yang tak terkendali bisa membuat kondisi dan stabilitas ekonomi terganggu.” Menyadari pentingnya peran dan keberadaan Tim Pengendalian Inflasi di tingkat pusat dan daerah maka pada tahun 2008 di lakukan pembentukan TPID dengan dukungan dari berbagai kalangan khususnya daerah. Harapan dari keberadaan TPID adalah memantau sedini mungkin ancaman inflasi di suatu daerah dan mencari solusi terhadap permasalahan tersebut. Keberadaan TPID ini menjadi penting dan efektif karena daerah menyumbang 60% dari faktor penyusun inflasi (BPS).

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian** sebagaimana Tabel 2.52

Tabel 2.52
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan
Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Tingkat Inflasi YoY	2,57	2,64	1,38	3,5 (± 1)	2,58	73,71	3,5 (± 1)	73,71

Sumber: SETDA, Update Januari 2022.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2017-2021 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 sebesar 2,6%, atau lebih rendah dibanding dibanding angka inflasi Jawa Tengah maupun Nasional, namun sebaliknya pada tahun 2021 angka inflasi Klaten lebih tinggi Jawa Tengah maupun Nasional, hal ini karena pengaruh pandemi covid-19. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan stabilnya harga komoditas. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar 2.18

Gambar 2.18
Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, Update Per Januari 2022.

Berdasarkan gambar 2.18 di atas, laju inflasi selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2021 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 2,58% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk memantau kondisi pasar.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Fasilitas dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian** dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui Program Perekonomian dan Pembangunan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat "linier" tidak "given" atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan

2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejolak harga yang dimungkinkan terjadi.

22. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

Pembangunan kesejahteraan sosial perlu dipahami sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan kesejahteraan sosial turut memberi kontribusi nyata dalam mencapai program pembangunan nasional, yakni pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan kelestarian lingkungan. Agar kinerja kesejahteraan sosial efektif, maka perlu dilakukan Reinventing mulai dari penataan desain dan manajemen program (terutama program penanggulangan kemiskinan), sumber daya manusia dan alokasi anggaran, serta pengendalian dari pusat hingga ke daerah.

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat** sebagaimana Tabel 2.53

Tabel 2.53
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra	90	90	95	95	95	100	95	100

Sumber: SETDA, Update per Januari 2022.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2020 capaian indikator Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra sebanyak 95 %, dan pada tahun 2021 capaian kinerjanya 95%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat** untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

23. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindak-lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah** sebagaimana Tabel 2.54.a

Tabel 2.54.a
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang
dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	10,98	12,6	10,87	86,27	12,6	86,27

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non

Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.54.b

Tabel 2.54.b
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020

No	Kecamatan	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	6,2401	4,8938	1,1598	0	0,1865	6,2401
2	Gantiwarno	0,3049	0,3049	0	0	0	0,3049
3	Wedi	1,2655	1,0455	0	0	0,2200	1,2655
4	Bayat	1,5360	1,5360	0	0	0	1,5360
5	Cawas	1,4323	1,0367	0	0	0,3956	1,4323
6	Trucuk	1,0909	0,8744	0,1965	0	0,0200	1,0909
7	Kalikotes	0,8770	0,8770	0	0	0	0,8770
8	Kebonarum	1,0576	1,0254	0,0322	0	0	1,0576
9	Jogonalan	3,0291	2,3517	0,6774	0	0	3,0291
10	Manisrenggo	0,5710	0,5710	0	0	0	0,5710
11	Karangnongko	0,2913	0,2913	0	0	0	0,2913
12	Ngawen	1,6694	1,6694	0	0	0	1,6694
13	Ceper	8,1483	3,0174	4,9491	0	0,1818	8,1483
14	Pedan	1,8115	1,7869	0,0246	0	0	1,8115
15	Karangdowo	1,2128	1,2008	0	0	0,0120	1,2128
16	Juwiring	2,2360	1,6907	0,5453	0	0	2,2360
17	Wonosari	5,3325	4,0268	1,3057	0	0	5,3325
18	Delanggu	4,9686	4,8386	0,1300	0	0	4,9686
19	Polanharjo	1,3451	1,1936	0,0909	0,0606	0	1,3451
20	Karanganom	4,7212	4,0590	0,6622	0	0	4,7212
21	Tulung	1,3996	1,0666	0,3330	0	0	1,3996
22	Jatinom	1,7253	1,6935	0	0,0318	0	1,7253
23	Kemalang	25,4459	0,0220	0	25,4239	0	25,4459
24	Klaten Selatan	8,4121	8,4121	0	0	0	8,4121
25	Klaten Tengah	3,4641	3,2521	0	0	0,2120	3,4641
26	Klaten Utara	3,5921	3,3666	0,2255	0	0	3,5921
	Jumlah	93,1802	56,1038	10,3322	25,5163	1,2279	93,1802

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Catatan: Data 2021 belum rilis.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.55

Tabel 2.55
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Jenis Komoditas	2017		2018		2019		2020		2021	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)
1	Padi	74.964	73.962	76.029	73.627	74.964	73.962	73.266	70.916	73654	73.313,30
2	Jagung	11.713	11.085	9.682	9.549	11.713	11.085	12.430	11.087	10746	10.966,70
3	Kedelai	2.562	2.234	1.935	1.523	2.562	2.234	561	544	1468	1275
4	Kacang Tanah	955	909	1.224	1.067	955	909	855	876	710	713,90
5	Kacang Hijau	240	228	350	299	240	228	1978	1843	1043	1042,40
6	Ubi Kayu	435	395	822	685	435	395	1193	997	958	625,40
7	Ubi Jalar	26	21	24	20	26	21	27	25	21	19,50

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.56

Tabel 2.56
Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2017-2021

No	Jenis Komoditas	2017		2018		2019		2020		2021	
		Produksi (Ton)	Provi tas (Kwt/ha)	Pro duksi (Ton)	Provi tas (Kwt/ha)	Pro duksi (Ton)	Provi tas (Kwt/ha)	Pro duksi (Ton)	Provi tas (Kwt/ha)	Pro duksi (Ton)	Provi tas (Kwt/ha)
1	Padi	380.268	51,41	426.028	57,87	380.268	51,41	449.093	63,33	480.024	65,58
2	Jagung	90.343	81,50	72.583	74,97	90.343	81,50	99.088	89,38	88.538	80,73
3	Kedelai	4.440	19,87	2.759	18,12	4.440	19,87	1.040	19,12	1.998	15,67
4	Kacang Tanah	1.527	16,79	1.784	14,58	1.527	16,79	1.158	13,21	1.087	15,23
5	Kacang Hijau	285	12,50	260	8,72	285	12,50	1.985	10,77	1.542	14,79
6	Ubi Kayu	9.778	224,99	32.224	392,11	9.778	224,99	27.296	273,81	15.155	242,32
7	Ubi Jalar	251	119,28	356	143,55	251	119,28	333	134,77	266	136,66

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 2.55 dan Tabel 2.56 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan tehnologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.57

Tabel 2.57
Produksi Perkebunan Tahun 2017-2021

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tembakau Rajangan	1.233,527	1.147,27	1.750,30	1.558,79	1.567,45
2	Tembakau Asepan	1.070,724	1.037,05	2.595,30	2.308,72	1.270,83
3	Tembakau Vorstenland	239,455	135,535	55,144	-	-
4	Kelapa Dalam	4.697,582	3.976,64	4.048,189	4.322,36	3.674,01
5	Kelapa Hibrida	45,60	49,073	29,340	29,94	26,95
6	Kelapa Deres	98,74	87,149	87,15	78,84	63,07
7	Kopi Arabica	81,320	43,32	43,320	162,20	145,98
8	Kopi Robusta	9,990	9,82	9,82	12,94	36,46
9	Cengkeh	45,630	36,5	36,5	49,75	237,73
10	Lada	12,110	9,78	11,4	17,70	19,50
11	Tebu	3.258,940	3.258,9	3.195,972	2.902,922	2.882,673

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 2.57 sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 1.750,30 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.58

Tabel 2.58
Populasi Ternak Tahun 2017-2021

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi Potong	88.850	100.259	102.431	104.312	105.734
2	Sapi Perah	6.098	6.284	6.433	6.807	6.783
3	Kambing	88.957	9.596	101.402	105.782	108.932
4	Domba	38.570	45.204	46.963	47.562	51.278
5	Ayam Bukan Ras	3.256.177	2.245.443	2.532.676	2.109.668	2.789.664
6	Ayam Pedaging	3.385.400	2.475.187	3.896.788	2.489.800	3.268.129
6	Ayam Petelur	930.234	746.422	832.764	900.342	784.621
7	Itik	575.100	425.473	430.329	397.012	213.877
8	Burung Puyuh	452.332	519.566	535.244	363.563	327.829

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 2.58 sebagaimana tersebut di atas, Populasi jenis Ayam Bukan Ras dan Ayam Pedaging mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 jumlah Ayam Bukan Ras sebanyak 2.109.668 ekor, dan pada tahun 2021 naik menjadi sebanyak 2.789.664 ekor (atau naik 32,23%), begitu juga dengan Ayam Pedaging,

pada tahun 2020 sebanyak 2.489.800 ekor, dan pada tahun 2021 naik menjadi sebanyak 3.268.129 ekor (atau naik 31,26%). Sedangkan produksi peternakan Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.59

Tabel 2.59
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2017-2021

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Susu (Liter)	5,903,181	4,266,718	4.978.442	4.456.373	4.630.000
2	Daging Sapi Potong (Kg)	2,963,800	584,220	2.010.393	1.897.720	2.267.819
3	Telur (Butir)	570,571,719	130.992.000	154.784.416	154.567.112	123.875.702

Sumber: DKPP, Update per Januari, 2022.

Berdasarkan Tabel 2.59. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur, diperoleh kondisi pada tahun 2021, untuk produksi susu dan daging sapi potong mengalami kenaikan sedangkan produksi telur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 .

Pada tahun 2021 produksi susu naik sebanyak 173.627 liter dibanding tahun 2020 (naik 3,90%), produksi daging naik sebanyak 370.099 kilogram dibanding tahun 2020(naik 19,50%) dan produksi telur turun sebanyak 30.691.410 butir dibanding tahun 2020 (turun 19,86%). Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berakibat tingginya tingkat kematian ayam.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada tahun 2021 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

- a. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e. Penyuluhan Pertanian;
- f. Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- g. Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- h. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- i. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;

- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program-program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani;
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satuan Kerja (Satker) dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan;
- j. Belum beragam tingkat konsumsi pangan; dan
- k. Menurunnya produktivitas perikanan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas-varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (back to nature);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (intellectual property right) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

24 Sasaran Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa.

Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan** disajikan pada Tabel 2.60

Tabel 2.60
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam
Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9) *100
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	39	42	58	57,69	99,47	58	99,47

Sumber: DISPERMASDES, Update per Januari 2022.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2017-2021 mengalami peningkatan karena adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2017 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Tahun 2021 jumlah BUMDes sebanyak 389 di Kabupaten Klaten.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.61

Tabel 2.61
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	156	41	3
2018	246	41	3
2019	300	41	3
2020	357	41	41
2021	389	41	41

Sumber: DISPERMASDES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.61 sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.62

Tabel. 2.62
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa Kebon dan Desa Gunung Gajah, Bayat 3. Pelatihan Hidropo nik Pemanfaatan	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manis renggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Kranggan, Kec Manis renggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Taskom	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karang anom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karang, Kec. Karang anom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karang anom, Kec.	Karena refokusing tidak ada kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.	Pelatihan TTG berbasis sumber alam desa menuju ketahanan pangan dan pemulihan ekonomi berbasis pengelo laan sampah Ds. Kranggan Kec. Polanharjo

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
		TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	bang, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo	Karang anom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karang anom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahuman, Kec. Ngawen		
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	1. Posyantek antar desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk		

Sumber: DISPERMASDES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.62 sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26 Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Administrasi Pemerintahan Desa; dan
2. Peningkatan Kerjasama.

Permasalahan:

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.

25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata;

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata** sebagaimana Tabel 2.63

Tabel 2.63
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Tar get	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	31,96	-55,88	25	3,22	12,87	100	3,22

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.63 sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2020 sebanyak

Rp8.530.240.214,- dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak Rp8.804.783.428,- (atau naik sebanyak 3,22%). Namun belum memenuhi target, karena masih dalam kondisi pandemi.

Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.64

Tabel 2.64
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500
2021	82	Na	Na	1	1	Na	Na

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.64 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2020 untuk wisatawan nusantara sebanyak 1.399.167, sedangkan untuk wisatawan mancanegara sebanyak 22.199. Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 karena hal ini disebabkan masih masa pandemi covid-19. Jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2017-2020 didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp350.000,- sampai Rp1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp500.000,- sampai Rp2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.65

Tabel 2.65
Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD total (%)	1,86	2,19	4,03	2,59	2,93
Total PAD	371.718.439.304	395.884.244.135	311.648.401.655	329.963.261.898	300.013.085.037
PAD Sektor Pariwisata	6.895.508.782	8.668.908.216	12.569.036.829	8.530.240.214	8.804.783.428
Pajak	5.640.335.782	7.454.495.216	10.184.639.829	7.478.277.694	7.967.183.669
Pajak Hotel	1.034.439.307	1.114.743.863	1.330.988.059	730.525.400	889.869.463
Hotel Bintang 3	822.003.046	871.100.135	1.020.244.671	587.067.925	762.651.635
Hotel Melati/Motel	212.436.261	243.643.728	310.743.388	143.457.475	127.217.828
Pajak Restoran	3.648.921.191	5.385.531.695	7.121.660.015	6.270.989.397	6.786.815.356
Rumah Makan	1.468.255.029	1.838.547.695	2.073.823.349	1.916.032.221	2.777.678.048
Catering	2.180.666.162	3.546.984.000	5.047.836.666	4.354.957.176	4.009.137.308
Pajak Hiburan	956.975.284	954.219.658	1.731.991.755	476.762.897	290.498.850
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	432.257.534	206.144.658	318.541.880	19.419.537	23.754.600
Permainan Ketangkasan	225.203.750	224.998.625	550.467.500	222.192.310	145.883.750
Pajak Hiburan/Pertandingan Olahraga	299.514.000	523.076.375	862.982.375	235.151.050	108.790.500
Pajak Panti Pijat, Spa, Fitness Center					12.070.000
Retribusi	1.255.173.000	1.214.413.000	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759
Retribusi Objek Wisata	1.255.173.000	1.214.413.000	2.384.397.000	1.051.962.520	837.599.759

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022

Berdasarkan Tabel 2.65 sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2020 sebanyak Rp8.530.240.214,- dan pada tahun 2021 menjadi sebanyak Rp8.804.783.428,- (atau naik sebanyak 3,22%).

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.66

Tabel 2.66
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganyam
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karanganyam
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karanganyam
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41.	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42.	WatuPrahu Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43.	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44.	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45.	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46.	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47.	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
48	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko
50	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom
55	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59	Ponggok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60	Susur Kali Pusur	Alam	Kec. Tulung
61	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: DISBUDPORAPAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.66 sebagaimana tersebut di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 66 (enam puluh enam) OW, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanyapun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

Permasalahan :

- Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata;
- Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata;
- Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- Masih terbatasnya penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi :

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;

Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan.

Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UMKM.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM** sebagaimana Tabel 2.67

Tabel 2.67

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB*)	18,74	19,98	19,98	19,38	19,98	103,1	19,38	103,1
2	Persentase UMKM yang memiliki daya Saing	5	11,45	11,8	15	12	80	15	80

Sumber: DKUKMP, Update per Januari 2022.

Catatan: *) angka sementara menggunakan tahun 2020

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2021 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB belum rilis, sehingga masih data tahun 2020. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ini ditunjang adanya pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola kluster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu

mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

Disamping itu, tumbuhnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ditunjang adanya peningkatan nilai investasi PMDN. Pada tahun 2020 tercatat nilai investasi PMDN sebanyak Rp698.896.464.253,- dan PMA sebanyak 66.100.000.000 US\$, sedangkan pada tahun 2021 tercatat nilai investasi PMDN sebanyak Rp1.377.467.139.785,- dan PMA sebanyak Rp277,129.545.937,- US\$.

2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 55.100 UMKM, namun dari sebanyak 55.100 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.500 UMKM (atau 11,8%). Sedangkan pada 2021 tercatat sebanyak 55.500 UMKM, dan yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.660 UMKM (atau 12%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM diantaranya dengan program:

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
2. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Pengembangan Ekspor;
5. Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
6. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.
- g. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- h. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan

- i. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL.

27. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah;

Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah** sebagaimana Tabel 2.68

Tabel 2.68
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	105	85	100	85,3	85,3	100	85,3

Sumber: BAPPEDALITBANG, Update per Januari 2022.

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2021 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan sebanyak 29 kebijakan dari jumlah inovasi yang diusulkan sebanyak 34 atau sebesar 85,3%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2021, program

yang dilaksanakan untuk sasaran strategis inovasi yang diterapkan dengan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan program lainnya.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk inovasi serta kurang berkembangnya kerjasama inovasi Daerah; dan
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk inovasi Daerah dengan membuka kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.

28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;

Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal** sebagaimana Tabel 2.69

Tabel 2.69

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/ PMA):								
	PMDN	189	19	3	483	8	1,66	2.433	0,34
	PMA	46	139	12	294	231	78,57	1.764	13,10
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/								

	PMA):								
	PMDN	1,75	733	-79	2,50	97	3880,00	12,74	761,38
	PMA	2,25	272	-59	2,55	319	12509,80	14,70	2170,07

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021, disajikan pada Tabel 2.70

Tabel 2.70
Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2017-2021

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/Penurunan (%)
2017	10.257.000	138.469.500.000	43	61	247.327.500.000	41	68
2018	3.091.400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-64
2021	19.794.968	277.129.545.937	18	419	1.377.467.139.785	3984	97

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.70 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2017-2021 bersifat fluktuatif, pada tahun 2020 nilai investasi PMA sebesar 4.721.429 US\$, tahun 2021 naik menjadi sebesar 19.794.968 US\$ (atau naik 419%). Begitu juga pada tahun 2020 nilai investasi PMDN sebesar Rp698.896.464.253,- pada tahun 2021 naik menjadi Rp1.377.467.139.785,- (atau naik 97%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infrastruktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.71

Tabel 2.71
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	41	67	870	4743	3.984
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.781	1.793	16.772	12.980	32.845
3	Nilai Investasi (Rp. 000)	Rp.	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766	698.896.464	1.377.467.139.785

Sumber: DPMPSTP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.71 sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten tahun 2020 nilai investasi sebesar Rp698.896.464.000 dan tahun 2021 nilai investasi sebesar Rp1.377.467.139.785.000.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.72

Tabel 2.72
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	43	39	15	5	18
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	79	561	2.087	59	4153
3	Nilai Investasi	(US \$)	10.257.000	3.091.400	11.490.893	4.721.429	19.794.968

Sumber: DPMPSTP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.72 sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2020 nilai investasi sebesar 4.721.429 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 19.794.968.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran; Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal didukung dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan Penanaman Modal;
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Tingginya harga tanah untuk pengembangan dan penanaman investasi.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional; dan
- b. Mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

29. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas, dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan;

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: **Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas, dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan** disajikan pada Tabel 2.73

Tabel 2.73
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	1	0,96	1,08	0,76	70,37	1,08	70,37
2	Angka partisipasi angkatan kerja	87,79	81	98,79	69	86,94	126,00	69	126,00

Sumber: DISPERSAKER, Update per Januari 2022.

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 639.217 jiwa dan yang bekerja sebesar 616.528 orang, dan rasio penduduk yang bekerja sebanyak 0,96 %. Sedangkan pada tahun 2021 menjadi

jumlah angkatan kerja sebanyak 918,244 jiwa dan yang bekerja sebesar 699.520 orang, dan rasio penduduk yang bekerja sebanyak 0,76%

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2020 sebesar 98,79%, dan pada tahun 2021 sebesar 86,94% (atau turun 11,85%). Sehingga masalah angkatan kerja yang perlu mendapat perhatian besar adalah soal penyerapan kerja. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatkan dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan dengan dukungan program:

- 1) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Perencanaan Tenaga Kerja;
- 3) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- 4) Penempatan Tenaga Kerja; dan
- 5) Hubungan Industrial.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja belum bisa menampung kebutuhan pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;

j. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis database ketenagakerjaan secara online.

30. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;

Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan** disajikan pada Tabel 2.74

Tabel 2.74
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	71,48	43,12	88,2	59,91	67,93	25,5	231,76

Sumber: DISPERNAKER, Update per 2022.

Berdasarkan Tabel 2.74, sebagaimana tersebut di atas pada tahun 2020 jumlah peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 51.892 peserta dan jumlah pekerja atau buruh sebanyak 120.343 orang atau sebesar 43,12%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah peserta BPJS menjadi sebanyak 74.273 peserta dan jumlah pekerja atau buruh 123.979 orang atau sebesar 59,91%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran **Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan** didukung dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
4. Penempatan Tenaga Kerja; dan
5. Hubungan Industrial.

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

- a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;

- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja; dan
- d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;

Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah.

Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian** sebagaimana Tabel 2.75

Tabel 2.75
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	37,00	37,00	35,2	35,2	100	35,2	100
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	7,6	3,54	7,50	7,90	105,33	7,5	160

Sumber: DISPERNAKER, Update per Januari 2022.

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB pada tahun pada tahun 2020 sebesar 37,00%, sumbangan ini ditunjang dari nilai investasi sebanyak 66.100.000.000US\$. Dan nilai PMDN sebanyak Rp698.896.464.253,-

Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 35,2% ditunjang dari nilai PMA 19.794.968 US\$, dan PMDN sebanyak Rp1.377.467.139.785,-

2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2020 jumlah IKM sebanyak 8.335 IKM dan mempunyai daya saing mencapai 3,54 %, sedangkan pada tahun 2021 jumlah IKM menjadi sebanyak 8.344 IKM dan mempunyai daya saing 7,86%.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri diantaranya dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
3. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

32. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah: Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan

jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat** disajikan pada Tabel 2.76

Tabel 2.76
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Tar get	Reali sasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks layanan infrastruktur	26,27	60,87	60,87	40,81	40,38	98,95	40,81	98,95

Sumber: DPUPR, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja Indeks Layanan Infrastruktur pada tahun 2021 sebesar 40,38% dan pada tahun 2020 sebesar 60,87%. Mengalami penurunan sebesar 20,49%, hal ini dikarenakan anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase *direfocusing*.

Program pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat, diantaranya:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Pengembangan Permukiman;
8. Penataan Bangunan Gedung;

9. Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
10. Penyelenggaraan Jalan;
11. Pengembangan Jasa Konstruksi;

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat karena tonase dan kelas jalan, kurangnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

33. Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan;

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan** disajikan pada Tabel 2.77

Tabel 2.77
Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas manajemen Rekayasa lalu lintas dan Penyelenggaraan Angkutan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	45,87	69,83	57,52	87,01	151,27	57,52	151,27

Sumber: DINAS PERHUBUNGAN, Update per Januari 2022.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat dari tahun lalu (tahun 2020) 69,83% menjadi 87,01% pada tahun 2021. Capaian kinerja ini didukung adanya kinerja anggaran dan tingkatan efektifitas pelaksanaan kegiatan selama ini.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan sebagaimana tersebut di atas, didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 2.78

Tabel 2.78
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2017-2021

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	9.622	8.878	8.591	8.072	8.018
02 Mobil Bus					
* Umum	397	384	408	391	205
Bus Besar	65	97	88	91	20
Bus Sedang	261	248	268	215	145
Bus Kecil	71	39	52	85	40
* Bukan Umum	105	111	117	97	332
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	6	10	21	7	7
Jumlah	10.527	9.383	9.137	8.567	8562

Sumber : DINAS PERHUBUNGAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.78 sebagaimana tersebut di atas, jumlah sarana angkutan (umum dan pribadi) pada tahun 2020 sebanyak 8.567 sedangkan pada

tahun 2021 menurun menjadi 8.562. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.79

Tabel 2.79
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	1950 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3120 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	2729 m ²
4	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	A	25840 m ²
5	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	B	8545 m ²
6	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1668 m ²

Sumber : DINAS PERHUBUNGAN, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.79 sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 6 (enam) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan, dilaksanakan dengan program:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Permasalahan:

- a. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal;
- b. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C);
- c. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya;
- d. Masih minimnya jumlah Traffic Light ATCS yang telah terkoneksi dengan CC Room;
- e. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Restribusi Daerah;
- f. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal; dan
- g. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.

34. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 2.80

Tabel 2.80
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	57,71	53,76	74,05	74,4	74,4	100	74	100

Sumber: DISPERAKIM, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman** di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2)

penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Penanganan RTLH sebanyak 3.158 unit.

Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran: Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman terdiri dari 4 (empat) program, diantaranya:

- a. Pengembangan Perumahan;
- b. Kawasan Permukiman;
- c. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
- d. Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni;
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

35. Sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang;

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Hal inilah yang menjadi pijakan pengendalian dan

pemanfaatan ruang. Adapun capaian sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan** sesuai dengan konsep tata ruang sebagaimana Tabel 2.81

Tabel 2.81
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	79,6	80	80,5	100,63	80,00	100,63

Sumber: DPUPR, Update per Januari 2022.

Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, untuk mengimplementasikan hal ini pada tahun 2020 ketaatan terhadap RTRW mencapai 79,6%, dan pada tahun 2021 menjadi sebesar 80,5%. Hal ini disebabkan karena adanya upaya untuk mewujudkan konsistensi untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Konsekuensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur, dan sebagai terobosan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang** dilaksanakan melalui Program:

1. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
2. Penataan Ruang; dan
3. Perencanaan Ruang.

Permasalahan :

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang;

- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat tentang RTRW; dan
- f. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi :

- a. Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak tebang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif-desinsentif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

36. Sasaran Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup;

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik. Adapun capaian sasaran: **Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup** disajikan pada Tabel 2.82

Tabel 2.82
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks kualitas air	16,00	28,46	36,16	40,46	55,9	138,16	40,46	138,16
2	Indeks kualitas udara	60,00	82,29	76,82	84,46	84,95	100,58	84,46	100,58
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	83,3	42,54	58,60	42,54	72,59	58,60	72,59

Sumber: DINAS LH,, Update per Januari 2022.

Pada tahun 2021 Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 55,9 Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,95, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 42,54. Uji sampling udara menggunakan *metode pasive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di tahun 2021, dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 5 (Sari Husada, double track, jalan tol, 2 sutet) dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data tahun 2021 sebanyak 3 perusahaan yang melakukan pelanggaran dan telah diberikan sanksi. Hasil tahun 2021 lebih baik dari pada tahun 2020 dimana jumlah kasus perusahaan tahun 2020 sebanyak 18 kasus sedang tahun 2021 sebanyak 3 kasus.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup** dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.

Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH). Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau risiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorisasikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana** sebagaimana Tabel 2.83

Tabel 2.83
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (123,20)	Sedang (119)	Sedang (99,24)	83,39	Sedang	Sedang

Sumber: BPBD, Update per Januari 2022.

Kelas Indeks Kapasitas bencana Kabupaten Klaten tahun 2021 masuk kategori sedang sesuai dengan target RPJMD.

Pada tahun 2021 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “**Desa Paseduluran**” dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran: **Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana** di Kabupaten Klaten dengan upaya penguatan mitigasi bencana.

Kondisi kebencanaan yang wajib diperhatikan, diantaranya:

- a. Bencana Banjir, dimana Kecamatan Cawas dan Karangdowo merupakan wilayah yang paling sering terkena banjir. Wilayah di Kabupaten Klaten yang termasuk dalam daerah rawan banjir adalah wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Kalikotes, Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Pedan, Ceper dan Trucuk. Rawan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Klaten adalah gempa bumi dan tanah longsor.
- b. Gempa bumi, Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk dalam klasifikasi rendah dan menengah. Di sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi.
- c. Rawan bencana tanah longsor/ gerakan tanah yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari gerakan tanah sangat rendah hingga tinggi. Gerakan tanah tinggi berada di Kecamatan Kemalang yang merupakan wilayah terdekat dengan Gunung Merapi. Sedangkan untuk gerakan tanah sedang berada di sebagian wilayah Kemalang, Bayat dan Gantiwarno.
- d. Selain kejadian bencana di atas, di Kabupaten Klaten juga terdapat wilayah yang berada di lereng gunung api yaitu Gunung Merapi. Beberapa wilayah di Kabupaten Klaten yang berada di sekitar lereng gunung api termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi gunung api. KRB III merupakan kawasan yang

letaknya berdekatan dengan sumber bahaya Gunungapi Merapi. Jika Gunungapi Merapi mengalami erupsi maka pada kawasan ini sering dilanda awan panas, aliran lava, guguran batu, dan lontaran batu (pijar) sehingga kawasan ini memiliki ancaman resiko tinggi. KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda dua hal, yaitu aliran massa berupa awan panas, aliran lava, dan lahar dan lontaran berupa jatuhnya piroklastik lebat dan lontaran batu (pijar).

Pada tahun 2021 program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana dengan program Penanggulangan Bencana.

Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan Kabupaten Tangguh Bencana.

Solusi :

Berdasarkan perkembangan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi melalui arah kebijakan:

1. Mengurangi risiko bencana; dan
2. Meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
 - b. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
 - c. Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;

Memperhatikan luas wilayah 70.152,02 ha (701,52 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk pada kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Menciptakan kondusivitas Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten diupayakan dengan mengurangi kompleksitas masalah kehidupan sosial budaya dengan membangun kesadaran kolektif tentang perlunya: 1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, 2. Peningkatan Peran Partai Politik

dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, 3. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 4. Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi** sebagaimana Tabel 2.84

Tabel 2.84
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	72,22	75,7	75,43	99,64	75,70	99,64

Sumber: BAKESBANGPOL, Update per Januari 2022.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, diantaranya: 1) kebebasan sipil, 2) hak-hak politik, dan 3) lembaga demokrasi. Penetapan besaran IDI ditetapkan dengan skala nilai 0-100. Penetapan nilai IDI di Kabupaten Klaten mengikuti angka Provinsi Jawa Tengah, karena melakukan pengukuran dan penghitungan Provinsi. Adapun capaian IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebesar 70,85, dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 72,17.

Pengukuran atas indeks komposit pembentuk IDI pada tahun 2020, diperoleh dari komponen: 1) kebebasan sipil (skor 78,43), 2) hak-hak politik dan lembaga demokrasi (skor 67,91), dan 3) lembaga demokrasi (skor 90,50).

Berdasarkan capaian IDI, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori baik (indeks > 80), kategori sedang (indeks 60-80), dan kategori buruk (indeks < 60). Oleh karena itu pencapaian IDI pada tahun 2019 angka sementara (sama dengan tahun 2018) memperoleh skor 72,17 dengan kategori sedang. Sedangkan pada tahun 2021 capaian IDI mendapat Skor 75,43.

Pada tahun 2021, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya: **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi** diantaranya:

1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
3. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan
4. Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten; dan
- c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat; dan
- b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

39. Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;

Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran: **Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya** disajikan pada Tabel 2.85

Tabel 2.85
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam
Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	58	61	100	85,50	85,50	100	85,50

Sumber: DISPERMADES, Update per Januari 2022.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya pada tahun 2020 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 61 atau naik sebanyak 3 dibanding tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 85,50.

Apabila per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 85,50 dan diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang memadai sampai tingkat kabupaten. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;
- Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya; dan
- Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Ukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** disajikan pada Tabel 2.86

Tabel 2.86
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	96	98	100	100	100	100	100

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan capaian Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana Tabel 2.86 di atas, Gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi dari laporan/aduan masyarakat di Tahun 2021 sebanyak 20 laporan/aduan yang masuk, meliputi kegiatan usaha yang

tidak berijin, penyalahgunaan penggunaan fasilitas umum, pelanggaran protokol kesehatan *Covid-19* hingga maraknya PGOT. Setiap laporan/aduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tersebut dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan semua, sehingga realisasi capaian persentase untuk Indeks Ketertiban Masyarakat pada Tahun 2021 adalah 100%.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 2.87

Tabel 2.87
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK/ WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2017	15	15	8	6	58	12	14
2	2018	15	8	6	10	78	18	7
3	2019	20	12	5	12	37	38	8
4	2020	16	17	15	6	54	31	17
5	2021	21	31	10	9	53	12	4

SANKSI

- Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan.
- Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang.
- Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut.
- Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP.

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.87 sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.88

Tabel 2.88
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
2	2018	0	0	0	0	0
3	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
4	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
5	2021	1	0	47 botol	0	44 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;						
- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: SATPOL PP DAN DAMKAR, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.88 sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.89

Tabel 2.89
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2017-2021

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	-	-	1	-	1
2.	Konflik Sara	3	1	1	8	-
3.	Gerakan Radikalisme	9	2	1	-	-
4.	Kenakalan remaja	3	4	1	-	8

Sumber: BAKESBANGPOL Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.89 sebagaimana tersebut di atas, jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten untuk ancaman terorisme pada tahun 2021 yaitu sebanyak 1 (satu) kasus dan kenakalan remaja sebanyak 8 kasus.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: Jumlah kriminalitas tertangani/jumlah penduduk X 10.000 (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut:

a. Tahun 2017 : 3,25

Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 jiwa dikali 10.000.

b. Tahun 2018 :1,89.

Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 jiwa dikali 10.000

c. Tahun 2019 : 2,73

Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 jiwa dikali 10.000

d. Tahun 2020 : 1,19

Jumlah kriminalitas tertangani 158 kasus dibagi jumlah penduduk 1.330.802 jiwa dikali 10.000.

e. Tahun 2021 : 1,80

Jumlah kriminalitas tertangani 230 kasus dibagi jumlah penduduk 1.276.030 jiwa dikali 10.000.

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun terus berkembang, sehingga penanganannyapun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. 3). Selain

itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap Perda/Perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparaturnya penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** yang didukung dengan program Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax sebagai komoditas politik.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita hoax.

41. Sasaran Meningkatkan Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/goals dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400 Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa foodborne disease merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi

perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak** disajikan pada Tabel 2.90

Tabel 2.90
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	72,35	60,37	69,42	114,99	60,37	114,99
2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Madya (650)	Nindya 750	Madya 650	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Catatan: capaian tahun 2020 angka sementara, karena rilis data belum keluar.

Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.91

Tabel 2.91
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	96,54	96,62	96,62	96,17	96,17

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Catatan: *) angka sementara

Berdasarkan Tabel 2.91 sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG tidak mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar 96,17% dan pada tahun 2021 sementara tetap 96,17%. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender diharapkan akan meningkatkan IPG.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.92

Tabel 2.92
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kabupaten Klaten Periode 2017-2021

No	Indikator	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	18	18	18
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	43,65	52,71	55,73	60,72	60,72
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,76	37,77	37,81	37,72	37,72
4	IDG	59,60	60,25	72,35	69,42	69,42

Sumber : DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.
Catatan: *) angka sementara.

Berdasarkan Tabel 2.92 sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2016-2020 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya patriarki yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk stereotype, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda perempuan, dan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal. Khusus Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) pada tahun 2019 angkanya mencapai 18% (atau 9 perempuan dari total anggota DPRD sebanyak 50 orang).

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2017-2021 relatif stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan

pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.93

Tabel 2.93
Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eksekutif (%)	56,6	57	59,7	14,35	30
2	Legislatif (%)	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(9/50) = 18	(9/50) = 18	(9/50) = 18

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022 .

Berdasarkan Tabel 2.93 sebagaimana tersebut di atas, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif stagnan, pada tahun 2017-2018 sebesar 6% merupakan hasil Pemilu tahun 2014 dan tahun 2019-2021 sebesar 18% merupakan hasil Pemilu tahun 2019. Jabatan eksekutif pada tahun 2021 naik menjadi sebesar 30% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 14,35%. Hal ini seiring dengan kebutuhan, serta tuntutan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 2.94

Tabel 2.94
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2017-2021

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	40
2021	10	4	4	6	2	16	0	0	0	0	42

Sumber: DISSOSP3APPKB, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.94 sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2020-2021) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 2 kasus dari tahun 2020 sebesar 40 kasus menjadi 42 kasus di tahun 2021, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi kekerasan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
4. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi :

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

42. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan diantaranya diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, kemudahan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan angkutan serta kepuasan bagi pengguna layanan perhubungan.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan** disajikan pada Tabel 2.95

Tabel 2.95
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	79,02	79,95	81,08	80,65	99,47	81,08	99,47

Sumber: Dinas Perhubungan, Update per Januari 2022.

Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan capaian Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan sebagaimana Tabel 2.95 di atas, ditunjang adanya ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 2.96

Tabel 2.96
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	9.622	8.878	8.591	8.072	8.018
02 Mobil Bus					
* Umum	397	384	408	391	205
Bus Besar	65	97	88	91	20
Bus Sedang	261	248	268	215	145
Bus Kecil	71	39	52	85	40
* Bukan Umum	105	111	117	97	332
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	6	10	21	7	7
Jumlah	10.527	9.383	9.137	8.567	8562

Sumber : Dinas Perhubungan, Update per Januari 2022.

Disamping Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) yang tercatat, juga dimiliki terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 6 (enam) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.97

Tabel 2.97
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	1950 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3120 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	2729 m ²
4	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	A	25840 m ²
5	Buntalan	Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	B	8545 m ²
6	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1668 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan, Update per Januari 2022.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan :

- a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangkau dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan ; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran Meningkatkan Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;

Ukuran keberhasilan meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2021, pelayanan perijinan satu pintu dilaksanakan pada 391 Desa dan 10 Kelurahan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 26 merupakan target sasaran Pelayanan Perijinan Satu Pintu dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa, serta daya saing Daerah.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat** disajikan pada Tabel 2.98

Tabel 2.98
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu,
Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	84,50	80,52	78,37	80	81,20	101,50	80,00	101,50

Sumber: DPMPTSP, Update per Januari 2022.

Berdasarkan tanggapan penggunaan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perijinan Satu Pintu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 81,20 (artinya kategori baik). Perolehan indeks ini didasarkan atas penilaian atas 9 (sembilan) unsur pelayanan, diantaranya: a. Persyaratan, b. Prosedur, c. Waktu pelayanan, d. Biaya/tarif, e. Produk layanan, f. Kompetensi pelaksana, g. Perilaku pelaksana, h. Maklumat pelayanan, dan i. Penanganan pengaduan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

Permasalahan :

- a. Belum ada jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Percepatan realisasi pelaksanaan Tugas Satgas Percepatan Realisasi Investasi; dan
- b. Penyusunan rencana Aksi Daerah Percepatan Investasi Daerah.

44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 827.614 orang yang belum memiliki Akta Lahir, dan penduduk yang belum mempunyai e-KTP Elektronik sebanyak 13.527 orang. Kondisi kepemilikan e-KTP dari tahun ke tahun bertambah sering dengan penerapan Single Identity Number program e-KTP. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas** sebagaimana Tabel 2.99

Tabel 2.99
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan adminis Trasi	Sdh	91,77	Sdh (81,6)	Sdh	91,50	91,50	sdh	Sdh

Sumber: DISDUKCAPIL, Update per Januari 2022.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan /Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkembangan jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.100

Tabel 2.100

Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2021

No	Jenis Akte	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelahiran	23.256	27.755	26.582	19.511	21.012
2	Kematian	1.400	2.116	1.800	2,922	13.021
3	Perkawinan	450	473	472	397	563
4	Perceraian	58	71	76	166	52

Sumber : DISDUKCAPIL, Update per Januari 2022.

Catatan : *) Data Semester I -2021

Untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP sampai dengan tahun 2021 tercatat penduduk yang belum ber-KTP sebanyak 13.527 orang. Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akte lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2017-2021 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.101 Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.101

Tabel 2.101

Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2017-2021

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2017	894.986	91.538
2	2018	877.190	71.223
3	2019	850.325	55.921
4	2020	827.614	19.522
5	2021	Na	13.527

Sumber : DISDUKCAPIL, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.101 sebagaimana tersebut di atas jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP.

Permasalahan :

- Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran Pengembangan Ketransmigrasian;

Keberhasilan pengembangan ketransmigrasian diukur dengan indikator Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Kurun waktu tahun 2017-2021 sasaran transmigrasi di daerah Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, namun realisasi penempatan transmigrasi tahun 2017-2019 di Sumatera saja. Pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan penempatan transmigrasi tidak direalisasikan dikarenakan pandemi Covid-19.

Adapun capaian sasaran: **Pengembangan Ketransmigrasian** disajikan pada Tabel 2.102

Tabel 2.102
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pengembangan Ketransmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2021 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2019	2020	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=(7)/(9)*100
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	5,2	0	42	0	0	42	

Sumber: DISPERSAKER, Update per Januari 2022.

Ukuran keberhasilan peningkatan besaran minat transmigrasi diukur dari jumlah peserta transmigrasi yang terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 56 jiwa (20 KK). Sedangkan yang diberangkatkan pada tahun 2019 sebanyak 44 jiwa (14 KK), dan pada tahun 2020 dan tahun 2021 tidak memberangkatkan transmigrasi karena masih situasi pandemi.

Adapun peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.103

Tabel 2.103
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah
Penempatan Tahun 2017-2021

TAHUN	Sumatera		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-
2019	14	44	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sumber : DISPERNAKER, Update per Januari 2022.

Berdasarkan Tabel 2.103 sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya kuota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan kuota dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Permasalahan :

- a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup;
- b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan kuotanya.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjangkauan sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2021, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 61 (enam puluh satu) indikator yang sifatnya progresif, dan 6 (enam) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2021, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 330 program dengan 700 kegiatan dan sub kegiatan 1777. Realisasi fisik tercapai 96% dari target rencana 98%. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp2.949.643.677.710,- dan terserap sebesar Rp2.493.406.881.542,- (atau 84,53%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 2.104

Tabel 2.104
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	177,89	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	101,88	605.929.768.491	81,452	Efisiensi
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	93,36	Pengelolaan Pendidikan	APK SD/MI/Paket A	%	93,28	43.458.335.621	86,55	Efisiensi
						APM SD/MI/Paket A	%	95,74			
						Angka Pputus Sekolah (APS) SD/MI	%	200,00			
						Angka Kelulusan SD/MI	%	100,94			
						APKSMP/MTs/paket B	%	107,51			
						APM SMP/MTs/Paket B	%	104,48			
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	103,26			
						Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	166,67			
						Angka kelulusan SMP/MTs	%	101,84			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Jumlah anak umur 0 6 tahun yang mengikuti program PAUD	%	97,55			
						APK PAUD	%	85,20			
						Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,85			
					Pengembangan Kurikulum	Angka Pputus Sekolah (APS) SD/MI	%	200,00	242.466.350	65,44	
						Angka Kelulusan SD/MI	%	100,94			
						Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	103,26			
						Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs	%	166,67			
						Angka kelulusan SMP/MTs	%	101,84			
						Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,85			
					Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	%	100,92	33.045.274.950	96,41	
						Persentase Kepala Sekolah SD/MI yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifiket Kepala Sekolah	%	99,90			
						Persentase Kepala Sekolah SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifiket Kepala Sekolah	%	105,16			
						Rasio guru terhadap murid jenjang SD/MI	%	97,33			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						Rasio guru terhadap murid jenjang SMP/MTs	%	100,00			
					Pengembangan Bahasa dan Sastra	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,85	22.810.000	91,24	
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	321,43	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan pemerintahan bidang kesehatan yang ditunjang	%	100,00	266.875.180.065	76,52	Efisiensi
		Angka Kematian Bayi	Angka	104,67	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat terpenuhi	%	77,00	101.301.009.001	62,21	Tidak efisiensi
		Angka kematian Balita	Angka	96,89	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	%	110,00	12.017.290.190	58,11	Efisiensi
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	Angka	132,86	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	%	102,22	370.856.275	59,34	Efisiensi
					Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100,00	161.534.900	70,49	Efisiensi
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Th	100,31							

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	109,29	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	persentase urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana yang ditunjang	%	100	5.726.726.342	91,85	Efisiensi
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	Pemberdayaan Sosial	Persentase keluarga miskin, penyandang disabilitas dan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten (TKSK, Pendamping PKH, Karang Taruna, CSR dan lembaga kesejahteraan sosial) yang diberdayakan.	%	100	1.074.832.862	90,98	
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	102,24	Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang pengemis di luar Panti dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	%	100	1.992.210.739	89,81	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mendapat layanan rehabilitasi sosial	%	100	180.409.822	97,44	
					Penanganan Bencana	Persentase korban bencana dan kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus	%	100	721.410.950	94,46	
					Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase peziarah yang mendapat pelayanan di taman makam pahlawan nasional Kabupaten	%	100	30.956.535	88,45	
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	%	76,19	Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	-457,78	328.633.275	96,04	Efisiensi
					Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peserta KB Aktif	%	100,43	3.861.288.476	45,84	
					Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga Pra Sejahtera	%	Na	446.743.556	53,18	
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	170,00	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase meningkatnya hasil pembinaan kepemudaan	%	100	296.588.152	96,25	Efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	560,00	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase meningkatnya hasil pembinaan dan pengembangan olahraga	%	100	1.284.395.152	99,45	
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	333,33	Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	%	100,00	698.376.165	99,38	Efisiensi
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	0	0	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	100,00	123.903.908	97,95	Tidak efisiensi
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	-1667	Pembinaan Perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	-8334	154.149.453	95,65	Tidak efisiensi
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	89,35	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	4.950.108.269	91,72	Efisiensi
					Kepegawaian Daerah	Persentase layanan sumber daya aparatur	%	99,07	1.441.765.942	79,96	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
						persentase pembinaan disiplin ASN	%	103,03			
						Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	101,2			
						Persentase pengembangan aparatur	%	90,93			
					Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	%	155,86	1.293.183.045	99,64	
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	100,00	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	18.158.405.107	87,40	Efisiensi
					Pengelolaan Keuangan Daerah	Laporan keuangan pemerintah Daerah disusun tepat waktu	%	100	693.899.852.410	92,33	
						Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir	%	100			
						Persentase penyerapan belanja Daerah	%	100,63			
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tanah Pemkab yang bersertifikat	%	111,85	2.561.087.578	79,40	
					Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase kenaikan PAD	%	-58,92	2.186.190.027	71,54	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90,91	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unsur pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD yang ditunjang	%	94,34	35.788.060.003	89,13	Efisiensi
					Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase DPR yang terdukung pelaksanaan tugas dan fungsinya	%	96,97	11.769.303.223	67,79	
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	%	100	1.358.579.012	86,35	Efisiensi
						Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	%	100			
						Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	%	93,49			
						Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	%	97,47			
						Persentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	%	#VALUE !			
					Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi dan ketepatan waktu perencanaan	%	100	757.953.294	84,87	
					Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	%	100	1.358.579.012	86,35	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	33,60	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran	%	100	3.572.713.641	99,54	Tidak efisiensi
					Pengelolaan Arsip	Persentase peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip secara standar	%	34	8.738.500	99,29	
					Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase kenaikan koleksi arsip terakuisisi	%	56,1	93.326.833	97,91	
							%				
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100,00	3.744.553.205	87,48	efisiensi
					Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	%				
					Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa profesional, transparan dan akuntabel	%	100,00	3.416.167.404	87,19	
					Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Masyarakat dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	85,50	652.986.640	95,20	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Level	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan bidang pengawasan yang ditunjang	%	100	8.957.999.000	78,14	Efisiensi
		Level Kapabilitas APIP	Level	100	Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan kapabilitas APIP	%	100	324.527.000	35,43	
					Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Peningkatan level maturitas SPIP	%	100	1.841.674.000	65,98	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Skor	88,67	Administrasi Umum Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	%	95,45	1.780.386.925	88,67	
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	103,58	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	103,58	205.240.220	91,45	Efisiensi
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%	90,07			
					Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100			
					Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase dukungan pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	94,93			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase dukungan pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	95,70			
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase dukungan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	81,54			
					Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase dukungan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	87,43			
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	100	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi penataan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta pendokumentasian dan informasi produk hukum	%	100,00	599.980.040	73,87	Efisiensi
		Indeks Kabupaten peduli HAM	%	106,33			%				
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	106,67	Administrasi Umum (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) Kab/Kota	Persentase urusan pemerintah daerah bagian pembangunan	%	90,00	809.102.781	58,11	Efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pengadaan barang dan jasa	%	100	380.592.000	84,96	Efisiensi
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	100	Administrasi Umum (Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) Kab/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan	%	100	4.812.807.000	93,87	Efisiensi
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan Pemerintah Daerah Dinas Kominikasi Informatika yang ditunjang	%	100	6.643.885.534	88,43	
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi Pemerintah Daerah Dinas Kominikasi Informatika yang sampai ke publik	%	464,07	959.560.615	89,70	
					Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase persediaan infrastuktur teknologi dan kominikasi	%	124	4.661.718.652	98,44	
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data statistik Dinas Informatika yang tersedia	%	100,00	50.266.000	86,67	
					Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	%	448,15	86.395.650	98,13	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	73,71	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah Daerah	%	100			
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	100	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	2.707.077.613	91,43	Efisiensi
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	86,27	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi tembakau rajang	%	143,54	1.165.837.700	84,71	Efisiensi
						Produksi tembakau asepap	%	134,34			
					Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi	%	102,45	8.428.086.500	96,80	
					Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	populasi ternak sapi	%	95,77	451.112.472	78,74	
						produksi daging sapi	%	70,63			
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas padi	%	102,45	330.684.628	90,42	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	24,50	513.499.275	67,28	
					Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	%	58,07	18.020.000	90,1	
					Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	%	106,34	1.390.347.834	92,80	
					Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan tabur benih ikan (<i>Restocking</i>) perairan umum	%	100,00	33.380.000	90,22	
					Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan	%	99,36	45.729.900	81,30	
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	80	27.734.986.961	80,68	
					Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	528.211.900	79,14	
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	630.964.150	83,41	
					Penanganan Kerawanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	28.859.800	93,10	
					Pengawasan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	%	97,59	24.974.300	62,44	
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	99,47	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100,00	3.744.553.205	87,48	Efisiensi

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
	potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan										
					Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	%				
					Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan tata kelola Pemerintahan Desa profesional, transparan dan akuntabel	%	100,00	3.416.167.404	87,19	
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	85,50	652.986.640	95,20	
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	-368,70	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan pemerintah bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga yang ditunjang	%	100,00	5.464.213.506	90,18	Tidak efisiensi
					Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase meningkatnya produktivitas nilai tambah dan daya saing sektor pariwisata	%	100,00	3.125.755.478	95,00	
					Pemasaran Pariwisata	Persentase meningkatnya kunjungan, lama tinggal dan tingkat belanja wisatawan	%	100,00	98.593.810	98,59	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual		%				
					Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase peningkatan kapasitas daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang terlaksana	%	100,00	485.130.700	93,06	
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	103,10	Pnunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%				Efisiensi
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	80	Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam		%				
					Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	49,08	122.554.636	30,64	
						Persentase pertumbuhan koperasi	%	31,11			
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		%				
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus koperasi terlatih	%	100,00	353.647.900	90,61	
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		%				

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPIPIRT dan halal	%	24,73	27.392.500	68,48	
					Pengembangan UMKM	Persentase pertumbuhan UMKM	%	20,00	126.079.000	84,05	
					Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar pemda yang direvitalisasi	%		2.540.810.300	91,51	
						Persentase PKL dan asongan yang terbina	%				
					Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	%		23.512.100	78,37	
					Pengembangan Ekspor		%				
					Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase cakupan pelayanan alat UTTP (Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya)	%		152.498.400	82,43	
					Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk UMKM	%			-	
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	85,3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	%	100	417.169.664	92,15	Tidak Efisiensi
						Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	%	131,82			

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	105	2.434.429.107	83,01	Tidak Efisiensi
		PMDN	%	1,66	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	0	-		
		PMA	%	78,57	Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	117,5	225.824.000	93,70	
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):			Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	%	100	96.219.500	79,99	Efisiensi
		PMDN	%	3880	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian penanaman modal	%	82,5	368.589.000	65,99	
		PMA	%	12509,80	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	101,25	80.619.000	80,62	
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	70,37	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	4.276.504.863	85,64	Efisiensi
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	126,00	Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian Renja dengan RKT	%	0	108.394.300	80,29	
					Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase jumlah yang mendapat pelatihan dengan pendaftar pelatihan	%	106,67	953.908.350	80,78	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	22,67	48.361.000	52,79	
					Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian hubungan industrial	%	111,11	177.771.400	50,88	
30	Meningkatnya perlindungan pekerja/ buruh sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	67,93							
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	100	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase perencanaan pembangunan industri	%	145	1.470.374.600	75,58	Efisiensi
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	105,33							
							%				
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	98,95	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	50.739.784.648	89,03	Efisiensi
					Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pengelolaan sumber daya air yang terbangun	%	100,00	12.052.283.717	84,71	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	<i>Persentase sistem penyediaan air minum yang memadai</i>	%	92,50	3.777.359.300	84,67	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	persentase layanan pengelolaan persampahan	%	100,00	13.991.761.718	90,66	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase layanan air limbah IPLT	%	87,51	185.682.500	92,84	
						<i>Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah yang memadai</i>	%	100,00	2.737.992.437	95,66	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	<i>Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</i>	%	0		#DIV/0!	
					Pengembangan Permukiman		%				
					Penataan Bangunan Gedung	<i>Persentase penataan bangunan gedung</i>	%	100,00	47.838.969.471	94,01	
					Penataan Bangunan dan Lingkungannya	persentase cakupan perencanaan penataan ruang	%	0,00			
					Penyelenggaraan Jalan	persentase jalan dalam kondisi mantap	%	100,00	53.769.494.429	70,66	
					Pengembangan Jasa Konstruksi	<i>Persentase peningkatan dan pengembangan kualitas jasa konstruksi</i>	%	100,00	7.445.000	74,45	
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Skor	151,27	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan yang ditunjang	%	91,67	5.908.445.346	88,54	Efisiensi
					Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	%	151,27	2.490.117.313	96,26	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100,00	7.507.115.361	83,54	Efisiensi
					Pengembangan Perumahan	Persentase pengembangan perumahan Kabupaten Klaten	%	100,00	147.685.921	15,66	
					Kawasan Permukiman	Persentase penataan kawasan kumuh	%	0,14	2.590.000	13,02	
					Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	103,16	2.704.530.000	96,28	
					Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Perentase prasarana sarana dan utilitas umum terbangun (lokasi perumahan terbangun)	%	100,00	99.628.520	37,15	
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100,63	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang	%	100,00	1.487.918.691	70,35	
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	138,16	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	3.327.292.914	87,14	Efisiensi
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	100,58	Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	0	0	0	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
		Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	51,07	Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	1.472.109.724	96,17	
						Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100			
						Presentase kampung iklim yang terbentuk	%	100			
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	%	100	573.660.122	94,46	
					Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	100	1.323.964.000	84,01	
					pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	128.156.749	85,44	
					Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	0	-	0,00	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	%	100	236.935.999	85,52	
						Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100			
					Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	%	82,33	4.436.287.163	96,36	
						Persentase jumlah sampah yang berkurang	%	104,38			
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	83,39	Penanggulangan Bencana	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	%	100	2.266.493.856	86,44	Tidak Efisien
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	99,64	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	100	2.002.461.684	68,96	Esiensi
					Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase urusan bidang ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan di daerah	%	100	35.181.000	85,27	
					Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga	Persentase peran partai politik yang didukung daerah	%	100	1.100.047.500	99,92	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik						
					Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	399.861.000	93,53	
					Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase ketahanan ekonomi sosial masyarakat yg dibina dan dikembangkan di daerah	%	100	42.144.400	99,99	
					Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase pelaksanaan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik di daerah	%	100	186.193.900	63,66	
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	85,50	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rata-rata Kader Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	85,50	652.986.640	95,20	Tidak Efektif

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	%	84,1	6.238.882.377	87,68	Efisiensi
					Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum yang terkondisikan	%	97,9	2.737.935.102	97,22	
					Penanggulangan Bencana	Cakupan penanganan bencana yang tertangani	%	100	31.214.000	100,00	
					Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase penanggulangan kebakaran yang tertangani	%	99	836.022.676	99,42	
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	114,99	Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	%	0,00	24.814.666	99,26	Efisiensi
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	86,67		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	%	114,99			
					Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,27	26.928.750	13,24	
					Peningkatan Kualitas Keluarga	Rasio kekerasan terhadap perempuan	%	0,27	44.999.736	100,00	
					Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang mampu mengelola data dan informasi gender dan anak yang berkelanjutan	%	100,00	12.953.436	100,00	

No	Sasaran	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Pencapaian Indikator Kinerja					Keterangan
		Indikator	Satuan	%		Indikator	Satuan	%	Realisasi (Rp)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)
					Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Tahapan Kabupaten Layak Anak	%		156.675.500	99,88	
					Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap anak	%	0,16	62.061.350	26,00	
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	99,47	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan	%	151,27	2.490.117.313	96,26	Efisien
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai Survai Kepuasan Masyarakat	Indeks	101,50	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	101,25	80.619.000	80,62	Efisien
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	91,50	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan bidang kependudukan dan pencatatan sipil terpenuhi	%	100,00	7.288.073.726	82,61	Tidak efisien
					Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan pendaftaran penduduk	%	100,00	586.385.920	96,81	
					Pencatatan Sipil	Persentase pelayanan pencatatan sipil terlayani	%	100,00	257.189.114	96,37	
					Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	%	100,00	60.525.250	94,57	
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	0	Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah masyarakat yang disosialisasikan terhadap program Trasmigrasi	%	0	21.332.100	20,32	Tidak efisien

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 (setelah reviu Inspektorat)

Berdasarkan Tabel 2.104 untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya dengan membandingkan antara realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran dengan realisasi pencapaian serapan anggaran indikator kinerja program. Apabila realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran lebih besar daripada realisasi serapan anggaran pencapaian indikator kinerja sasaran, maka dinyatakan efisiensi. Begitu juga sebaliknya, apabila realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran lebih kecil daripada realisasi serapan anggaran pencapaian indikator kinerja sasaran, maka dinyatakan tidak efisiensi. Atas dasar pengukuran tersebut, dari 67 indikator sasaran diperoleh hasil yang efisiensi sebanyak 59 (atau 88,06 %) indikator dan yang tidak efisiensi sebanyak 8 (atau 11,94%) indikator.

2) Efektifitas Sumber Daya

Pengertian efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); dapat membawa hasil; berhasil guna. Efektivitas adalah suatu keadaan dimana kemampuan suatu sistem sesuai dengan keinginan pengguna. Efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi karena dikehendaki. Menurut Richard Steer efektivitas harus dinilai atas dasar tujuan yang bisa dilaksanakan, bukan atas dasar konsep tujuan yang maksimum. Efektivitas diukur dengan menggunakan standar sesuai dengan acuan Litbang Depdagri (1991) seperti pada Tabel 2.105

Tabel 2.105
Efektifitas Sumber Daya

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)
1	< 40	Sangat Tidak Efektif
2	40 – 59,99	Tidak Efektif
3	60 – 79,79	Efektif
4	> 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri (1991).

Sehingga untuk mengukur tingkat sumber daya berdasarkan capaian indikator sasaran strategis tahun 2021 dengan mengacu Tabel 2.104 tentang Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021, dapat disajikan pada Tabel 2.106

Tabel 2.106
Efektifitas Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55,00	97,84	177,89	Sangat efektif
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95,00	88,70	93,36	Sangat efektif
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	14	45	321,43	Tidak efektif
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07	10,54	104,67	Tidak efektif
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61	1,56	96,89	Efektif
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7	0,93	132,86	Tidak efektif
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) (3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10	1,6	76,19	Efektif
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,12	99,35	Sangat efektif
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89	97,27	109,29	Sangat efektif
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	100	100	Sangat efektif
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9	13,19	102,24	Tidak efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	17	170,00	Sangat efektif
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	28	560,00	Sangat efektif
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	16,67	333,33	Sangat efektif
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	0	0	Sangat tidak efektif
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-83	-1667	Sangat tidak efektif
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35	Sangat efektif
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)	WTP (4)	100	Sangat efektif
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	81,82	91,11	Sangat efektif
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	Sangat efektif
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	1,68	33,60	Sangat tidak efektif
14	Meningkatkan tata kelola	14.1	Prosentase penyelenggaraan	%	100	100	100	Sangat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel		pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel					efektif
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	Sangat efektif
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	Sangat efektif
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70 (BB)	62,07 (B)	88,67	Sangat efektif
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1	3,2109	103,58	Sangat efektif
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	100	111,11	Sangat efektif
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90	95,7	106,33	Sangat efektif
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	96	106,667	Sangat efektif
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	Sangat efektif
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98	98	100	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	Sangat efektif
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	Sangat efektif
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,58	73,71	Efektif
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	Sangat efektif
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6	10,87	86,27	Sangat efektif
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	58	57,69	99,47	Sangat efektif
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	3,22	12,87	Sangat tidak efektif
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38	19,98	103,10	Sangat efektif
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya	%	15	12	80	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			saing						
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100	85,3	85,3	Sangat efektif	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):						
			PMDN	%	483	8	1,66	Sangat tidak efektif	
			PMA	%	294	231	78,57	Efektif	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):						
			PMDN	%	2,5	97	3880,00	Sangat efektif	
PMA	%	2,55	319	12509,80	Sangat efektif				
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08	0,76	70,37	Efektif	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	86,94	126,00	Sangat efektif	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,20	59,91	67,93	efektif	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2	35,2	100,00	Sangat efektif
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,50	7,9	105,33	Sangat efektif
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	40,81	40,38	98,95	Sangat efektif
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52	87,01	151,27	Sangat efektif
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,40	74,40	100	Sangat efektif
35	Terkendalnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80,00	80,50	100,63	Sangat efektif
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	40,46	55,9	138,16	Sangat efektif
		36.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,46	84,95	100,58	Sangat efektif
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	58,60	42,54	72,59	efektif
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	Sedang 119	Sedang 99,24	83,39	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	Indeks	75,7	75.43	99.64	Sangat efektif
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	100	85,50	85,50	Sangat efektif
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	100	100	Sangat efektif
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,37	69,42	114,99	Sangat efektif
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya 750	Madya 650	86,67	Sangat efektif
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,08	80,65	99,47	Sangat efektif
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Indeks	80	81,2	101,50	Sangat efektif
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	Sdh	91,5	91,5	Sangat efektif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	%	42,00	0	0	Sangat tidak efektif

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 (setelah reviu Inspektorat), diolah

Berdasarkan tabel 2.106 dapat disimpulkan tingkat efektifitas sumber daya, dengan perincian: 1. Sangat tidak efektif sebanyak 9 (atau 13,43%), 2. Tidak efektif sebanyak 0 (0%), 3. Efektif sebanyak 7 (atau 10,44%), dan 4. Sangat efektif sebanyak 51 (atau 76,12%).

g. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.107
Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	55,00	97,84	177,89	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	95,00	88,70	93,36	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Pengelolaan Pendidikan 1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan III Program Pengembangan Kurikulum 1 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 2 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal IV Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan V Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	14	45	321,43	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 1 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Peningkatan Pelayanan BLUD II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,07	10,54	104,67	
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,61	1,56	96,89	
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,7	0,93	132,86	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 4 Penerbitan izin Rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota IV PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) (3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,10	1,6	76,19	I Program Pengendalian Penduduk 1 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota II Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 1 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 3 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								4 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB III Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitian oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62	76,12	99,35	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 1 Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Peningkatan Pelayanan BLUD II PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 4 Penerbitan izin Rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA 1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota IV PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	89	97,27	109,29	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	100	100	100	
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	12,9	13,19	102,24	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>II Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>1 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</p> <p>2 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>III Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</p> <p>IV Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</p> <p>1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>V Program Penanganan Bencana</p> <p>1 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								2 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota VI Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan 1 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	17	170,00	I Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	28	560,00	II Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	16,67	333,33	I Program Pengembangan Kebudayaan 1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	0	0	I Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	-83	-1667	II Program Pembinaan Perpustakaan 1 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36	78,06	89,35	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Kepegawaian Daerah 1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2 Mutasi dan Promosi ASN 3 Pengembangan Kompetensi ASN 4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur III Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Pengembangan Kompetensi Teknis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP (4)	WTP (4)	100	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah III Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah IV Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1 Kegiatan Pengelolaan pendapatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Daerah
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90	81,82	91,11	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 8 Layanan Administrasi DPRD II Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2 Peningkatan Kapasitas DPRD 3 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah III Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	1,68	33,60	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Pengelolaan Arsip 1 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota III Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 1 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun 2 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	100	100	100	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								<p>4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>II Program Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>III Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</p>
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	<p>I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2 Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								II Program Penyelenggaraan Pengawasan 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu III Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2 Pendampingan dan Asistensi
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	70 (BB)	62,07 (B)	88,67	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Penataan Organisasi
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,1	3,2109	103,58	I PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Administrasi Tata Pemerintahan 2 Fasilitasi Kerjasama Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>II Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>2 Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>III Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</p> <p>1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <p>IV Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum</p> <p>1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>V Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</p> <p>1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <p>VI Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa VII Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	100	111,11	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		17.2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	%	90	95,7	106,33	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	96	106,667	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum 3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Perekonomian dan Pembangunan 1 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Administrasi Keuangan Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98	98	100	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan II Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota III Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota IV Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	%	100	100	100	
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100	100	100	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Kabupaten/Kota V Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 1 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,58	73,71	I Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah II Program Perekonomian dan Pembangunan 1 Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 2 Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,6	10,87	86,27	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>II Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</p> <p>1 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>III Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p> <p>1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</p> <p>2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>IV Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>1 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>V Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 3 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi VI Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 1 Pengembangan Prasarana Pertanian 2 Pembangunan Prasarana Pertanian 3 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota VII Program Penanganan Kerawanan Pangan 1 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota VIII Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>IX Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>4 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan</p> <p>X Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>XI Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</p> <p>1 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</p> <p>XII Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</p> <p>1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</p> <p>XII Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil XIV Program Penyuluhan Pertanian 1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	58	57,69	99,47	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Administrasi Pemerintahan Desa 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa III Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	3,22	12,87	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								III Program Pemasaran Pariwisata 1 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota IV Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 1 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,38	19,98	103,10	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota III Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	15	12	80	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 2 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya IV Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 1 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 2 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota V Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 1 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota VI Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan VII Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 1 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
								VIII Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 1 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri IX Program Pengembangan UMKM 1 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	100	85,3	85,3	I Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 3 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):					I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	
			PMDN	%	483	8	1,66		
			PMA	%	294	231	78,57		
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):						
				PMDN	%	2,5	97		3880,00
PMA	%	2,55	319	12509,80					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								Pemerintahan Daerah II Program Promosi Penanaman Modal 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota III Program Pelayanan Penanaman Modal 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota IV Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota V Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,08	0,76	70,37	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	86,94	126,00	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS	%	88,20	59,91	67,93	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Ketenagakerjaan					3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Perencanaan Tenaga Kerja 1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) III Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota IV Program Penempatan Tenaga Kerja 1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja VII Program Hubungan Industrial

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2	35,2	100,00	I Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 1 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,50	7,9	105,33	
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	40,81	40,38	98,95	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>II Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p> <p>1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>III Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</p> <p>1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>IV Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>V Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</p> <p>1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>VI Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</p> <p>VII Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota VIII Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota IX Program Penataan Bangunan Gedung 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung X Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota XI Program Pengembangan Jasa Konstruksi 1 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52	87,01	151,27	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	74,40	74,40	100	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Pengembangan Perumahan 1 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 3 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus III Program Kawasan Permukiman 1 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 2 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								IV Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 1 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	80,00	80,50	100,63	I Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	40,46	55,9	138,16	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		36.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	84,46	84,95	100,58	
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	58,60	42,54	72,59	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>II Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>1 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>2 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p> <p>III Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</p> <p>1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</p> <p>IV Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</p> <p>1 Penyimpanan Sementara Limbah B3</p> <p>V Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <p>1 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>VI Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</p> <p>1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								VII Program Pengelolaan Persampahan 1 Pengelolaan Sampah
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	Sedang 119	Sedang 99,24	83,39	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Penanggulangan Bencana 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	Indeks	75,7	75.43	99.64	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>II Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</p> <p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p> <p>III Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p> <p>IV Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>V Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya VI Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	100	85,50	85,50	I Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	100	100	100	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota III Program Penanggulangan Bencana 1 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana IV Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 1 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,37	69,42	114,99	<p>I Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</p> <p>1 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>II Program Perlindungan Perempuan</p> <p>1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2 Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</p>
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya 750	Madya 650	86,67	<p>I Program Peningkatan Kualitas Keluarga</p> <p>1 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>II Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>1 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>III Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</p> <p>1 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>2 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>IV Program Perlindungan Khusus Anak</p> <p>1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>2 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan</p> <p>3 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p>

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	81,08	80,65	99,47	I Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 3 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 4 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 6 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 7 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perijinan	Indeks	80	81,2	101,50	I Program Pelayanan Penanaman Modal 1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota II Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota III Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
								1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	Sdh	91,5	91,5	I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah II Program Pendaftaran Penduduk 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk III Program Pencatatan Sipil 1 Pelayanan Pencatatan Sipil IV Program Pengelolaan Profil Kependudukan 1 Penyusunan Profil Kependudukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	%	Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Kinerja
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	%	42,00	0	0	I Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 1 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2021 (setelah rewiu Inspektorat), diolah

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

1. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang diberikan

sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

B. Program dan Kegiatan

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Bidang Tanaman Pangan
 - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan.
 - b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP.
2. Bidang Hortikultura
 - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
 - b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura.
3. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian
 - a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.
 - b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

C. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.068.448.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp3.044.054.400 atau sebesar 99,21%. Adapun rincian pelaksanaan Tugas Pembantuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Tanaman Pangan

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri dari Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan dan Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan. Adapun alokasi anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp65.170.000,- dan terealisasi sebesar Rp65.089.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,88%.
- b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP. Adapun alokasi anggaran Program tersebut sebesar Rp33.330.000,- dan terealisasi sebesar Rp33.330.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 100 %.

2. Bidang Hortikultura

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp312.250.000 dan terealisasi sebesar Rp293.290.000 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 93,92%.
- b) Program Dukungan Manajemen dengan Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura. Adapun alokasi anggaran Program tersebut sebesar Rp21.250.000,- dan terealisasi sebesar Rp18.250.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 85,88%.

3. Bidang Sarana dan Prasarana pertanian

- a) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp2.545.198.000 dan terealisasi sebesar Rp2.543.197.400 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,92%.
- b) Program Dukungan Manajemen dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Adapun alokasi anggaran program tersebut sebesar Rp91.250.000 dan terealisasi sebesar Rp90.898.000 sehingga persentase capaian anggaran sebesar 99,61%.

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Diselenggarakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Klaten tidak mendapat Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Diselenggarakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten selama tahun 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. Dari Tabel terlihat bahwa capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebesar 100% artinya target yang dicanangkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini seluruhnya tercapai.

3.1.1 Target Kinerja

Target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Provinsi atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dilihat dalam tabel 3.1

3.1.2 Realisasi

Realisasi program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Kabupaten Klaten atas pelaksanaan Tugas Pembantuan dari Provinsi dapat dilihat dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi
yang Dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Bidang tanaman pangan	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/296/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Klaten	DPKPP	Peningkatan produktivitas dan produksi sebesar 65%	65.170.000	65.089.000	99,88	66%	101,54	
			<i>Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan</i>				53.750.000	53.670.000	99,85			
			Sub kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan dan Monev Kegiatan, Aneka Kacang dan Umbi (Daerah). Sosialisasi, Pembinaan dan Monev Kegiatan Akabi Kab. Klaten			1 layanan	26.750.000	26.670.000	99,70	1 layanan	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pen), Koordinasi Pembinaan, Monev, Verifikasi, CPCL Kegiatan Akabi (Kabupaten)			1 layanan	24.000.000	24.000.000	100	1 layanan	100	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi (Pen), Pembinaan, Pendampingan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sereal (Pan)			1 layanan	3.000.000	3.000.000	100	1 layanan	100	
			<i>Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan</i>				11.420.000	11.419.000	99,99			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan. Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih Padi Kabupaten			1 layanan	3.835.000	3.835.000	100	1 layanan	100	
			Sub Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih Jagung Kabupaten. Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan			1 layanan	2.835.000	2.835.000	100	1 layanan	100	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (Pen). Sosialisasi dan Identifikasi CPCL Bantuan Benih			1 layanan	2.250.000	2.250.000	100	1 layanan	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET	
			Sub Kegiatan Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan (Pen). Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Bantuan Benih			1 layanan	2.500.000	2.499.000	99,96	1 layanan	100		
			Program Dukungan Manajemen				33.330.000	33.330.000	100				
			<i>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen TP</i>				<i>33.330.000</i>	<i>33.330.000</i>	<i>100</i>				
			Sub kegiatan Layanan Keuangan. Pengelolaan Perbendaharaan Kabupaten/Kota			12 Bulan	32.330.000	32.330.000	100	12 Bulan	100		
			Sub Kegiatan Layanan Data dan Rekomendasi. Pengawasan Data Tanaman Pangan			12 Bulan	1.000.000	1.000.000	100	12 Bulan	100		
JUMLAH 1								98.500.000	98.419.000	99,92			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
2.	Horti kultura	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/296/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Klaten	DPKPP	Peningkatan produktivitas dan produksi sebesar 65%	312.250.000	293.290.000	93,928	66%	101,54	
			<i>Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura</i>				312.250.000	293.290.000	93,93			
			Sub Kegiatan Sarana Pengembangan Kawasan. Kawasan Kelengkeng			30 Ha; Bibit kelengkeng 7500 kg; Pupuk dolomit 6000 kg; Pupuk NPK 1200 kg; Pupuk organik 150000 kg	312.250.000	293.290.000	93,93	30 Ha; Bibit kelengkeng 7500 kg; Pupuk dolomit 6000 kg; Pupuk NPK 1200 kg; Pupuk organik 150000 kg	100	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET	
			Program Dukungan Manajemen				21.250.000	18.250.000	85,88				
			<i>Kegiatan Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura</i>				<i>21.250.000</i>	<i>18.250.000</i>	<i>85,88</i>				
			Sub Kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal			12 Bulan	3.300.000	3.300.000	100	12 Bulan	100		
			Sub Kegiatan Layanan Perbendaharaan dan Keuangan Satker Daerah			12 Bulan	17.950.000	14.950.000	83,29	12 Bulan	100		
JUMLAH 2								333.500.000	311.540.000	93,42			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET	
3	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/296/2021 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Klaten	DPKPP		2.545.198.000	2.543.197.400	99,92				
			<i>Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</i>				1.994.000.000	1.992.719.600	99,94				
			Embung Pertanian			2 Unit Luas oncoran 40 Ha	240.000.000	240.000.000	100,00	2 Unit Luas oncoran 43 Ha	100,00	107,50	
			Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat			2 Unit IP naik 0,5	254.000.000	252.719.600	99,50	2 Unit IP naik 0,5	100,00	100,00	
			Jaringan Irigasi Tersier			20 Unit Luas oncoran 1.000 Ha	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	20 Unit Luas oncoran 1.080,68 Ha	100,00	108,07	
			<i>Fasilitasi Pupuk dan Pestisida</i>				535.150.000	534.759.800	99,93				

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			e-RDCK untuk Pendataan Penerima Pupuk Bersubsidi			1 Data	343.540.000	343.540.000	100,00	1 Data	100,00	
			Layanan Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi			1 Data	191.610.000	191.219.800	99,80	1 Data	100,00	
			Fasilitasi Pembiayaan Pertanian				16.048.000	15.718.000	97,94			
			Asuransi Pertanian			1 Data	16.048.000	15.718.000	97,94	1 Data	100,00	
			Program Dukungan Manajemen				91.250.000	90.898.000	99,61			
			<i>Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</i>				<i>91.250.000</i>	<i>90.898.000</i>	<i>99,61</i>			

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab/kota	SKPD pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	KET
			Layanan Dukungan Manajemen Satker			12 Bulan	91.250.000	90.898.000	99,61	12 Bulan	100,00	
JUMLAH 3							2.636.448.000	2.634.095.400	99,91			
JUMLAH 1+2+3							3.068.448.000	3.044.054.400	99,21			

Sumber : Data Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2022

3.3 Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat hambatan/permasalahan dalam Realisasi anggaran program dukungan manajemen yang belum optimal dikarenakan:

- a) Belanja perjalanan dinas tidak terserap secara maksimal karena pengaruh pandemi wabah covid-19 sehingga terjadi pembatasan kegiatan koordinasi luar kota/tatap muka;
- b) Honor operasional juga tidak terserap secara keseluruhan karena revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dilakukan berkali-kali sehingga waktu pelaksanaan kegiatan mundur sehingga untuk honor operasional satuan kerja hanya terserap 3 (tiga) bulan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut dalam mengatasi hambatan Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- a. Dilakukan revisi pengalihan rekening belanja perjalanan/rekening yang tidak dapat dilaksanakan selama pandemi covid-19 ke rekening lainnya yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan;
- b. Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dilakukan dengan lebih cermat dan teliti dengan mempertimbangkan kondisi/isu strategis yang sedang terjadi (pandemi covid-19).

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Bidang pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagian substansi pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penetapan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar.

Penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan berbagai masalah pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, adapun komponen SPM Bidang Pendidikan yaitu (1) Jenis Pelayanan Dasar; (2) Mutu Pelayanan Dasar; (3) Penerima Pelayanan Dasar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh oleh peserta didik secara minimal yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini;

b. Pendidikan Dasar

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar;

c. Pendidikan Kesetaraan

Merupakan sekolah bagi peserta didik yang berusia usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf B nomor 5 (lima) mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan, bahwa telah ditetapkan target

capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut tabel rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021:

Tabel 4.1
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	TARGET CAPAIAN	RANCA NGAN APBD TAHUN 2021 (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	54.355	44.501	100%	21.446.800
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	173.130	162.419	100%	140.291.521
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	921	859	100%	2.012.455

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat di deskripsikan bahwa target capaian jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini dan yang akan terlayani sebanyak 44.501 orang yang merupakan siswa yang bersekolah di pendidikan anak usia dini. Target capaian jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dan yang akan terlayani sebanyak 162.419 orang yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan target capaian jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang

berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yang akan terlayani sebanyak 859 orang.

Disamping 3 (tiga) indikator capaian SPM Bidang Pendidikan, dilaporkan pula penghitungan pembiayaan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan dari ketiga indikator SPM Bidang Pendidikan. Penghitungan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dengan rincian berikut:

Tabel 4.2
Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan
Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan Peserta Didik	6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	30.283	19.994.400	
				1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	30.283		
		Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik/ Guru	Minimal memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	1359		272.160
			Kepala Sekolah	Minimal memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	681		
Tenaga Penunjang	Minimal memiliki ijazah SMA/SMK/ Sederajat	2					

2	Pendidikan Dasar	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan peserta didik	1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	92.030	5.166.496,284
				1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	2497	2.250.000
		Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik/ Guru	Minimal memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	9311	30.163.280
				Kepala Sekolah	Minimal memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	
Tenaga Penunjang	Minimal memiliki ijazah SMA/ sederajat	890				
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan Peserta Didik	1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun	822	1.287.200
				1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester	822	
		Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik/ Guru	Minimal memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	126	37.200

			Kepala Sekolah	Minimal memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	11	
			Tenaga Penunjang	Minimal memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat	0	

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021:

Tabel 4.3
Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DILAYANI	RAPBD 2021 (Rp.000)	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021 (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah atas	44.501	21.466.800	44.501	17.644.999,386	100
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	162.419	140.291.521	162.419	134.021.472,214	100

3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7 – 18 tahun yang berpartisipasi pasi dalam pendidikan kesetaraan	859	2.012.455	859	1.732.592,36	100
---	-----------------------	--	-----	-----------	-----	--------------	-----

Sumber : *Data Dinas Pendidikan Klaten Tahun 2021*

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dapat di deskripsikan bahwa jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang akan terlayani dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang terlayani adalah sebanyak 44.501 anak. Sehingga capaian SPM berdasarkan siswa yang terlayani pada Satuan Pendidikan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian SPM berdasarkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang berhak mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini adalah jumlah orang yang terlayani pada jenis pendidikan anak usia dini 44.501 dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan pelayanan pada kedua jenis pelayanan tersebut sebagaimana pada kolom 4 tabel 2.1 (54.355), yaitu sebesar 81,87% (Angka Partisipasi Kasar).

Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang akan terlayani dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang terlayani adalah sebanyak 162.419 (SD sebanyak 110.905 anak dan SMP sebanyak 51.454 anak). Sehingga capaian SPM berdasarkan siswa yang terlayani pada Satuan Pendidikan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian SPM berdasarkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berhak mendapat pelayanan pendidikan anak usia dini adalah jumlah orang yang terlayani pada jenis pendidikan anak usia dini 44.501 dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan pelayanan pada kedua jenis pelayanan tersebut sebagaimana pada kolom 4 tabel 2.1 (173.130), yaitu sebesar 93,81% (Angka Partisipasi Kasar).

Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yang akan terlayani dengan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan yang terlayani adalah sebanyak 859 anak (Paket A : 22 anak, Paket B : 156 anak dan Paket C : 681 anak). Sehingga capaian SPM berdasarkan siswa yang terlayani pada Satuan Pendidikan Kesetaraan sesuai target tahunan mencapai 100%. Sedangkan realisasi capaian SPM berdasarkan jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berhak mendapat pelayanan pendidikan kesetaraan adalah

jumlah orang yang terlayani pada jenis pendidikan anak usia dini 44.501 dibagi jumlah orang yang berhak mendapatkan pelayanan pada kedua jenis pelayanan tersebut sebagaimana pada kolom 4 tabel 2.1 (921), yaitu sebesar 93,27%. (Angka Partisipasi Kasar).

Selanjutnya realisasi penghitungan pembiayaan mutu pelayanan dasar bidang berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Jenis Indikator	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar			
					Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan Peserta Didik	30.283	28.064	92,67	8.419.200	
				30.283	28.064	92,67		
		Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik/ Guru	1.359	1.359	100	209.606,85	
				Kepala Sekolah	681	681		100
Tenaga Penunjang	2	2	100					
2	Pendidikan Dasar	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan peserta didik	92.030	92.030	100	4.591.551,85	
				2.497	2.497	100	1.665.267,57	
		Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik/ Guru	9.311	9.311	100	30.025.885,53	
				Kepala Sekolah	602	602		100
				Tenaga Penunjang	890	890		100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa	Perlengkapan Peserta Didik	822	822	100	1.155.386,49	
				822	822	100		
		Jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik/ Guru	126	126	100	37.200	
				Kepala Sekolah	11	11		100
				Tenaga Penunjang	0	0		-

Sumber : Data Dinas Pendidikan Klaten Tahun 2021

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan SPM Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Alokasi Anggaran SPM Bidang Pendidikan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)					Sumber lain yang sah
		APBN		APBD			
		BTL	BL	BTL	BL		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Pendidikan Anak Usia Dini			19.994.400	1.231.200		
2	Pendidikan Dasar			1.864.000	142.941.555,141		
3	Pendidikan Kesetaraan			312.000	1.620.455		

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Klaten 2021

Anggaran dalam APBD tersebut termasuk dana BOS yang dialokasikan untuk sekolah SD dan SMP Pada tahun 2021, Dana BOS SMP sebesar Rp48.796.479.780 sedangkan BOS SD sebesar Rp68.929.404.361.

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021. Berikut Tabel Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

Tabel 4.6
Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Pendidikan
Tahun 2021
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	Keterangan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	5.188 orang	
2	Pendidikan Dasar	12.485 orang	Guru SD/MI 8.678, Guru SMP/MTs 3.807
3	Pendidikan Kesetaraan	142 orang	
	Jumlah	17.815 orang	

Sumber : Data Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan dan solusi yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan SPM Bidang Pendidikan.

Tabel 4.7
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2021

Permasalahan	Upaya Mengatasi
Partisipasi anak usia sekolah jenjang pendidikan anak usia dini masih rendah dibandingkan dengan partisipasi pendidikan dasar serta masih terdapat anak usia sekolah yang putus atau tidak sekolah;	<ol style="list-style-type: none">1. Perluasan akses pendidikan anak usia dini melalui program 1 (satu) desa terdapat 1 (satu) lembaga PAUD2. Perluasan akses pendidikan dasar melalui kegiatan penambahan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat.3. Melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah berkerjasama dengan instansi terkait
Belum semua pendidik terutama pada jenjang PAUD yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana	Mendorong pendidik untuk menempuh pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan menggunakan acuan Standar Teknis Penerapan SPM yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pasal 2 ayat 3, SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 12 jenis pelayanan dasar, yaitu :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf B nomor 2 (dua) mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya.

Berikut ini tabel rencana capaian dan indikator penerima layanan SPM Kesehatan Tahun 2021.

Tabel 4.8
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Orang yang berhak mendapatkan Pelayanan	Jumlah Orang yang akan Dilayani	Target Capaian	Rancangan APBD Tahun 2021 (RP.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil	15.386	15.386	100 %	2.030.190,9
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	14.734	14.734	100%	2.555.979,5
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN3)	14.707	14.707	100 %	22.695,856

4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	64.233	64.233	99 %	1.459.425,812
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	136.598	136.598	100 %	975.533,3
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Skrining Kesehatan Sesuai Standar pada usia produktif (15-59 tahun)	726.968	726.968	100 %	1.201.351
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>=60 tahun)	206.823	206.823	100 %	516.305,5
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	315.318	315.318	100 %	49.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	37.485	37.485	100 %	32.677,5
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	2.929	2.929	100 %	215.112,8
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuber kulosis	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC	13.687	13.687	100 %	148.212,2

12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	16.949	16.949	100 %	559.165
----	---	---	--------	--------	-------	---------

Tabel 4.9
Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar
Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp. 000)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA	15.386	1.636.038,6
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Fotograf	14.734	2.739.590,5
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA	14.707	107.176
4	Pelayanan kesehatan balita	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	64.233	1.686.376,152
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Buku Raport Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Formulir Rekapitulasi	136.598	618.160,8

		Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah		
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	726.968	188.154,112
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Buku Kesehatan lansia	206.823	258.390
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	315.318	59.593
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	37.485	25.155
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Media KIE	2.929	154.525
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur	13.687	131.401,100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	16.949	499.804,891

Sumber : Data Perhitungan Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021.

4.2.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota belum sesuai dengan rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021. Belum ada target yang terpenuhi 100% karena berbagai permasalahan, di antaranya kondisi pandemi Covid-19. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2021:

Tabel 4.10
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6):(4) X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DI LAYANI	RAPBD 2021 (000)	JUMLAH ORANG YANG TER LAYANI	APBD TAHUN 2021 (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	Cakupan Pelayanan Ibu Hamil	15.386	2.030.190,9	14.653	981.627,004	95,24
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	14.734	2.555.979,5	14.734	2.430.959,79	100
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (KN3)	14.707	22.695,856	14.444	40.460	98,21
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	64.233	1.459.425,812	58.236	915.103,465	90,66
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Cakupan Skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	136.598	975.533,3	79.606	133.098,875	58,28
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Cakupan Skrining Kesehatan Sesuai	726.968	1.201.351	617.753	111.080,6	84,98

		Standar pada usia produktif (15-59 tahun)					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Cakupan Skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>=60 tahun)	206.823	516.305,5	193.199	119.038,4	93,41
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	315.318	49.000	214.927	27.305,752	68,16
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	37.485	32.677,5	37.485	8.271,072	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Cakupan pelayanan kesehatan penderita gangguan jiwa berat	2.929	215.112,8	2.825	88.398	96,45
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC	13.687	148.212,2	3.374	75.559,8	24,65
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	16.949	559.165	14.975	436.179,34	88,35

Tabel 4.11
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM
Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
				Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA	15.386	14.653	95,24	981.627,004
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Fotograf	14.734	14.734	100	2.430.959,79
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA	14.707	14.444	98,21	40.460
4	Pelayanan kesehatan bayi balita	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	64.233	58.236	90,66	915.103,465
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Buku Raport Kesehatanku, Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Formulir	136.598	79.606	58,28	133.098,875

		Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah				
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	726.968	617.753	84,98	111.080,6
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Buku Kesehatan lansia	206.823	193.199	93,41	119.038,4
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	315.318	214.927	68,16	27.305,752
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	37.485	37.485	100	8.271,072
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Media KIE	2.929	2.825	96,45	88.398
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan	13.687	3.374	24,65	75.559,8

		Pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur				
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	16.949	14.975	88,35	436.179,34

Sumber : Data Perhitungan Capaian SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten Klaten 2021.

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat dideskripsikan bahwa capaian terendah adalah pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, sebesar 24,65% karena penghitungan sasaran berdasarkan proyeksi, bukan sasaran riil. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar masih baru tercapai 58,28% karena pembelajaran tatap muka belum dilaksanakan sehingga skrining kesehatan juga menurun. Capaian yang tergolong masih rendah juga pada pelayanan kesehatan penderita hipertensi baru sebesar 68,16% karena masih rendahnya kesadaran memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, apalagi jika tidak merasakan keluhan. Sedangkan cakupan pelayanan kesehatan yang memenuhi target 100% adalah pelayanan kesehatan ibu bersalin dan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus.

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten berjumlah Rp8.104.365.155,- namun penyerapannya hanya sebesar Rp5.367.082.098,- sebesar 66,22%.

Tabel 4.12
Alokasi Anggaran SPM Bidang Kesehatan Daerah
Kabupaten Klaten
Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)				Sumber lain yang sah
		APBN		APBD		
		BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil				1.636.038,6	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin				2.739.590,5	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir				107.176	
4	Pelayanan kesehatan bayi balita				1.686.376,152	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar				618.160,8	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif				188.154,112	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut				258.390	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi				59.593	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus				25.155	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				154.525	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis				131.401,1	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).				499.804,891	

4.2.5 Dukungan Personil

Penanggung jawab penerapan SPM bidang kesehatan terdiri dari beberapa profesi dengan membentuk tim-tim, profesi dalam membantu pencapaian SPM terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, nutrisisionis, petugas gizi, penyuluh kesehatan masyarakat, fisioterapis, tenaga kefarmasian, apoteker, sanitarian dan ahli lab. Rincian dukungan personil berdasarkan profesinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.13
Jumlah Personil Berdasarkan Jenis Profesi
di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dokter Umum	21	68	89
2	Dokter Gigi	3	29	32
3	Perawat	67	157	224
4	Bidan	-	467	467
5	Kesehatan Masyarakat	19	59	78
6	Kesehatan Lingkungan	10	28	38
7	Gizi/ Nutrisisionis	6	40	46
8	Ahli Lab Medik	3	38	41
9	Terapi Fisik	9	21	30
10	Teknis Kefarmasian	3	31	34
11	Apoteker	4	30	34
JUMLAH		145	968	1.113

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan:

- 1) Akses pelayanan dan durasinya dibatasi karena masih adanya kondisi pandemi covid
- 2) Kekhawatiran mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan karena takut tertular Covid-19
- 3) Kegiatan terfokus pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19
- 4) Penyerapan anggaran belum maksimal karena aturan baru perjalanan dinas dengan BBM (menyulitkan dalam pertanggungjawaban dokumen)
- 5) Kekurangan SDM, satu petugas merangkap dalam pekerjaan berbagai tim
- 6) Adanya pindah tempat/alamat meskipun sdh terhitung dalam sasaran, kematian sebelum semua pelayanan tercukupi, atau belum saatnya mendapatkan pelayanan sesuai definisi operasional karena memang belum saatnya (misalnya ibu hamil belum mendapat K4 karena masih tergolong ibu hamil baru)

- 7) Adanya saat terjadi kekosongan vaksin bayi karena terfokus pada vaksin Covid-19
 - 8) Kegiatan pembelajaran tatap muka masih daring sehingga menurunkan cakupan pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar
 - 9) Hari operasional buka posyandu dan posbindu tidak rutin setiap bulan apabila saat kasus Covid-19 melonjak pada pertengahan tahun 2021
 - 10) Keterbatasan dalam sistem pelaporan, sarana mobilitas, dan anggaran.
- b. Solusi mengatasi permasalahan :
- 1) Pelayanan yang dapat dilakukan secara online tetap dilakukan
 - 2) Membagi tim dan tetap menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar dengan keterbatasan jumlah personil
 - 3) Penghitungan sasaran perlu disesuaikan dengan data sesungguhnya tidak menggunakan sasaran estimasi

4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Klaten dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DI LAYANI	TARGET CAPAIAN	RANCA NGAN APBD TAHUN 2021 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94.195	6.588	100%	4.157.362,254
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.052	2.052	100%	2.999.646

Tabel 4.15
Penghitungan Pembiayaan Mutu Target Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp. 000)
1	2	3	4	5
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	6.588	4.461.094,254,-
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	2.052	2.862.146,-
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses		

		aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan		
		Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T		

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2021

Tabel 4.16
Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DI LAYANI	RAPBD 2021 (Rp. 000)	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021 (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.588	4.157.362,254	6.588	3.777.359,3	100

2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2.052	2.999.646	2.052	2.737.992,437	100
----	--	--	-------	-----------	-------	---------------	-----

Tabel 4.17
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
				Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	6.588	6.588	100	3.777.359,3
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	2.052	2.052	100	2.737.992,437
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat				

		yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan				
		Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T				

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Sebesar Rp7.323.240.254,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)				Sumber lain yang sah
		APBN		APBD		
		BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7
1.	- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				4.461.094,254,-	

2.	- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik				2.862.146	
----	---	--	--	--	-----------	--

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021 sebanyak 31 personil. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.19
Dukungan Personil SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Percapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	Nama Bagian	Jumlah Dukungan Personil
1	- Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Bidang kawasan Permukiman	31 Orang
2	- Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik		

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.20.
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2021

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
- Pelaksanaan yang melibatkan pendanaan dari desa	- Pelaksanaan sesuai dengan anggaran yang ada tanpa melibatkan pendanaan dari desa berdasarkan data perencanaan yang sudah diketahui pihak desa	- Melaksanakan sesuai dari perencanaan awal (sesuai dari survey perencana yang diketahui pihak desa)

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Perumahan dan Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	JUMLAH ORANG YANG BERHAK MENDAPATKAN PELAYANAN	JUMLAH ORANG YANG AKAN DI LAYANI	TARGET CAPAIAN	RANCANGAN APBD TAHUN 2021 (Rp. 000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	N/A	4 unit (16 orang)	100%	140.000,-
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A	N/A	100%	

Pada pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara

korban bencana yang memperoleh rumah layak huni sebanyak N/A karena tidak terdapat bencana di tahun 2021.

Pada pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni sebanyak N/A karena tidak ada relokasi program pemerintah kabupaten di tahun 2021.

Tabel 4.22
Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp. 000)
1	2	3	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	N/A	
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	4 unit (16 orang)	140.000,-
		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	N/A	
		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	N/A	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	N/A	
		Penyediaan Rumah Layak Huni	N/A	
		Subsidi Uang Sewa	N/A	

Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana berjumlah N/A karena tidak ada bencana, dan sewa rumah itu bukan khusus untuk korban bencana melainkan untuk umum yang bertempat di rusunawa. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana juga N/A karena tidak

ada bencana, dan telah dianggarkan 140.000.000,- atau sebanyak 4 unit rumah dengan estimasi jumlah 16 orang.

Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan, Penyediaan Rumah Layak Huni, dan Subsidi Uang Sewa juga N/A karena tidak dianggarkan dan tidak ada relokasi program pemerintah kabupaten di tahun 2021.

4.4.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021 :

Tabel 4.23
Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6): (4) X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DI LAYANI	RAPBD 2021 (Rp. 000)	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI	APBD TAHUN 2021 (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	4 unit (16 orang)	140.000	N/A	0	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat rakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	N/A		N/A		0

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dengan indikator capaian Jumlah Warga Negara korban bencana

yang memperoleh rumah layak huni adalah N/A karena tidak ada bencana di tahun 2021.

Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni adalah N/A karena tidak terjadi relokasi program pemerintah kabupaten di tahun 2021.

Tabel 4.24
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM
Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
				Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	N/A	N/A	100	
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	4 unit (16 orang)	N/A	100	0
		Pembangunan Baru di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	N/A	N/A	100	
		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	N/A	N/A	100	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	N/A	N/A	0	0
		Penyediaan Rumah Layak Huni	N/A	N/A	0	0
		Subsidi Uang Sewa	N/A	N/A	0	0

Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana N/A karena tidak ada bencana, dan sewa rumah itu untuk umum bukan hanya korban bencana. Sewa rumah tersebut bertempat di rusunawa. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana juga N/A karena tidak ada bencana, dan telah dianggarkan 140.000.000,- atau sebanyak 4 unit rumah dengan estimasi jumlah 16 orang. Karena tidak adanya bencana tahun 2021, maka capaian 100%.

Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan, Penyediaan Rumah Layak Huni, dan Subsidi Uang Sewa juga N/A karena tidak dianggarkan dan tidak ada relokasi program pemerintah kabupaten di tahun 2021 maka capaian 0%.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target SPM Bidang Perumahan Sebesar Rp140.000.000,- dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.25
Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)				Sumber lain yang sah
		APBN		APBD		
		BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				140.000,-	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota				0	

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 sebanyak 27 orang. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.26
Dukungan Personil SPM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	Nama Bagian	Jumlah Dukungan Personil
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Bidang Perumahan	27 Orang
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota		

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.27
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Perumahan Rakyat

PERMASALAHAN	SOLUSI	RENCANA TINDAK LANJUT
- Belum ada koordinasi antara Disperwaskim dengan BPBD sehingga pengumpulan data korban bencana masih sulit.	- Penyamaan indikator bencana yang ada di SPM dengan indikator yang terdapat di BPBD.	- Perlu koordinasi dan sinkronisasi antar OPD yang menangani bencana.

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh 3 (tiga) sub urusan. Sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan Sub Urusan kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sebagai bentuk implementasi atau penegakan Perda/Perkada. Sedangkan Sub urusan bencana daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten.

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

- a. Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :
Ketentraman dan ketertiban umum
- b. Sub Urusan Kebakaran adalah :
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan kebakaran daerah Kabupaten/ Kota, jenis pelayanan dasar yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, paling sedikit memuat:
 - 1) Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
 - 2) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - 3) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
 - 4) Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
 - 5) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
- c. Sub Urusan bencana daerah kabupaten/kota adalah :
 - 1) Pelayanan informasi rawan bencana
Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling tidak memuat:
 - a. penyusunan kajian resiko bencana;
 - b. komunikasi informasi edukasi rawan bencana.
 - 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana paling tidak memuat :
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - f. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling tidak memuat :
 - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
 - b. respon cepat darurat bencana;
 - c. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - d. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 100 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah 100% jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Target capaian standar pelayanan minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 4.28
Rencana Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	Rancangan APBD (Rp.)
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	15.000.000
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	509.367.000

Tabel 4.29
Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	APBD-P (Rp.000)
1	2	3	4	5
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda sesuai SOP	N/A	20.000
		Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	N/A	

		Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	N/A	
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	559	840.917
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	559	

Tabel 4.30
Rencana Target Pencapaian SPM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	Rancangan APBD (Rp.)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	158.936.000
2.	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	3.327.799.543
3.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2.162.436.800

Tabel 4.31
Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis pelayanan dasar	Mutu layanan dasar	Target (jumlah orang yang akan dilayani)	APBD-P (Rp.000)
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	N/A	
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	3.400	804
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.812	867.586,8
	Pelayanan penyela matan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.181	1.753.747,8
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	4.181	
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	4.181	
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	-	
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana, Aktivasi kawasan komando penanganan darurat bencana	-	

Jenis pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, target 100% dari seluruh jumlah warga penduduk Kabupaten Klaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Mindset indikator penerapan SPM pelayanan trantibumlinmas dalam Permendagri 121 Tahun 2018 adalah terbalik, yaitu apabila tidak ada warga yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada maka SOP penegakan produk hukum daerah telah sesuai, dan apabila ada warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan produk hukum daerah bisa diartikan dua: 1) penegakan Perda dan Perkada menyimpang dari SOP, dan 2) ketika penegakan Perda dan Perkada sudah sesuai SOP namun ada warga negara yang terkena dampak bisa disebabkan musibah yang tidak dapat dikendalikan atau diluar kemampuan manusia.

Sedangkan pada jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui Seksi Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten adalah 100% (seratus persen) dimana pemerintah harus hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Pada tabel diatas seluruh Mutu Layanan Dasar dalam Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum secara target jumlah orang yang akan terlayani yang terhadap dampak penegakan perda dan perkada adalah N/A karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya tidak ada warga negara yang mengalami kerugian akibat penegakan perda/perkada. Seluruh mutu layanan dasar dalam Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah teranggarkan dalam sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada.

Seluruh Mutu Layanan Dasar dalam Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran secara target adalah jumlah orang yang akan terlayani yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran. Seluruh mutu layanan dasar dalam pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sudah teranggarkan dalam sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota.

Mutu layanan dasar untuk pelayanan informasi rawan bencana adalah Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana dan melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi kawasan per jenis bencana, bahwa belum semua mutu layanan teranggarkan. Untuk mutu layanan dasar

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sudah teranggarkan. untuk mutu layanan dasar pelayanan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana, dan Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana telah teranggarkan dalam APBD.

4.5.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Realisasi pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32
Realisasi Capaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PERSENTASE
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	N/A	N/A	100 %
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	559	559	100 %

Tabel 4.33
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
				Jumlah Orang yang Terlayani	%	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Perda sesuai SOP	N/A	N/A	100	19.400,7
		Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	N/A	N/A	100	
		Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	N/A	N/A	100	
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	559	559	100	836.022,676
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	559	559	100	

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan rencana target capaian dan indikator sebesar 100% karena tidak ada warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada selama tahun 2021. Sedangkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan kebakaran daerah/kota, realisasinya sesuai dengan rencana target capaian dan indikator sebesar 100% dimana warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran tertangani semua kecuali tingkat waktu tanggap (*response time*) karena kendala jarak yang jauh sehingga waktu sampai lokasi kebakaran lebih dari 15 menit yang melewati *response time*.

Tabel 4.34
Realisasi Capaian SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PERSENTASE
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	3.400	3.400	100 %
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.812	4.812	100 %
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.181	4.181	100%

Tabel 4.35
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan ter layani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
				Jumlah Orang yang Terlayani	%	Anggaran (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana, Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	N/A	N/A	N/A	
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	3.400	3.400	100	774,8
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4.812	4.812	100	758.221,806
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.181	4.181	100	1.507.497

		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	4.181	4.181	100	
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	4.181	4.181	100	
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas				
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana				

Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan bencana daerah untuk jenis layanan Pelayanan informasi lawan bencana pada indikator capaian Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana Badan Penanggulangan bencana Daerah baru melaksanakan sosialisasi komunikasi dan edukasi (KIE) di daerah rawan bencana sebanyak 21 desa secara luring dan di 4 sekolah secara daring dan di Stikes Duta Gama, serta pada Unit Layanan Disabilitas (ULD). Untuk jenis layanan dasar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan indikator capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana lebih terkonsentrasi di daerah KRB (Kawasan Rawan Bencana) 3 di lereng Merapi sebanyak 4.662 orang dan pelaksanaan Desa Tangguh Bencana di 3 desa (Kemalang, Balerante dan Tegalmulyo). Untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan indikator capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban, pelaksanaan pencarian pertolongan ,evakuasi korban bencana dan pendataan terhadap warga negara yang terkena /menjadi korban bencana sebanyak 4.181.

4.5.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.36
Alokasi Anggaran SPM Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)				Sumber lain yang sah
		APBN		APBD		
		BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	-	-	-	20.000	-
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-	-	-	840.917	-

Alokasi anggaran untuk kedua jenis pelayanan dasar diatas semuanya bersumber dari APBD Belanja Langsung Kabupaten Klaten sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2021.

Tabel 4.37
Alokasi Anggaran SPM Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)				Sumber lain yang sah
		APBN		APBD		
		BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	0	0	0	804	0
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	0	0	0	867.586,8	0
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban	0	0	0	1.753.747,8	0

4.5.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh personil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Sub Urusan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran

Personil Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2020 sebanyak 106 (seratus enam) orang. Secara tugas fungsi, personil tersebut terbagi dua yaitu anggota Satpol PP itu sendiri sebanyak 78 orang dan anggota Pemadam Kebakaran sebanyak 28 orang. Adapun rincian personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten yang mendukung pelaksanaan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.38
Jumlah Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	PENDIDIKAN	SATPOL PP (ORANG)	DAMKAR (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
1	SD	0	1	1
2	SMP	2	2	4
3	SMA	56	21	77
4	DIPLOMA	6	2	8
5	S1	9	2	11
6	S2	5	0	5
JUMLAH		78	28	106

Tabel 4.39
Jumlah Personil Berdasarkan Golongan Kepegawaian pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	GOLONGAN	SATPOL PP (ORANG)	DAMKAR (ORANG)	JUMLAH (ORANG)
1	Non Golongan	36	18	54
2	I	0	0	0
3	II	12	6	18
4	III	25	4	29
5	IV	5	0	5
JUMLAH		78	28	106

b. Sub Urusan Bencana Daerah

Dukungan personil pelaksanaan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal di masa pandemi Covid-19 ini melibatkan banyak personil lintas perangkat daerah, namun dukungan penuh dari personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang paling utama antara lain dari Tim reaksi cepat, Pusdalpos , ASN, dan THL

Tabel 4.40
Dukungan Personil SPM Lintas Perangkat Daerah

NO	PROFESI	JUMLAH
1.	PNS	28
2.	Tenaga Harian Lepas	30
3.	Tim Reaksi Cepat	30
4.	Puspalops	2
		90

Tabel 4.41
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Golongan dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai			
Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	
II	6 Orang	-	6 Orang
III	8 Orang	7 Orang	15 Orang
IV	6 Orang	1 Orang	7 Orang
Jumlah	21 Orang	8 Orang	28 Orang

Tabel 4.42
Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin

Jumlah Pegawai			
Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S2	5 Orang	2 Orang	7 Orang
S1	8 Orang	4 Orang	12 Orang
D3	1 Orang	- Orang	1 Orang
SLTA	6 Orang	2 Orang	8 Orang
Jumlah	20 Orang	8 Orang	28 Orang

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target SPM adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan

1. Regulasi multi tafsir terutama dalam menargetkan indikator pelaksanaan SPM sesuai Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Peraturan tentang SPM belum dapat dipahami secara utuh oleh personil yang bertugas karena keterbatasan waktu akibat padatnya pekerjaan.

3. Kekurangan jumlah personil pemadam kebakaran untuk menjangkau wilayah Kabupaten Klaten yang tiap harinya personil siaga terbagi hanya 2 shift.
4. Jumlah pos pemadam yang hanya 1, tidak bisa menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Klaten, sehingga standar response time yang ditetapkan dalam satu wilayah manajemen kebakaran 7,5 km dalam 15 menit seringkali tidak terpenuhi.
5. Kurangnya anggaran yang mencukupi kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban umum dan kebakaran.
Tidak ada sub kegiatan tersendiri yang khusus menangani penerapan SPM, baik sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran
6. Kurangnya kompetensi sumber daya yang sesuai per jenis bencana
7. Sarana prasarana penanggulangan bencana yang kurang memadai /sudah harus diganti
8. Pembinaan relawan sebagai garda depan penanggulangan bencana

b. Solusi

1. Usulan perubahan regulasi mengenai layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada dengan merubah dengan perhitungan jumlah laporan yang masuk terjadinya pelanggaran perda dengan jumlah yang ditangani.
2. Perlunya penyelenggaraan sosialisasi perundang-undangan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
3. Perlunya penambahan pesonil pemadam kebakaran untuk menjadi petugas siaga minimal 1 hari dibagi 3 shift.
4. Perlunya penambahan posko damkar di daerah, berdasarkan kajian Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) yang pernah dilaksanakan (Tahun 2011) untuk menjangkau seluruh wilayah kabupaten klaten setidaknya harus ada 7 posko pemadam kebakaran.
5. Mengupayakan pemenuhan anggaran yang mencukupi kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban umum.
6. Di Tahun 2021, kegiatan penerapan SPM dimasukkan dalam sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan capaian SPM.
7. Meningkatkan kompetensi sumber daya dengan memperbanyak pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
8. Memperbaharui peralatan kebencanaan
9. Meningkatkan koordinasi dengan komunitas relawan

4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah - masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pada lampiran huruf B nomor 5 (lima) mengenai target dan indikator penerima layanan SPM urusan sosial, bahwa telah ditetapkan target capaian setiap tahunnya yaitu 100% untuk setiap jenis pelayanan dasar dan indikator pencapaiannya. Berikut ini tabel rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Urusan Sosial tahun 2021:

Tabel 4.43
Rencana Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	Jumlah Orang yang berhak mendapat Pelayanan	Jumlah Orang yang akan Terlayani	Target Capaian (%)	Rancangan APBD Tahun 2021 (Rp 000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	10.425	300	100	682.210
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar anak terlantar di luar panti	2.148	654	100	425.010
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	12.224	1.971	100	1.500.000
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	379	151	100	230.330
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	67	67	100	431.340

Tabel 4.44
Penghitungan Pembiayaan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Anggaran (Rp 000)
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban bencana Penyediaan sandang Penyediaan alat bantu Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar Layanan Data dan Pengaduan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum	300	602.766

		Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		Layanan Rujukan		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban bencana		
		Penyediaan sandang		
		Penyediaan alat bantu		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar		
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	654	425.010
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		

		Layanan Data dan Pengaduan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		Layanan Rujukan		
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban bencana		
		Penyediaan sandang		
		Penyediaan alat bantu		
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar		

		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	1.971	1.000.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		
		Layanan Data dan Pengaduan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		Layanan Rujukan		
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban		

	bencana		
	Penyediaan sandang		
	Penyediaan alat bantu		
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial		
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	151	216.966,564
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak		
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar		
	Layanan Data dan Pengaduan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial		
	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan		

		Kendaraan Baru		
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga		
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga		
		Layanan Rujukan		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Penyediaan Permakanan	67	388.730
		Penyediaan Sandang		
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi		
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)		
		Pelayanan Dukungan Psikososial (Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan dan/atau rujukan)		

Sumber : Data Perhitungan Rencana Target Pencapaian SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.43 dan 4.44 di atas dapat dideskripsikan bahwa rencana target capaian jumlah penyandang disabilitas terlantar yang akan terlayani mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 300 orang.

Rencana target capaian jumlah anak terlantar yang akan terlayani mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 654 orang.

Rencana target capaian jumlah lanjut usia terlantar yang akan terlayani mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 1.971 orang.

Rencana target capaian jumlah gelandangan dan pengemis yang akan terlayani mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 151 orang.

Rencana target capaian jumlah korban bencana alam maupun bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Kabupaten Klaten adalah 67 orang.

4.6.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kabupaten Klaten sesuai dengan rencana target capaian dan indikator penerima layanan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten tahun 2021. Berikut ini tabel realisasi capaian SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Tabel 4.45
Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	RENCANA TARGET		REALISASI CAPAIAN SPM		CAPAIAN (6):(4)X 100%
			JUMLAH ORANG YANG AKAN DI LAYANI (orang)	RAPBD 2021 (Rp 000)	JUMLAH ORANG YANG TERLAYANI (orang)	APBD TAHUN 2021 (Rp 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	300	682.210	300	571.266	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar anak terlantar di luar panti	654	425.010	654	421.609,6	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	1.971	1.500.000	1.971	880.400	100

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	151	230.330	120	195.321,601	79,47
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	67	431.340	67	361.414,9	100

Tabel 4.46
Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
				Jumlah orang yang terlayani	(%)	Anggaran (Rp 000)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban bencana	300	300	100	571.266
		Penyediaan sandang				
		Penyediaan alat bantu				
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial				
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar				

		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
		Layanan Data dan Pengaduan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial				

		Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga				
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
		Layanan Rujukan				
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban bencana	654	654	100	421.609,6
		Penyediaan sandang				
		Penyediaan alat bantu				
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial				
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar				
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
		Layanan Data dan Pengaduan, yang				

		dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga				
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
		Layanan Rujukan				
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan				

	sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban bencana	1.971	1.971	100	880.400
	Penyediaan sandang				
	Penyediaan alat bantu				
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial				
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar				
	Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
	Layanan Data dan Pengaduan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
	Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki				

		<p>Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru</p> <p>Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga</p> <p>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</p> <p>Layanan Rujukan</p>				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	<p>Penyediaan Permakanan (diberikan paling lama 7 hari), dilaksanakan sesuai peraturan perUU mengenai bantuan sosial untuk korban bencana</p> <p>Penyediaan sandang</p> <p>Penyediaan alat bantu</p> <p>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial</p> <p>Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar</p>	151	120	79,4 7	195.321,601

		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak				
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan, Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar				
		Layanan Data dan Pengaduan, yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kab/Kota dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial				
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan, Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti				

		dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru				
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga				
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				
		Layanan Rujukan				
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Penyediaan Permakanan	67	67	100	361.414,9
		Penyediaan Sandang				
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)				
		Pelayanan Dukungan Psikososial (Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan dan/atau rujukan)				

Sumber : Data Perhitungan Capaian SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 4.45 dan 4.46 di atas dapat dideskripsikan bahwa antara jumlah penyandang disabilitas terlantar yang akan terlayani adalah 300 orang sama dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 300 orang. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti sebesar 100%.

Realisasi capaian antara jumlah anak terlantar yang akan terlayani adalah 654 orang sama dengan jumlah anak terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 654 orang. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga

negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti sebesar 100%.

Realisasi capaian antara jumlah lanjut usia terlantar yang akan terlayani adalah 1.971 orang sama dengan jumlah lanjut usia terlantar yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 1.971 orang. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti sebesar 100%.

Realisasi capaian antara jumlah gelandangan dan pengemis yang akan terlayani adalah 151 orang lebih besar dari jumlah gelandangan dan pengemis yang terlayani dan mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah 120 orang. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti sebesar 79,47%.

Realisasi capaian antara jumlah korban bencana yang akan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana dengan jumlah korban bencana yang terlayani dan mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana adalah sama yaitu 67 orang. Sehingga realisasi capaian SPM untuk indikator capaian kinerja jumlah warga negara korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana di Kabupaten Klaten sebesar 100%.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2021 sebesar Rp2.633.472.564,- terdiri dari Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp1.869.742.564,- dan Program Penanganan Bencana sebesar Rp763.730.000,-

Tabel 4.47
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Klaten Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp.000)				Sumber lain yang sah
		APBN		APBD		
		BTL	BL	BTL	BL	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti				602.766	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti				425.010	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti				1.000.000	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti				216.966,564	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten				388.730	

Sumber : Data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil-personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sebanyak 333 orang. Berikut ini Tabel rincian dukungan personil penerapan SPM urusan sosial di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten:

Tabel 4.48
Jumlah Personil Pendukung Penerapan SPM Urusan Sosial Berdasar
Status Kepegawaian di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	17	
2	THL	18	
3	TKSK	26	
4	PKH	217	
5	Tagana	50	
6	Sakti Pesos	3	
7	Korda BPNT	1	
8	Pendamping Rehabsos	1	
JUMLAH		333	

Tabel 4.49
Dukungan Personil Penerapan SPM Urusan Sosial Tahun 2021
di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Dukungan Personil	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	283	PNS, THL, TKSK, PKH, Sakti Peksos, Korda BPNT dan Pendamping Rehabsos
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar anak terlantar di luar panti	283	PNS, THL, TKSK, PKH, Sakti Peksos, Korda BPNT dan Pendamping Rehabsos
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	283	PNS, THL, TKSK, PKH, Sakti Peksos, Korda BPNT dan Pendamping Rehabsos
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	65	PNS, THL, TKSK, Sakti Peksos, dan Pendamping Rehabsos
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	333	PNS, THL, TKSK, PKH, Sakti Peksos, Tagana, Korda BPNT dan Pendamping Rehabsos

Sumber : Data Dukungan Personil Penerapan SPM Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Berikut ini Tabel permasalahan yang dialami dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten :

Tabel 4.50
Permasalahan dan Solusi SPM Bidang Urusan Sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	SUMBER	PERMASALAHAN	LANGKAH PENYELESAIAN
1	2	3	4
1	Internal	1. Permasalahan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial terkait penerapan SPM yang utama adalah permasalahan data; belum tersedianya data yang valid terkait anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan dan pengemis.	1. Melaksanakan pendataan terkait urusan SPM bidang urusan Sosial dengan pemutakhiran data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara periodik didukung penganggaran yang memadai.
		2. Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk urusan penanganan PMKS yang berupa Rumah Singgah (RUSI) kondisi sarana dan prasarannya amat memprihatinkan.	2. Mengajukan usulan agar RUSI mendapatkan perhatian secara khusus agar kebutuhan Sarana dan prasarana bisa dipenuhi (Pembangunan Gedung Rumah Singgah)
		3. Sistem pelaporan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum terbangun secara terintegrasi	3. Perlu membangun sistem pelaporan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terintegrasi
2	Eksternal	1. Penanganan SPM bidang urusan sosial belum mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah Daerah.	1. Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk memberikan dukungan dalam penangan SPM bidang urusan Sosial
		2. Masih banyak anggapan bahwa permasalahan yang ada di masyarakat itu menjadi urusan Dinas Sosial; sehingga	2. Melibatkan peran lintas sektor dalam rangka dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, khususnya SPM bidang

		permasalahan sosial tersebut belum bisa ditangani secara maksimal.	urusan Sosial.
		3. Belum ada sinergitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui Corporate Sisial Responsbiity (CSR)	3. Mengoptimalkan koordinasi dengan forum CSR dalam rangka penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya SPM urusan Sosial.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Laporan yang telah disusun diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan yang telah diraih, terdapat beberapa capaian kinerja di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2021 yang hasilnya masih belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan perbaikan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan di masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, selanjutnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna mewujudkan Kabupaten Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Sejahtera***.

Klaten, Maret 2022



HI SRI MULYANI, S.M.

LAMPIRAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021

LAMPIRAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Pendidikan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
III	Program Pengembangan Kurikulum
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
IV	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
V	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
TK NEGERI PEMBINA KLATEN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SKB CAWAS	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Pendidikan
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
2	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
SMP NEGERI	
I	Program Pengelolaan Pendidikan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
SD NEGERI	
I	Program Pengelolaan Pendidikan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
DINAS KESEHATAN	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
1	Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Peningkatan Pelayanan BLUD
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
4	Penerbitan izin Rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
5	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	RSD BAGAS WARAS
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Peningkatan Pelayanan BLUD
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
	PUSKESMAS
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3	Peningkatan Pelayanan BLUD
II	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
IV	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
V	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
VI	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
VII	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
VIII	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
IX	Program Penyelenggaraan Jalan
1	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
X	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengembangan Perumahan
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
III	Program Kawasan Permukiman
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
IV	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
VI	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
VII	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
VIII	Program Penataan Bangunan Gedung
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
IX	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
X	Program Pengembangan Jasa Konstruksi

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
III	Program Penanggulangan Bencana
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
IV	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Sosial
1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
IV	Program Pengendalian Penduduk
1	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
VI	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
VII	Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
VIII	Program Rehabilitasi Sosial
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
IX	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
X	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
XI	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
1	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
XII	Program Penanganan Bencana
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
XIII	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
IX	Program Perlindungan Khusus Anak
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
III	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
IV	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
1	Penyimpanan Sementara Limbah B3
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
1	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
VI	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
VII	Program Pengelolaan Persampahan
1	Pengelolaan Sampah
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pendaftaran Penduduk
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
III	Program Pencatatan Sipil
1	Pelayanan Pencatatan Sipil
IV	Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1	Penyusunan Profil Kependudukan
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Administrasi Pemerintahan Desa
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
III	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PERHUBUNGAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
4	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
6	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
7	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
III	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
IV	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
V	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
VI	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
VIII	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
IX	Program Pengembangan UMKM
1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Promosi Penanaman Modal
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Pelayanan Penanaman Modal
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
IV	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pembinaan Perpustakaan
1	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Pengelolaan Arsip
1	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
IV	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
1	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
2	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan
V	Program Perizinan Penggunaan Arsip
1	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
III	Program Pengembangan Kebudayaan
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
IV	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
V	Program Pemasaran Pariwisata
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
VI	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
VII	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
VIII	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
III	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi
2	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
3	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
VI	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
1	Pengembangan Prasarana Pertanian
2	Pembangunan Prasarana Pertanian

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
3	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
VII	Program Penanganan Kerawanan Pangan
1	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
VIII	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
IX	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
X	Program Pengawasan Keamanan Pangan
1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
XI	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
1	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
XII	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
XIII	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
1	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
XIV	Program Penyuluhan Pertanian
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
1	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
III	Program Perencanaan Tenaga Kerja

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
IV	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
V	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
VI	Program Penempatan Tenaga Kerja
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
VII	Program Hubungan Industrial
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penanggulangan Bencana
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
SEKRETARIAT DAERAH	
	Bagian Hukum
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
	BAGIAN KESRA
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	BAGIAN ORGANISASI
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Penataan Organisasi
	BAGIAN PEMBANGUNAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Perekonomian dan Pembangunan
1	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
	BAGIAN PEREKONOMIAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II	Program Perekonomian dan Pembangunan
1	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
2	Kegiatan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam
	BAGIAN UMUM
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah
	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
	BAGIAN PROKOPIM
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
	BAGIAN PEMERINTAHAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1	Administrasi Tata Pemerintahan
2	Fasilitasi Kerjasama Daerah
Sekretariat DPRD	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
8	Layanan Administrasi DPRD
II	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
2	Peningkatan Kapasitas DPRD
3	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
II	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
III	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
IV	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
V	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Kepegawaian Daerah
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
2	Mutasi dan Promosi ASN
3	Pengembangan Kompetensi ASN
4	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
1	Pengembangan Kompetensi Teknis
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

INSPEKTORAT KABUPATEN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penyelenggaraan Pengawasan
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
III	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
2	Pendampingan dan Asistensi

UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN PRAMBANAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
KECAMATAN GANTIWARNO	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
KECAMATAN WEDI	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN BAYAT
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN CAWAS
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN TRUCUK
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	KECAMATAN KEBONARUM
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN JOGONALAN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN MANISRENGGO	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
	KECAMATAN KARANGNONGKO
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN CEPER
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
	KECAMATAN PEDAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
I	KECAMATAN KARANGDOWO
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
I	KECAMATAN JUWIRING
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
I	KECAMATAN WONOSARI
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KECAMATAN DELANGGU
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN POLANHARJO	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN KARANGANOM	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN TULUNG	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN JATINOM	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN KEMALANG	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
IV	Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN NGAWEN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
IV	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN KALIKOTES	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

KECAMATAN KLATEN UTARA	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KELURAHAN BARENG LOR
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakatan Desa Kelurahan
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	KELURAHAN GERGUNUNG
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	KECAMATAN KLATEN TENGAH
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

	KELURAHAN BARENG
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN KEMASYAKARATAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	PROGRAM KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Sinergiritas dengan Kepolisian Negara Republik Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kelurahan
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat
	KELURAHAN BUNTALAN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	KELURAHAN KABUPATEN
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

KELURAHAN KLATEN	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	Program Koordinasi Kententraman dan Ketertiban Umum
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

KELURAHAN TONGGALAN	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
	KELURAHAN MOJAYAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	KECAMATAN KLATEN SELATAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	KELURAHAN GAYAMPRI
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

NO	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN
1	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
II	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
III	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
IV	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
V	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
VI	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

117300

LAMPIRAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME
DAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTPUT
LPPD TAHUN 2021

LAMPIRAN IKK OUTCOME

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	%	44.501	81,87	DINAS PENDIDIKAN
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		54.355		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	%	110.965	95,63	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		116.031		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	%	51.454	90,11	
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		57.099		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	%	859	93,27	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		921		
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten	%	1.794	0,14	DINAS KESEHATAN
				Jumlah Penduduk kabupaten		1.276.535		
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	,,,,,,,,,%	8	66,67	
				Jumlah RS kabupaten		12		
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	,,,,,,,,,%	14.653	95,24	
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		15.386		
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	,,,,,,,,,%	14.734	100,00	
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten		14.734		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	14.444	98,21	DINAS KESEHATAN
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		14.707		
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	58.236	90,66	
				Jumlah balita di kabupaten		64.233		
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	79.606	58,28	
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		136.598		
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	617.753	84,98	
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		726.968		
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	193.199	93,41	
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		206.823		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	214.927	68,16	
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		315.318		
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	38.284	102,13	
				Jumlah penderita DM di kabupaten		37.485		
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	2.825	96,45	
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		2.929		
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,%	3.374	24,65	
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi TBC di kabupaten/kota		13.687		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	,,,,,,,,,%	14.975	88,35	DINAS KESEHATAN
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		16.949		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,%	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo, dalam SILPPD diinput 1/1		DPU DAN PR
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)				
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,%	Kabupaten Klaten tidak memiliki kawasan Pantai, dalam SILPPD diinput 1/1		
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)				
		21	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	,,,,,,,,,%	3.255	10,95	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		29.713		
22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	,,,,,,,,,%	435.870	92,24	DINAS PERWASKIM		
		Jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		472.563				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	,,,,,,,,,%	467.057	100	DINAS PERWASKIM
				Jumlah rumah di Kabupaten (menggunakan data KK yang memiliki akses ke air limbah domestik)		467.057		
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	,,,,,,,,,%	41.828	100	DINAS PERWASKIM
				Jumlah IMB yang berlaku		41.828		
		25	Rasio kemandapan jalan	Panjang jalan kewenangan kabupaten yang mantap (baik+sedang)	,,,,,,,,,%	66.526	92,93	DPU DAN PR
				Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten		71.589		
		26	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	,,,,,,,,,%	105	49,07	DINAS PERWASKIM
				Jumlah kebutuhan tenaga ahli di wilayah kabupaten		214		
		27	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	,,,,,,,,,%	33	100	DINAS PERWASKIM
				jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		33		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021%	NA (tidak ada bencana sehingga tidak ada Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten) dalam SILPPD diinput 1/1		DINAS PERWASKIM
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021				
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni%	tidak ada relokasi program pemerintah Kabupaten, dalam SILPPD diinput 1/1		
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan				
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani%	19,21	100	
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha		19,21		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni%	14.003	2,99	
				Jumlah total unit rumah Kabupaten		467.057		
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU (termasuk yang sudah terbangun)%	7.320	100	
				Jumlah unit rumah kab/kota		7.320		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	,,,,,,,,,%	20	100	SATPOL PP
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		20		
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	,,,,,,,,,%	34	100	
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		34		
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	3.400	3.400	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	4.812	4.812	
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	4.181	4.181	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	Jumlah layanan pemadaman,penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	,,,,,,,,,%	98	67,12
Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten					146			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Menit	9 menit 53 Detik	9 menit 53 Detik	SATPOL PP
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	,,,,,,,,,%	4.453	17,69	DINSOSP3AKB
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		25.176		
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	,,,,,,,,,%	67	100	DINSOSP3AKB
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		67		
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	,,,,,,,,,%	belum ada RTKD, dalam SILPPD diinput 0/1		DISPERINAKEK
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten				
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,%	1.928	4,35	
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		44.290		
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	%	28.531.108.640.000	64.418.849.944	
Jumlah tenaga kerja				44.290				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	,,,,,,,,,%	66	4,10	DISPERINAKEB
				Jumlah Perusahaan		1.609		
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	,,,,,,,,,%	1.125	15,87	
				Jumlah pencaker yang terdaftar		7.091		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	,,,,,,,,,%	2.977.922.000,00	0,38	DINSOSP3AKB
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD		783.781.837.384,28		
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	,,,,,,,,,%	13	0,004	
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		346.347		
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	32	4,996	
				Jumlah penduduk perempuan		640.491		
9	Pangan	50	Persentase cadangan pangan	Jumlah cadangan pangan kabupaten	%	383.032,56	251,98	DPKPP
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten		152.007,57		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	,,,,,,,,,,%	37.103	100	DPU PR DAN BPN KLATEN
				Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi		37.103		
		52	Persentase penetapan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	,,,,,,,,,,%	751.344	100	
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		751.344		
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	,,,,,,,,,,%	37.103	100	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		37.103		
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	,,,,,,,,,,%	Tidak ada Tanah Obyek Landreform (TOL), dalam SILPPD diinput 1/1		
				Jumlah penerima tanah obyek landreform				
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	,,,,,,,,,,%	tidak ada ajuan izin membuka tanah dari masyarakat, dalam SILPPD diinput 1/1		
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan				
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	,,,,,,,,,,%	3	100	
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan		3		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		55,90	55,90	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)		36,15	36,15	
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)		84,95	84,95	
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)		42,54	42,54	
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	,,,,,,,,,,%	93.986,64	43,62	
				Total vol timbunan sampah Kabupaten		215.458,83		
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	,,,,,,,,,,%	tidak ada pelanggaran terhadap PPLH dan PUU LH dari pelaku usaha yang diberi izin lingkungan		
Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan				56				
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	,,,,,,,,,,%	950.234	98	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk wajib KTP-el		967.759		
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	,,,,,,,,,,%	214.194	69	
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		308.776		
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	Jumlah penduduk usia 0 - 18 Tahun tahun yang memiliki akte kelahiran	,,,,,,,,,,%	329.696	95	
				Jumlah penduduk usia 0 - 18 tahun		345.666		
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	,,,,,,,,,,%	8	32	
Jumlah PD				25				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,%	5	62,50	DISPERMASDES
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		8		
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,%	16	5,56	
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		288		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$		1,6	1,6	DINSOSP3AKB
				67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern		
		Jumlah Pasangan Usia Subur	197.321					
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	,,,,,,,,,%	33.476	16,97	
Jumlah Pasangan Usia Subur	197.321							
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas kabupaten = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan})$		Jumlah Trayek dilayani = 7 Jumlah Kebutuhan Trayek = 33 Bobot Trayek = 0,8 $IK 1 = (7 \times 0,8) : 33 = 0,16$, Rasio KONEKTIVITAS = $IK1 \times 100 = 0,16 \times 100 = 16$	16,0	DINAS PERHUBUNGAN
				70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	,,,,,,,,,%	51	100	DINAS KOMINFO
				Jumlah PD		51		
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	,,,,,,,,,%	8	61,54	
				Jumlah Layanan Publik		13		
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	,,,,,,,,,%	3.916	100	
				Jumlah penduduk (terdampak)		3.916		
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	,,,,,,,,,%	494	55,01	DISDAGKOP UKM
				Jumlah seluruh koperasi		898		
		75	Meningkatnya Usaha Kecil (mikro) yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil(mikro) yang menjadi wirausaha	,,,,,,,,,%	10.131	20,21	
				Jumlah usaha kecil keseluruhan (mikro)		50.125		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2021 - jumlah investasi tahun 2020) di kabupaten	,,,,,,,,,%	889.600.221.469	116,29	DPMPTSP
				Jumlah investasi tahun 2021 di kabupaten		1.654.596.685.722		
				Jumlah investasi tahun 2020 di kabupaten		764.996.464.253		
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	,,,,,,,,,%	2.750	1,004	DISBUDPAR PORA
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		274.005		
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	,,,,,,,,,%	11.690	4,27	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		274.005		
79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali	39	39			
20	Statistik	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	51	100	DINAS KOMINFO
				Jumlah PD		51		
		81	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	51	100	
				Jumlah PD		51		
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	,,,,,,,,,%	378	7560	
				Jumlah area penilaian		5		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	,,,,,,,,,%	13	100	DISBUDPAR PORA
				Jumlah cagar budaya yang terdata (yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya)		13		
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		64,184	64,184	DINAS ARSIPUS
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		belum pernah dinilai Perpusnas		
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$		$T=(80+100+100+0)/4$	70,00	DINAS ARSIPUS
				T = tingkat ketersediaan arsip				
				a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		80		
				i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		100		
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		100		
				j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		0		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota dengan NSPK a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		$T = (80 + 70 + 70 + 90 + 80 + 70) / 6$ 80 70 70 90 0 70	63,33	DINAS ARSIPUS
	Urusan Pilihan							
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Ton	30.421,13	30.421,13	DPKPP

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2021 - Jumlah wisatawan tahun 2020)	,,,,,,,,,%	-21.958	- 98,91	DISBUDPAR PORA
				Jumlah wisatawan tahun 2021		241		
				Jumlah wisatawan tahun 2020		22.199		
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2021 - Jumlah wisatawan tahun 2020)	%	-612.088	-43,75	
				Jumlah wisatawan tahun 2021		787.079		
				Jumlah wisatawan tahun 2020		1.399.167		
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	,,,,,,,,,%	44.420	11,85	
				Jumlah kamar yang tersedia		374.855		
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	,,,,,,,,,%	2.201.653.210.000	5,21	
				Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)		42.295.255.880.000		
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun 2021	,,,,,,,,,%	8.804.783.424	2,93	
				Realisasi PAD Tahun 2021		300.013.085.037		
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	Ton/Ha %	588.609,78	669,21	DPKPP
				Luas Panen (ha)		87.956,2		
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2021) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2020)	%	-1	- 50,00	
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2021		1		
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020		2		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
28	Kehutanan	URUSAN KEHUTANAN MENJADI KEWENANGAN PROVINSI						
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	%	tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Klaten sehingga tidak ada perusahaan yang memiliki ijin panas bumi. Urusan ESDM menjadi kewenangan Provinsi, dalam SILPPD diinput 1/1		BAG. PEREKONOMIAN
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	,,,,,,,,,%	252	92,65	DISDAGKOP UKM
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		272		
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	,,,,,,,,,%	29.837,00	52,38	
				RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		56.961,46		
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	,,,,,,,,,%	5.590	62,11	
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		9.000		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2021 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2020)	,,,,,,,,,,%	9	0,1	DISPERINAKEK
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021		8.344		
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020		8.335		
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Rata-rata capaian RPIK	,,,,,,,,,,%	323,28	80,82	
					4			
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,,%	10	100	
				Jumlah izin yang dikeluarkan		10		
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,,%	Di Kabupaten Klaten belum pernah ada yang mengajukan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah, dalam SILPPD diinput 1/1		
				Jumlah izin yang dikeluarkan				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	,,,,,,,,,%	Kabupaten Klaten belum memiliki kawasan Industri sehingga belum ada yang mengajukan IUKI dan IPKI, dalam SILPPD diinput 1/1		DISPERINAKEK
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini			ada	SIIDA dan SIINAS	
32	Transmigrasi							
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	106	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi) Jumlah APBD (realisasi)	,,,,,,,,,%	246.947.670.760	9,90	BPKD
		107	Persentase PAD	Jumlah PAD	,,,,,,,,,%	315.324.847.282	0,75	
			Jumlah PDRB Non Migas		42.295.255.880.000			
		108	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3	INSPEKTORAT
109	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	3	3			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		110	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)	,,,,,,,,,%	1.576.518.550.020	63,23	BPKD	
				Jumlah belanja APBD (realisasi)		2.493.406.881.542			
		111	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	Tahun 2015, 2018, 2019, 2020			
					WDP	Tahun 2016, 2017, 2014, 2013, 2012, 2011			
				TW					
					TMP				
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	112	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	,,,,,,,,,%	Pada tahun 2021 tidak ada kontrak infrastruktur besar di atas 50 M		BLP	
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		96			
		113	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	,,,,,,,,,%	139	2,43		
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		5.710			
		114	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	,,,,,,,,,%	617.670.000.000	94,0		
				Total belanja langsung		656.931.278.626			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	115	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,%	1.279	151,90	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		842		
		116	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,%	445	21	
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2.121		
		117	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,%	445	100	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		445		
		118	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	,,,,,,,,,%	2.493.406.881.542	91,98	BPKD
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		2.710.853.259.893,00	deviasi realisasi = (100-91,98) = 8,02	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		SUMBER DATA
						Elemen data	Capaian Kinerja	
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	119	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	,,,,,,,,,,%	315.324.847.282,00	126,60	BPKD
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		249.063.886.350,00	deviasi realisasi = (126,6-100) = 26,6	
		120	Assets management	Jumlah Asset Manajemen	Jumlah	4	4	
				Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	
				Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya	Ya	
		121	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	,,,,,,,,,,%	493.720.575.841,28	19,40	
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		2.545.164.494.577		
		37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	122	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (perangkat daerah yang mempublikasikan belanja anggaran)	,,,,,,,,,,%	
Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (jumlah perangkat daerah)						51		
123	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)			Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	,,,,,,,,,,%	12	100,00	
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		12		

LAMPIRAN IKK OUTPUT

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN				
PENDIDIKAN PAUD											
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	PAUD yang terakreditasi	Unit	520	520	Dinas Pendidikan			
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta Didik PAUD Penerima Perlengkapan Dasar	Orang	28.064	28.064				
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta Didik PAUD Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Orang	25.895	25.895				
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Pendidik jenjang PAUD	Orang	2.737	2.737				
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Total Pendidik PAUD	Orang	2.693	2.693				
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Pendidik PAUD yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	1.359	1.359				
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala Sekolah PAUD yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	681	681				
		PENDIDIKAN DASAR									
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD dan SMP yang terakreditasi	Unit	853	853				
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta Didik SD Penerima Perlengkapan Dasar	Orang	31.870	31.870				
		3	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta Didik SD Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Orang	69.933	69.933				
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Pendidik jenjang SD	Orang	6.564	6.564				
		5	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Pendidik jenjang SMP	Orang	3.414	3.414				
		6	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Total Pendidik SD	Orang	6.930	6.930				
7	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Total Pendidik SMP	Orang	3.075	3.075						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		8	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Tenaga KePendidikan jenjang SD	Orang	74	74	Dinas Pendidikan		
		9	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Tenaga KePendidikan jenjang SMP	Orang	16	16			
		10	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Total Tenaga Kependidikan SD	Orang	34	34			
		11	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Total Tenaga Kependidikan SMP	Orang	3	3			
		12	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Pendidik SD yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	6.405	6.405			
		13	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Pendidik SMP yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	2.906	2.906			
		14	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala Sekolah SD yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	495	495			
		15	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala Sekolah SMP yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	107	107			
		16	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tenaga Penunjang Jenjang SD	Orang	143	143			
		17	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tenaga Penunjang Jenjang SMP	Orang	747	747			
			PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA							
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD dan SMP yang terakreditasi	Unit	853	853			
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta Didik SMP Penerima Perlengkapan Dasar	Orang	60.160	60.160			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		3	jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta Didik SMP Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Orang	39.508	39.508	Dinas Pendidikan
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Pendidik jenjang SD	Orang	6.564	6.564	
		5	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Pendidik jenjang SMP	Orang	3.414	3.414	
		6	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Total Pendidik SD	Orang	6.930	6.930	
		7	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Total Pendidik SMP	Orang	3.075	3.075	
		8	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Tenaga KePendidikan jenjang SD	Orang	74	74	
		9	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Tenaga KePendidikan jenjang SMP	Orang	16	16	
		10	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	Total Tenaga Kependidikan SD	Orang	34	34	
		11	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	Total Tenaga Kependidikan SMP	Orang	3	3	
		12	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Pendidik SD yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	6.405	6.405	
		13	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Pendidik SMP yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	2.906	2.906	
		14	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala Sekolah SD yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	495	495	
		15	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala Sekolah SMP yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	107	107	
		16	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tenaga Penunjang Jenjang SD	Orang	143	143	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		17	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Tenaga Penunjang Jenjang SMP	Orang	747	747	Dinas Pendidikan	
PENDIDIKAN KESETARAAN									
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Satuan Pendidikan Kesetaraan terakreditasi	Unit	5	5		
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar	Orang	822	822		
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Peserta Didik Kesetaraan Penerima Pembebasan Biaya Pendidikan	Orang	822	822		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Kebutuhan Pendidik jenjang Kesetaraan	Orang	109	109		
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Total Pendidik Satuan Pendidikan Kesetaraan	Orang	142	142		
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Pendidik Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	126	126		
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki sertifikat pendidik	Orang	11	11		
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Kepala Sekolah Satuan Pendidikan Kesetaraan yang memiliki ijazah D4/ S1	Orang	9	9		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	12	12	Dinas Kesehatan	
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	12	12		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	12	12		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	448	448		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	448	448		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	448	448		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	448	448		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Jenis	11	11		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	3392	3392		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	469	469		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	1	1	Dinas Kesehatan	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	448	448		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	469	469		
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	469	469		
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	34	34		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	129	129		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	1	1		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	545	545		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir								DPU PR
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)			Ha	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo			
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)			M				
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)			Ha	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten			
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)			M	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi			
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota			Ada/Tidak	ada dalam bentuk Perbup Petunjuk Pelaksanaan penetapan pola tanam			
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota			Ada/Tidak				
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota			Jumlah	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten			
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kota/Kota								
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)			Ha	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo			
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)			M				
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)			Ha	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten			
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)			M	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak		ada dalam bentuk Perbup Petunjuk Pelaksanaan penetapan pola tanam	DPU PR DAN DINAS PERWASKIM
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Ada/Tidak			
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		Jumlah	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten		
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi								
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	%	3775	0,13	
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		29713		
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	3857	0,13	
				Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		29713		
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	774.683	35,28	
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		2.195.848		
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan								
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaraan SPAM		BUMD / UPTD	Ada	Ada	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	155	155	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	6	6	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik								
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	1.397	1.397	
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	4.109	4.109	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	5.506	5.506	DPU PR DAN DINAS PERWASKIM
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	475	475	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	475	475	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	467.057	467.057	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	467.057	98,83%	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha		472.563	Jumlah Seluruh KK	
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	467.057	98,83%	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha		472.563	Jumlah Seluruh KK	
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	4.109	0,87%	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T		85.046	Jumlah KK	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	472.563	100,00	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		472.563	Jumlah Seluruh KK	
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	3	60%	
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		5		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	14,15	50	DPU PR DAN DINAS PERWASKIM		
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		28,3				
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambuungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	4.109	100			
				jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota		4.109	Jumlah KK			
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	475	18,00			
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		2.639				
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota								
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	5	100			
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana		5				
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	395	395			
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	ada	ADA			
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Surat Keputusan Bupati Nomor 640/269 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Klaten Tahun 2021	Ada/Tidak	ADA	ada			
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	13	13			
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kota		Bangunan	Tidak Ada	Tidak Ada			
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah kota		Bangunan	3.107	3.107					
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	3.107	3.107					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
Rasio kemantapan jalan									
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan kota		KM	715,89	715,89		
		2	Panjang jalan yang dibangun		KM	18,38	18,38		
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	-	-		
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		KM	18,38	18,38		
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	2	2		
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	18,38	18,38		
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	2	2		
		8	Panjang jalan yang dipelihara		KM	40	40		
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	2	2		
Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli									
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kota		KEGIATAN	karena pandemi belum ada pelatihan tenaga ahli konstruksi			DINAS PERWASKIM
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota		Orang	183			
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kota		Orang	105			
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	ada	sipjaki.pu.go.id		
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kota		Ada/Tidak	ada	SIRUP		
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	ada			
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	ada			
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	ada			
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kota		Ada/Tidak	ada	website Disperwaskim		
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	Tidak	tidak ada		
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	ada	ada		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/Tidak	Ada	ada	DINAS PERWASKIM
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota		Ada/Tidak	Tidak		
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada pengajuan selama Tahun 2021 karena IUJK sudah menjadi kewenangan pusat sesuai dengan surat BK 04.01 - BK/349 tanggal 19 April 2021 tentang Pengehentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Ada/Tidak	TIDAK		
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	ada	melalui MK proyek	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	ada		
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	ada	melalui MK proyek	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Badan Usaha	214		
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota	Tidak ada pengajuan selama Tahun 2021 karena IUJK sudah menjadi kewenangan pusat sesuai dengan surat BK 04.01 - BK/349 tanggal 19 April 2021 tentang Pengehentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Badan Usaha	TIDAK		
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	33		
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		Badan Usaha			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada pengajuan selama Tahun 2021 karena IUJK sudah menjadi kewenangan pusat sesuai dengan surat BK 04.01 - BK/349 tanggal 19 April 2021 tentang Pengehentian Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	izin	TIDAK		DINAS PERWASKIM
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	1	1	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	Tidak ada kecelakaan		
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	1	1	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota							
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	4			
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	tidak ada bencana			
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang				
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit				
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit				
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit				
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit				
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang				
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha				
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota							
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Pada tahun 2021 tidak ada relokasi program Pemerintah sehingga tidak ada warga masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah			
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan		RT				
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT				
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT				
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT				
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha				
		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani							
		1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	19,21	19,21		
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	1266	1266		
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	194,85	194,85		
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)							
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	467.057	467.057		
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		Rumah	1.266	1.266		
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	14.003	14.003		
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah				
		5	Rasio rumah dan KK		Jumlah KK	443.401	95		
					Jumlah total unit rumah	467.057			

**DINAS
PERWASKIM**

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		6	Jumlah rumah pembangunan baru				TIDAK ADA	Baru dimulai Tahun 2022 sebanyak 16 unit	DINAS PERWASKIM	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)								
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	142	142			
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	7.302	7.302			
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	7.302	7.302			
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	7.302	7.302			
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	108	142			
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	7.302	7.302			
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	67	67			
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	41	41			
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang	67	67			
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan								SATPOL PP DAN BPBD
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		Jumlah	1.012	1.012			
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	5.235	5.235			
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/perkada	34	34			
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		orang	2	2			
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		ada/tidak	ada (2)	ada			
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		ada/tidak	ada (8)	ada			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana								
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	belum ada				
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan						
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	3.400	100,00					
		Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		3.400						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100	BPBD		
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1				
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100			
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah		1				
		3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	%	9.839	100			
				Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana		9.839				
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	9.219	100			
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		9.219				
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	9.219	100			
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		9.219				
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan	%	9.219	100,00			
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		9.219				
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	tidak ada KLB tahun 2021				
				Jumlah seluruh penetapan status KLB						
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	3	100			
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		3				
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	89	100			
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat		89				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	4.181	100	BPBD	
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		4.181			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kota		Layanan	226	226	SATPOL PP	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	tidak ada	tidak ada		
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	tidak ada	tidak ada		
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	tidak ada	tidak ada		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	5	5		
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	25	25		
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	30	30		
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	6	6				
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan						DINSOS P3AKB	
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		jenis	1	1				
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		orang	25.176	25.176				
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim	1	1				
4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang terlantar dan gepeng dan gepeng yang dijangkau.		Orang	4.453	4.453				
5	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.		unit	1	1				
6	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemakaman sesuai standar gizi.		orang	0	0				
7	Jumlah rumah singgah, shelter, tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.		unit	1	1				
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.		orang	0	0				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu,		orang	119	119	DINSOS P3AKB	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		Unit	1	1		
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.		Unit	0	0		
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.		orang	0	0		
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah.		orang	0	0		
		14	Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan.		orang	508	508		
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial.		orang	4.453	4.453		
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Orang	4.453	4.453		
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.		orang	0	0		
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		orang	0	0		
		19	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.		orang	52	52		
		20	jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang diidentifikasi dengan keluarga.		orang	52	52		
		21	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.		orang	34	34		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota							
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	67	67		
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	67	67		
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	3	3		
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	0	0		
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	67	67		
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	508	508		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
7	Tenaga Kerja	Persentase kota/kota yang menyusun rencana tenaga kerja								DISPERINAHER
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kota			Ada/Tidak	tidak ada	tidak ada		
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja			%	tidak ada RTKD	tidak ada RTKD		
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja			Perusahaan	tidak ada RTKD	tidak ada RTKD		
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi								
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun 2021	%	15	8,98			
		keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2021				167				
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2021	%	77	71,96			
		jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2021				107				
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2021	%	107	5,66			
		jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021				1892				
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2021	%	10	8,33			
		jumlah seluruh LPK pada tahun 2021				120				
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2021	%	100	83,33			
		jumlah LPK yang terdata pada tahun 2021				120				
		6	Jumah penganggur yang dilatih			Orang	160	160		
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	%	1892	100			
		Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021				1892				
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2021	%	3176	58,31			
		jumlah lulusan pada tahun 2021				5447				
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi	%	490	100					
Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2021				490						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	Σ CPMI dilatih	%	80	100	DISPERI NAKER	
				Σ CPMI terdaftar		80			
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			25	25		
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja									
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2021	%	4	0,25		
				jumlah perusahaan pada tahun 2021		1609			
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		belum pernah dilakukan perhitungan BPS			
Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS)									
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2021	%	173	39,23		
				Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih		441			
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2021	%	20	76,92		
				Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh		26			
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	31	31		
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	95	49,22		
				Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		193			
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	441	53,85		
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		819			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	15	0,93	DISPERI NAKER		
				Jumlah perusahaan pada tahun 2021		1609				
		7	Jumlah mogok kerja		Mogok	0	tidak ada mogok kerja			
		8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	0	tidak ada penutupan perusahaan			
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan	0	tidak ada perselisihan			
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Perselisihan	0	tidak ada perselisihan			
		11	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	16	16			
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		pekerja	16	16			
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		Perselisihan	13	13			
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		LKS	1	1			
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	%	2	12,5			
				Jumlah kasus perselisihan		16				
		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kota/kota dalam 1								
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kota		Lowongan Kerja	3.902	3.902			
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	7.091	7.091			
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		BKK	35	35			
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota		Orang	34	34			
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	4	4			
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Lembaga	0	0			
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota		Perjanjian	197	197			
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	0	0					
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	45	45					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	80	80	DISPERI NAKER	
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi	\sum fasilitasi PMI yang dipulangkan	%	0	0,00		
				\sum PMI yang pulang		185			
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	\sum PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%	45	56,25		
				\sum PMI/TKI		80			
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan dan keluarganya	\sum PMIatau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	0	0,00		
		\sum PMI/TKI purna dan keluarganya		185					
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	\sum LTSA yang terbentuk	%	0	belum terdapat LTSA di Kabupaten		
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI		0			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD							DINSOS P3AKB
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kota yang telah dilatih PUG		Lembaga	58	58		
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kota		Prog/Keg	22	22		
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota							
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	1	1		
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Lembaga	2	2		
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	%	13	100		
				jumlah korban kekerasan anak di tingkat kota		13			
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Lembaga	1	1		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah kota (APBD kota)		Lembaga	4	4		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak							
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan		Organisasi	2	2		
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kota yang sudah dilatih		Orang	34.563	34.563		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Lembaga	2	2		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kota		Lembaga	4	4	DINSOS P3AKB	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/Program	1	1		
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi		Lembaga	2	2		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	%	32	100		
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		32			
		Persentase Cadangan Pangan							
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	ada (Foto gudang cadangan pangan)	ada (Foto gudang cadangan pangan)	DPKPP	
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	ada (Data penyaluran pangan pokok (beras) DPKPP Kab. Klaten 2021)	ada (Data penyaluran pangan pokok (beras) DPKPP Kab. Klaten 2021)		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	tidak	Tidak		
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	ada (Laporan akhir sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2021)	ada (Laporan akhir sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tahun 2021)		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	ada (Foto buku peta ketahanan dan kerentanan pangan/ FSVA)	ada (Foto buku peta ketahanan dan kerentanan pangan/ FSVA)	DPKPP
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada (Data penanganan daerah rentan rawan pangan DPKPP Kab. Klaten 2021) 100%	ada (Data penanganan daerah rentan rawan pangan DPKPP Kab. Klaten 2021) 100%	
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	ada (Data penyaluran cadangan pangan tahun 2021 pada daerah rentan rawan pangan DPKPP Kab. Klaten) 100%	ada (Data penyaluran cadangan pangan tahun 2021 pada daerah rentan rawan pangan DPKPP Kab. Klaten) 100%	
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	ada (Laporan akhir kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota tahun 2021)	ada (Laporan akhir kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota tahun 2021)	
						ada(Laporan hasil pengawasan pangan tahun 2021)	ada (Laporan hasil pengawasan pangan tahun 2021)	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang								DPU PR DAN BPN
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya	%	2	100			
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		2				
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimumabsentee	%	Tidak ada Tanah Obyek Landreform (TOL				
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek						
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee	%	Tidak ada Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee				
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek						
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya	%	tidak ada ajuan izin membuka tanah dari masyarakat	tidak ada ajuan izin membuka tanah dari masyarakat			
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun						
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%					
		Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun								

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota							
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :						
			a) Indeks Kualitas Air, (IKA)					36,15	36,15
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)					84,95	84,95
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)					42,54	42,54
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota							
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kota				ada / tidak	ada	Ada
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah							
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota		Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota		%	56	100
					jumlah usulan permohonan yang teregistrasi			56	
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kota		Jumlah PPLHD yang ada		%	1	1,79
					Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota			56	
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 kota		Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda		%	tidak ada masyarakat hukum adat di Klaten	
					Jumlah usulan MHA				
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH		Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan		%		
					Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada				
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana		%	23	100		
			target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat			23			
6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota yang ditangani		Pengaduan masyarakat yang ditangani		%	4	100		
			Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi			4			

**Dinas
Lingkungan
Hidup**

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN				
Perekaman KTP Elektronik											
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	%	553	100	DISDUKCAPIL			
				Peristiwa perkawinan yang diterbitkan		553					
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Percerian yang diterbitkan	%	52	100				
				Peristiwa Perceraian yang diterbitkan		52					
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	%	13.985	107				
				Peristiwa kematian yang diterbitkan		13.130					
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kota kota dalam satu tahun	%	100	100				
				2 dalam 1 tahun		100					
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal											
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	10	10	DISPER MASDES			
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa		40	40	
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga		325	325	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Data penambahan BUMDes tahun 2021	Desa	32	32				
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri									
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	10	10				
				2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa		40	40	
				3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga		325	325	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Data penambahan BUMDes tahun 2021	Desa	32	32				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR								DINSOS P3AKB
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	ada	ada			
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah	sudah dilakukan pendataan oleh BKKBN Pusat tetapi hasilnya belum rilis				
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b}{b} \times \frac{d}{k}$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun		274	274			
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE	%	4.089	0,32			
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE		1.276.030				
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder / kelompok	7	7			
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)								
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	%	76	70,37			
				Jumlah faskes		108				
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	%	46.846	23,74			
				Jumlah PUS		197.321				
		3	Pemerintah Daerah kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif			5	5			
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%	2.828	58,79			
jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan				4.810						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)								
		1	Persentase kepesertaan KB di kota dan kota dengan kepesertaan rendah	Jumlah kota yang memiliki persentase kepesertaan KB paling rendah dalam satu kota	%	5	19,23	DINSOS P3AKB		
				Jumlah kota dalam kota		26	Jumlah kecamatan			
		2	Persentase kepesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	56.353	9,02			
				Jumlah Keluarga PBI		624.614				
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kota								
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	5	41,67	DINAS PERHUBUNGAN		
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		12				
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	%	8.562	100,00			
				Jumlah kendaraan wajib uji		8.562				
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%	0	0			
				Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau kota		0				
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/kota	%	56.987	60,96			
				Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/kota		150.169				
		V/C Ratio di Jalan kota								
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/kota	%	56.987	60,96			
				Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/kota		150.169				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
16	Komunikasi dan Informatika	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo								DISKOM INFO
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	51	100,00			
				Jumlah Perangkat Daerah		51				
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	51	100,00			
				Jumlah Perangkat Daerah		51				
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ada/Tidak	Ada	Ada			
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi								
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	300	100			
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		300				
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	51	100,00			
				Jumlah Perangkat Daerah		51				
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	51	100,00			
				Jumlah Perangkat Daerah		51				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik Jumlah layanan	%	16	100,00	DISKOM INFO		
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik Jumlah layanan	%	3	100			
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Jumlah sistem elektronik	%	121	100			
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah Jumlah layanan publik dan layanan administrasi	%	8	61,54			
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah	%	51	100			
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah Jumlah perangkat daerah	%	51	100			
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya Jumlah perangkat daerah	%	51	100,00			
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	%	93	61,59			
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Jumlah perangkat daerah	%	51	100,00			
									51	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	63	100,00	DISKOM INFO	
				Jumlah ASN Pengelola TIK		63			
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada/tidak	Ada			
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kota							
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	5	100,00		
				Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah kota		5			
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	613	100		
				Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota		613			
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%	2	100		
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik		2			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas								DISDAGKOP UKM
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	11	9,48			
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		116				
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	5	100,00			
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		5				
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	494	55,01			
				Jumlah koperasi yang ada		898				
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	67	17,82			
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada		376				
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	90	10,02			
				Jumlah koperasi yang ada		898				
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	100	0,06			
				Jumlah anggota koperasi yang ada		156303				
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	9	1,00			
				Jumlah koperasi yang ada		898				
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	1	0,11			
				Jumlah koperasi yang ada		898				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	%	158	17,59		
				Jumlah koperasi yang ada		898			
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	1	0,11		
				Jumlah koperasi yang ada		898			
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	0	0,00		
				Jumlah koperasi yang ada		898			
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	9	1,00		
				Jumlah koperasi yang ada		898			
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	3	0,33		
				Jumlah koperasi yang ada		898			
		Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha							
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	50	0,100		
				Jumlah wirausaha yang ada		50125			
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput@ke dalam sistem data online (ODS)	%	10131	20,21		
				Jumlah usaha mikro yang ada		50125			
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	136	0,27		
				Jumlah usaha mikro yang ada		50125			
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	%	1424	2,92		
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk		48701			
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	649	1,31		
		Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		49476					

**DISDAGKOP
UKM**

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	3049	6,08	DISDAGKOP UKM	
				Jumlah usaha mikro yang ada		50125			
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	862	1,72		
				Jumlah usaha mikro yang ada		50125			
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kota							DPMPSTP
	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kota		Ada/Tidak	ada	masih dalam bentuk Raperda			
	2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Ada/Tidak	ada	ada			
	3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Jumlah Laporan	belum ada	belum ada			
	4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Jumlah Kegiatan	1	1			
	5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah Kegiatan	1	1			
	6	Kegiatan misi penanaman modal		Jumlah Kegiatan	1	1			
	7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Konsultasi	5782	5782			
	8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	3134	3134			
	9	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah Realisasi (Rupiah)	1.654.596.685.722	1.654.596.685.722			
	10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		Jumlah Aparatur	26	26			
	11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Jumlah Perusahaan	510	510			
	12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kota		Ada/Tidak	ada	ada			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri								DISBUDPAR PORA
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	20	20			
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	5	5			
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan								
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	230	230			
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Orang	230	230			
		Peningkatan Prestasi Olahraga								
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	64	64			
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	3	3					
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah								DISKOM INFO
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	Ada	Ada			
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	Belum ada				
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Kompilasi	24	24			
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	Belum ada				
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Jumlah Kompilasi	24	24			
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	%	246	100			
				Jumlah kegiatan statistik sektoral		246				
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	%	246	100					
		jumlah indikator statistik sektoral		246						

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah								DISKOM INFO
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	%	10	100,0			
				Jumlah kegiatan strategis yang ada		10				
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	%	belum ada	belum ada			
				Jumlah SE yang ada						
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	belum ada	belum ada			
				Jumlah SE yang ada						
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS)	Jumlah titik teramankan	%	40	67,8			
Jumlah titik pada PHKS				59						
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya								DISBUDPAR PORA
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Obyek	3	3			
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		Obyek	3	3			
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Obyek	1	1			
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Orang	10	10			
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Cagar Budaya	13	13			
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Cagar Budaya	4	4			
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data		Cagar Budaya	0	0			
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),		Cagar Budaya	13	13			
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	13	13			
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Koleksi	26	26			
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Orang	belum memiliki Museum yang dikelola Pemda				
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Tim	belum ada Tim Ahli Cagar Budaya		DISBUDPAR PORA
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kota		Tim			
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Tim			
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	4	4	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	4	4	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Unit	13 (cagar budaya)	13	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	Klaten belum memiliki museum yang dikelola Pemda		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						DINAS ARSIPUS
1	Rasio kecukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	rasio	865.514	0,68			
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.276.535				
2	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	11.811	0,93			
		Jumlah penduduk di wilayahnya		1.276.535				
3	Rasio kecukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	rasio	167	0,0001			
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.276.535				
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	1	1,3			
		Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		79				
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Jenis	6	6			
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat								
1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	0	0			
2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	0	0			
3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Budaya Etnis	0	0			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59								DINAS ARSIPUS
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip aktif	%	1.720	100,0			
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip Jumlah seluruh arsip inaktif	%	154.563	100,0			
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik Jumlah seluruh arsip Statis	%	65.964	100,0			
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kota	%	0	0			
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan								
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	65.107	65.107			
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	4.350	4.350			
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota		Jumlah Arsip	22.035	22.035			
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	302	302			
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0			
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
Urusan Pilihan										
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)								DPKPP
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)				90 RTP	90 RTP		
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional		%	Kabupaten Klaten tidak memiliki Pelabuhan dan Tempat Pelelangan Ikan			
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kota						
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan			Izin	132	132		
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)			Pembudidaya	50 orang/ pembudidaya	50 orang/ pembudidaya		
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi			Benih	113.986.913 ekor	113.986.913 ekor				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan								DISBUD PARPORA
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Pengelola	59 (Pelaku Pengelola Destinasi Wisata + Desa Wisata)	59 (Pelaku Pengelola Destinasi Wisata + Desa Wisata)			
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Obyek	59	59			
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kota		TDUP	158 (1. Hotel: 52 TDUP 2. Cafe dan Resto: 65 TDUP 3. Panti Pijat/Spa: 25 TDUP 4. Biro Perjalanan Wisata: 16)	158 (1. Hotel: 52 TDUP 2. Cafe dan Resto: 65 TDUP 3. Panti Pijat/Spa: 25 TDUP 4. Biro Perjalanan Wisata: 16)			
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	290	290			
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan	4	4			
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota		Kegiatan	0	0			
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri		Industri	3	3			
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%	400	23,32			
				Jumlah tenaga kerja pariwisata		1715				
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	333	25,32					
		Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		1315						
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Lokasi	30	30					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN			
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun								DPKPP
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Unit	63	63			
		2	Prasaran pertanian yang digunakan		Prasarana	38	38			
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		Dokumen	404	404			
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	88	100			
				Jumlah prasarana yang dibangun		88				
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	404	100			
				Jumlah usulan usaha pertanian		404				
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular								
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	%	1	100			
				Jumlah area yang terkena bencana		1				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
28	Kehutanan								
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Dokumen			Urusan Kehutanan merupakan wewenang pemerintah provinsi	
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	kelompok				
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Ha				
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	kejadian				
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota							Bag. Perekonimian
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/tidak	tidak	tidak		
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)							DISDAGKOP UKM
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	%	14	100		
				Jumlah permohonan penerbitan TDG		14			
		2	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	%	236	100		
				Jumlah gudang yang ada di Kab kota		236			
		3	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		%				
		3a	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%		Belum ada permohonan STPW		
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri					
		3b	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%		Belum ada permohonan STPW		
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN				
		3c	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	Belum ada permohonan STPW		DISDAGKOP UKM			
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri								
		4	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kota	%	Berdasar PP No.5 /2021 tentang Perijinan berbasis resiko. Penerbitan ijin SIUP bahan berbahaya menjadi Kewenangan Kemendak dengan rekomendasi dari Disperindag Provinsi Jateng					
			Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer								
		5	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam	%	Pada tahun 2021 tidak ada permohonan penerbitan SKA dari pelaku usaha					
			Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar								
		6	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%	k= (0,5 X 0,5) X 100%	100				
		7	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		%	belum ada perhitungan dari BPS					
		Persentase penanganan pengaduan konsumen									
		1	Jumlah penanganan pengaduan konsumen			Pengaduan	25		25		
2	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi			Konsumen	25	25					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		Persentase kinerja realisasi pupuk							DISDAGKOP UKM
		1	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di kota	$X = a / (b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	a=29.837 b=90% x 56.961,461 c=56.961,461	58	58		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku							
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	5590	62,11		
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota		9000			
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%	42	91,30		
		Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		46					
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kota							DISPERI NAKER
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		TIDAK ADA KAWASAN INDUSTRI DI Klaten					
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk							
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam									
1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		%	100					
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	520	100,00				
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		520					
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh									
1	Persentase jumlah izin perluasan industri IPUI bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan		Di Kabupaten Klaten belum pernah ada yang mengajukan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah					
		Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		SUMBER DATA	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini						DISPERI NAKER
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di kota di SIINas	%	65	100,00		
				Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota		65			
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		Kawasan	Kabupaten Klaten tidak ada kawasan transmigrasi			
		2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman				
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Permukiman				